



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI

**PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 112 TAHUN 2022**

Tentang

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 112 TAHUN 2022

TENTANG
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

2. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
4. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.
5. Standar Akuntansi Pemerintahan selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
6. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
8. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah daerah.
9. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
10. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
11. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transaksi surplus/defisit-LRA, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggaran dalam satu periode yang sama.
12. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL Akhir.
13. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas pada tanggal tertentu.
14. Laporan Operasional (LO) adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dalam periode sebelumnya kecuali untuk tahun pertama pemberlakuan SAP berbasis akrual.

15. Laporan Arus Kas (LAK) adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama 1 (satu) periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
16. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
17. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan memadai.
18. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
19. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
20. Bendahara Umum Daerah (BUD) adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
21. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah SKPD atau Unit Kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
22. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
23. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
24. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidangnya tugasnya.
25. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
26. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
27. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

28. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
29. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
30. Periode akuntansi adalah periode pertanggungjawaban keuangan entitas pelaporan yang periodenya sama dengan periode tahun anggaran.
31. Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
32. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Daerah atau Bendahara Penerimaan yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.
33. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
34. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.
35. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atas potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
36. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
37. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
38. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.

39. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.
40. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
41. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan lain-lain yang berkaitan dengan perbedaan waktu pencatatan atau periode yang berjalan.
42. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
43. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
44. Bupati adalah Bupati Banggai.
45. Daerah adalah Kabupaten Banggai.

Pasal 2

SAPD meliputi prosedur pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, pelaporan posisi dan operasi keuangan yang disusun berdasarkan SAP dan bertujuan untuk memberikan pedoman dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah agar terjadi keselarasan laporan keuangan dari entitas akuntansi.

Pasal 3

- (1) SAPD bertujuan memberikan acuan dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah agar terjadi keselarasan laporan keuangan masing-masing SKPD dan PPKD sebagai entitas akuntansi.
- (2) Laporan keuangan yang dihasilkan SKPD dan PPKD dikonsolidasikan oleh SKPKD menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Laporan keuangan dibuat untuk laporan keuangan periode 1 (satu) tahun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah dan laporan keuangan interim untuk periode triwulan yang dipergunakan untuk keperluan manajemen.

Pasal 4

Pemerintah Daerah membuat laporan keuangan berdasarkan SAPD.

- (1) SAPD terdiri dari:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Sistem Akuntansi SKPD;
 - c. Sistem Akuntansi PPKD; dan
 - d. Sistem Akuntansi SKPKD;
- (3) SAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) BAS merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan kodefikasi akun yang menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap.
- (2) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan di dalam pencatatan transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku besar dan pengikhtisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada laporan keuangan.
- (3) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas level 1 sampai dengan level 6, meliputi:
 - a. level 1 (satu) menunjukkan kode akun;
 - b. level 2 (dua) menunjukkan kode kelompok;
 - c. level 3 (tiga) menunjukkan kode jenis;
 - d. level 4 (empat) menunjukkan kode obyek;
 - e. level 5 (lima) menunjukkan kode rincian obyek; dan
 - f. level 6 (enam) menunjukan kode sub rincian obyek.
- (4) Kode akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. akun 1 (satu) menunjukkan aset;
 - b. akun 2 (dua) menunjukkan kewajiban;
 - c. akun 3 (tiga) menunjukkan ekuitas;
 - d. akun 4 (empat) menunjukkan pendapatan-LRA;
 - e. akun 5 (lima) menunjukkan belanja;
 - f. akun 6 (enam) menunjukkan pembiayaan;
 - g. akun 7 (tujuh) menunjukkan pendapatan-LO; dan
 - h. akun 8 (delapan) menunjukkan beban.
- (5) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banggai Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2014 Nomor 2168), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 30 Desember 2022


BUPATI BANGGAI,

AMIRUDIN

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI,


ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2022 NOMOR 2727

Lampiran I : Peraturan Bupati Banggai

Nomor : 112 Tahun 2022

Tanggal : 30 Desember 2022

BAB I PENDAHULUAN

A. PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pedoman Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah bertujuan memberikan petunjuk penyusunan laporan keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah. Pedoman ini menjelaskan rangkaian proses akuntansi yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah dalam setiap periode pelaporan, sehingga laporan keuangan bisa tersusun secara efisien dan akurat.

1. Penganggaran

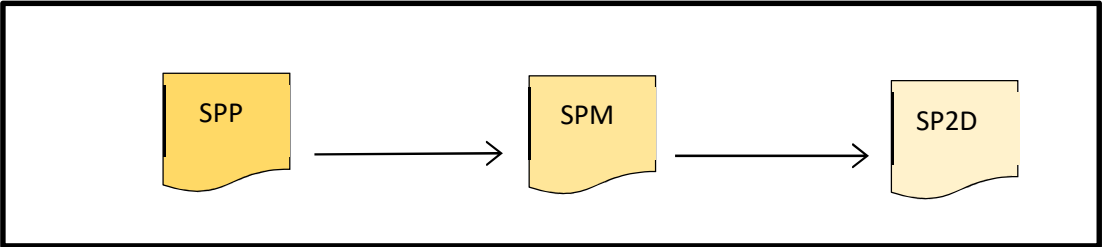
Penganggaran keuangan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah selama satu tahun anggaran melalui pengguna anggaran/barang Perangkat Daerah. Perda APBD terinci atas Dokumen Pelaksanaan Anggaran yaitu DPA-SKPD dan DPA-PPKD. Selanjutnya berdasarkan anggaran kas yang disusun oleh setiap entitas akuntansi, dibuat Surat Penyediaan Dana (SPD) yaitu dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Permohonan Pembayaran (SPM).

2. Pelaksanaan Anggaran

Pelaksanaan anggaran yang terkait dengan aspek keuangan ditandai dengan pencairan anggaran yang melalui proses sebagai berikut:

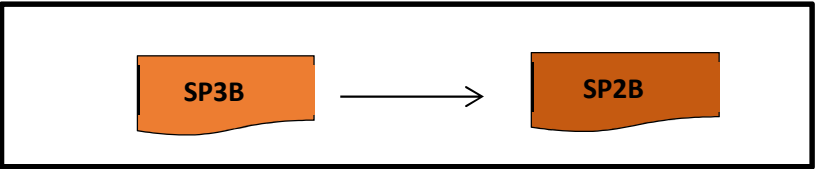
- a. Pengajuan SPP yaitu dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran. SPP terdiri dari SPP-UP/TU, SPP-GU, SPP-LS.
- b. Pembuatan Surat Perintah Membayar (SPM) yaitu dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD. SPM terdiri dari SPM-UP/TU, SPM-GU, SPM-LS.

- c. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yaitu dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM. SP2D terdiri dari SP2D-UP/TU, SP2D-GU, SP2D-LS.



Selain itu, pencatatan pelaksanaan anggaran yang penerimaan dan pengeluarannya tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah prosesnya melalui:

- Pengajuan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) yaitu dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pengesahan pendapatan dan belanja.
- Penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) yaitu dokumen yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD sebagai pengesahan penerimaan dan pengeluaran yang diajukan melalui SP3B.



3. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Pelaksanaan APBD terkait dengan keuangan, harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui DPRD. Selaku pengguna anggaran/pengguna barang, SKPD merupakan entitas akuntansi yang wajib menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban atas anggaran/barang yang dikelolanya. Selanjutnya laporan keuangan SKPD tersebut dikonsolidasikan dengan laporan keuangan PPKD oleh SKPKD menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) selaku entitas pelaporan.

LKPD sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat harus melalui proses audit terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebelum diserahkan kepada DPRD untuk dapat ditetapkan sebagai Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.



LKPD terdiri dari Laporan Pelaksanaan Anggaran (*Budgetary Report*), Laporan Finansial (*Financial Statement*), dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Pelaksanaan Anggaran terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL). Laporan Finansial terdiri dari Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Laporan Arus Kas (LAK). Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) berisi penjelasan masing-masing komponen laporan keuangan.

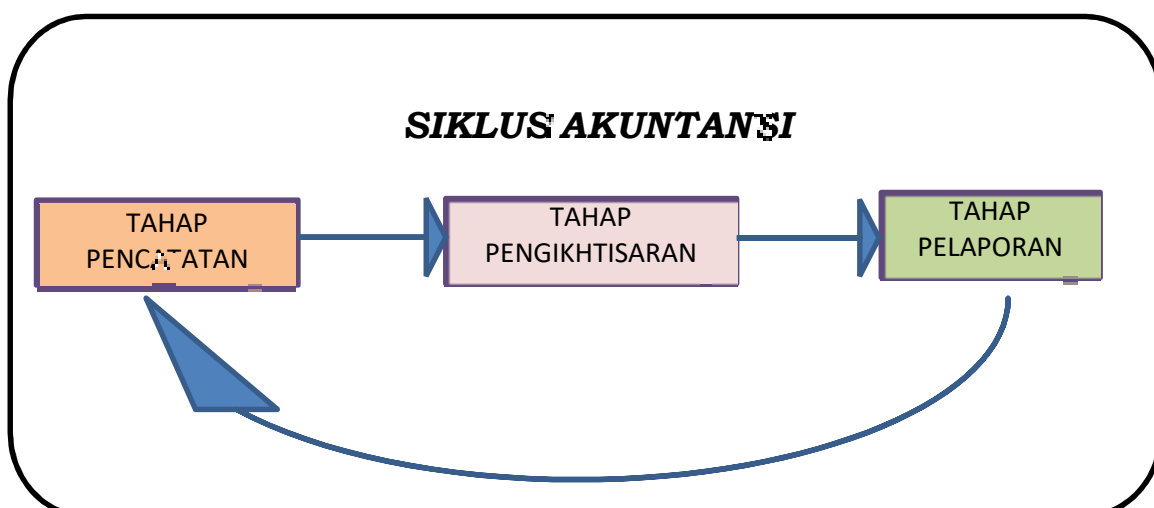
LRA, LO, LPE dan Neraca yang disusun oleh entitas akuntansi diserahkan kepada entitas pelaporan, dipersamakan sebagai bukti memorial yang digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan entitas pelaporan.

LKPD menggambarkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta manajerial dan pengawasan atas posisi keuangan daerah/nilai harta/kekayaan daerah.

B. LAPORAN KEUANGAN DIHASILKAN DARI SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Untuk dapat menyusun suatu laporan keuangan, pelaksanaan APBD yang terwujud dalam transaksi keuangan, melalui suatu rangkaian berurutan yang disebut sebagai siklus akuntansi.

Siklus akuntansi terdiri dari tiga tahap yaitu tahap pencatatan, tahap pengikhtisaran, dan tahap pelaporan.

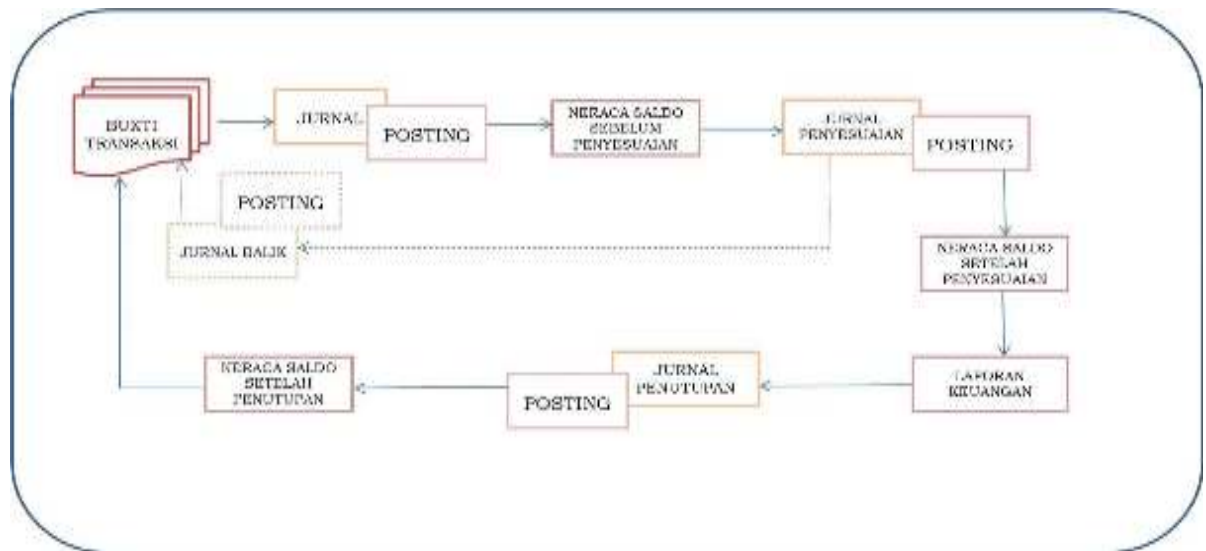


Siklus tersebut dituangkan dalam bentuk sistem akuntansi, yang terdiri dari:

- 1. Sistem Akuntansi SKPD,
- 2. Sistem Akuntansi PPKD, dan
- 3. Sistem Akuntansi SKPKD, yang merupakan penggabungan antara laporan keuangan SKPD dan PPKD.

C. PROSEDUR DALAM SISTEM AKUNTANSI

Tahapan siklus akuntansi terinci atas prosedur-prosedur yang berurutan sebagai berikut:



1. Penjurnalan

Penjurnalan merupakan proses pencatatan transaksi keuangan berdasarkan bukti/dokumen pendukung transaksi secara kronologis (berurutan menurut kejadiannya) pada suatu format jurnal. Transaksi yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan terlebih dahulu dianalisis apakah bersifat keuangan atau tidak, karena hanya yang merupakan transaksi keuangan yang dicatat dalam jurnal. Penjurnalan dilakukan dengan sistem pencatatan berpasangan (*double entry system*), yaitu pencatatan satu transaksi pada sisi debit dan sisi kredit sekaligus guna menjaga keseimbangan persamaan akuntansi. Keseimbangan persamaan akuntansi menggambarkan posisi harta/aset selalu sama dengan sumber daya untuk mendapatkannya, yaitu:

$$\text{HARTA/ASET} = \text{KEWAJIBAN} + \text{EKUITAS}$$

Dengan mengacu pada persamaan akuntansi tersebut, maka ketentuan debit dan kredit untuk komponen *financial report* adalah sebagai berikut:

ELEMEN LAPORAN KEUANGAN	SALDO NORMAL	BERTAMBAH	BERKURANG
Harta / Aset	Debet	Debet	Kredit
Kewajiban	Kredit	Kredit	Debet
Ekuitas	Kredit	Kredit	Debet
Pendapatan-LO	Kredit	Kredit	Debet
Beban	Debet	Debet	Kredit
Surplus (Defisit)-LO	Kredit	Kredit	Debet
Surplus Non Operasional-LO	Kredit	Kredit	Debet
Defisit Non Operasional-LO	Debet	Debet	Kredit

Sedangkan ketentuan debit dan kredit untuk *budgetary report* adalah sebagai berikut:

ELEMEN LAPORAN KEUANGAN	SALDO NORMAL	BERTAMBAH	BERKURANG
Pendapatan-LRA	Kredit	Kredit	Debet
Belanja	Debet	Debet	Kredit
Surplus/(Defisit)-LRA	Kredit	Kredit	Debet
Penerimaan Pembiayaan	Kredit	Kredit	Debet
Pengeluaran Pembiayaan	Debet	Debet	Kredit
Silpa/(Sikpa)	Kredit	Kredit	Debet
Saldo Anggaran Lebih	Kredit	Kredit	Debet

Elemen dari laporan tersebut dapat dirinci dalam beberapa akun/perkiraan. Akun tersebut menampung jenis harta, jenis kewajiban, jenis ekuitas, jenis pendapatan, jenis belanja/beban, atau jenis pembiayaan yang memiliki sifat dan fungsi yang sama, sebagaimana tercantum dalam Bagan Akun Standar.

Prosedur untuk menjurnal adalah sebagai berikut:

a. Analisis transaksi

Berdasarkan bukti/dokumen transaksi, analisis transaksi meliputi:

- 1) Akun yang bertambah dan/atau berkurang;
- 2) Akun yang di debit dan yang di kredit; dan
- 3) Jumlah debit dan kreditnya.

b. Membuat ayat jurnal

Jurnal dibedakan menjadi tiga jenis jurnal, yaitu:

- 1) Jurnal penerimaan kas, digunakan untuk menjurnal transaksi yang terkait dengan penerimaan kas.
- 2) Jurnal pengeluaran kas, digunakan untuk menjurnal transaksi yang terkait dengan pengeluaran kas.
- 3) Jurnal umum, digunakan untuk menjurnal transaksi yang tidak dapat dilakukan pada jurnal pengeluaran atau penerimaan kas.

Dalam bentuk sederhana, ayat jurnal mencantumkan nama akun dan jumlahnya pada sisi debet dan kredit (*total sisi debet harus sama dengan total sisi kredit*).

2. *Posting* (Pemindahbukuan)

Posting merupakan proses untuk memindahbukukan pencatatan pada jurnal ke kelompok akun yang sama dalam bentuk buku besar (*ledger*) secara periodik. Melalui *posting*, akumulasi saldo dalam jangka waktu tertentu dari suatu akun transaksi yang dicatat pada jurnal dapat diketahui. Selain *posting* ke buku besar, diperlukan pula proses *posting* ke buku besar pembantu (*subsidiary ledger*) yang berisi informasi rincian dari akun yang terdapat dalam buku besar,

3. Penyusunan Neraca Saldo Sebelum Penyesuaian

Neraca saldo sebelum Penyesuaian merupakan ikhtisar jumlah saldo-saldo dari masing-masing akun pada buku besar (*ledger*) sebelum dilakukan Jurnal Penyesuaian.

4. Jurnal Penyesuaian

Jurnal Penyesuaian digunakan untuk memutakhirkan saldo akun menjadi jumlah yang seharusnya pada akhir tahun pelaporan. Jurnal penyesuaian merupakan bagian dari siklus akuntansi sehingga berbeda dengan jurnal koreksi.

Penyesuaian dilakukan terhadap transaksi yang bersifat *accrual*, *deferral*, penyusutan/amortisasi serta persediaan. *Accrual* adalah suatu kondisi yang terjadi sebelum kas diterima atau dikeluarkan pada suatu transaksi pertukaran, sedangkan *deferral* adalah suatu kondisi yang terjadi setelah kas diterima atau dibayarkan beberapa waktu sebelumnya.

5. *Posting* (Pemindahbukuan)

Posting jurnal penyesuaian dilakukan sama seperti langkah *posting* pada nomor 2.

6. Neraca Saldo Setelah Penyesuaian

Neraca Saldo Setelah Penyesuaian merupakan ikhtisar jumlah saldo dari masing-masing akun pada buku besar (*ledger*) setelah *posting* jurnal penyesuaian.

7. Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang disusun berdasarkan Neraca Saldo Setelah Penyesuaian yaitu:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Laporan Operasional;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas
- e. Neraca;
- f. Laporan Arus Kas; dan
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Dari ketujuh jenis laporan tersebut, Sistem Akuntansi SKPD hanya menghasilkan laporan keuangan:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Operasional;
- c. Laporan Perubahan Ekuitas;
- d. Neraca; dan
- e. Catatan Atas Laporan Keuangan.

8. Jurnal Penutupan (*Closing Entries*)

Jurnal penutupan digunakan untuk menutup akun yang bersifat sementara (*temporary account*) pada akhir tahun anggaran, antara lain yang terdapat pada LRA dan LO.

9. *Posting* (Pemindahbukuan)

Posting jurnal penutupan dilakukan sama seperti langkah *posting* pada nomor 2.

10. Neraca Saldo Setelah Penutupan

Neraca Saldo Setelah Penutupan merupakan ikhtisar jumlah saldo dari masing-masing akun pada buku besar (*ledger*) setelah jurnal penutupan dan *postingnya*.

11. Jurnal Balik (*Reversing Entries*)

Jurnal balik merupakan langkah yang bersifat opsional pada awal tahun anggaran berikutnya untuk transaksi *deferral/accrual* yang dicatat dengan *revenue/expense approach*.

BAB II
SISTEM AKUNTANSI SKPD

A. PENJURNALAN TRANSAKSI PADA SKPD

1. Transaksi Anggaran

Berdasarkan DPA-SKPD, Ppk-SKPD membuat jurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	Estimasi Pendapatan	xxx	
		xxx	Estimasi Perubahan SAL*	xxx	
		xxx	Apropriasi Belanja		xxx

*Estimasi Perubahan SAL bisa berada di Debet maupun kredit, menyesuaikan dengan mana yang lebih besar antara Estimasi Pendapatan dengan Apropriasi Belanja.

Bagi SKPD yang bukan merupakan penghasil pendapatan maka tidak perlu membuat ayat jurnal (*entry*) Estimasi Pendapatan, cukup *Estimasi Perubahan SAL* pada *Apropriasi Belanja* sebesar jumlah anggaran

Estimasi Pendapatan dan Apropriasi Belanja hanya dijurnal di awal periode dan ditutup di akhir periode. Pada saat terjadi realisasi anggaran, keduanya tidak perlu dijurnal.

2. Transaksi Pendapatan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, dikenal 2 (dua) istilah pendapatan, yakni:

a) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- 1) Timbulnya hak atas pendapatan,
- 2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai maupun masih berupa piutang.

b) Pendapatan-LRA.

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Termasuk pendapatan yang diterima dan telah di setorkan ke rekening BLUD.

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat:

- a. Diterima di rekening Kas Umum Daerah, atau
- b. Diterima oleh SKPD, atau
- c. Diterima entitas lain di luar pemerintah daerah atas nama BUD

Pencatatan akuntansi

- a. Pengakuan pendapatan yang didahului penerbitan Surat Ketetapan
Berdasarkan surat ketetapan pajak daerah/surat ketetapan retribusi daerah/surat tagihan lainnya/dokumen yang dipersamakan, contoh Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, dan Pajak Air Permukaan, PPK-SKPD akan menjurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	Piutang Pendapatan.... <i>(sesuai jenisnya)</i>	xxx	
		xxx	Pendapatan <i>(sesuai jenisnya)</i> -LO		xxx

Penerimaan dapat melalui Bendahara atau langsung ditransfer melalui bank yang ditunjuk. Bila melalui Bendahara Penerimaan, maka berdasarkan nota kredit bank/kuitansi/bukti pembayaran, PPK-SKPD menjurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	
		xxx	Piutang Pendapatan <i>(sesuai jenisnya)</i> -LO		xxx
xxx	xxx	xxx	Saldo Anggaran Lebih	xxx	
		xxx	Pendapatan.... <i>(sesuai jenisnya)</i> -LRA		xxx

Saat Pendapatan tersebut disetor ke RKUD, maka berdasarkan STS/dokumen yang dipersamakan, PPK-SKPD menjurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	RK-PPKD	xxx	
		xxx	Kas di Bendahara Penerimaan		xxx

Bila penerimaan kas langsung disetor ke RKUD, maka berdasarkan nota kredit bank/STS, Ppk-SKPD menjurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx xxx	RK-PPKD Piutang Pendapatan (<i>sesuai jenisnya</i>)-LO	xxx	xxx
xxx	xxx	xxx xxx	Saldo Anggaran Lebih Pendapatan.... (<i>sesuai jenisnya</i>)-LRA	xxx	xxx

b. Pengakuan pendapatan yang didahului perhitungan sendiri oleh WP

Berdasarkan perhitungan sendiri, WP melakukan pembayaran yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan atas kesesuaian nilai pajak tersebut untuk dilakukan penetapan. Contoh Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Parkir dan sebagainya.

PPK-SKPD mengakui pendapatan tersebut dengan menjurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx xxx	Kas di Bendahara Penerimaan Pendapatan.... (<i>sesuai jenisnya</i>)-LO	xxx	xxx

Apabila ditemukan adanya kurang bayar maka akan diterbitkan Surat Keterangan Kurang Bayar. SKPD mengakui adanya penambahan Pendapatan LO. Berdasarkan Surat Keterangan tersebut PPK SKPD menjurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx xxx	Piutang (<i>sesuai jenisnya</i>) Pendapatan.... (<i>sesuai jenisnya</i>)-LO	xxx	xxx

Sedangkan untuk lebih bayar maka akan diterbitkan Surat Keterangan Lebih Bayar. SKPD mengakui adanya pengurangan Pendapatan LO. Berdasarkan Surat Keterangan tersebut PPK SKPD menjurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx xxx	Pendapatan (<i>sesuai jenisnya</i>)-LO Utang Kelebihan Pembayaran Pajak	xxx	xxx

c. Pengakuan pendapatan yang pembayarannya dilakukan dimuka oleh WP untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan

Salah satu kategori ini adalah pembayaran Pajak Kendaraan Kendaraan Bermotor (STNK), dimana PPK-SKPD akan menjurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx xxx	Kas di Bendahara Penerimaan Pendapatan Diterima Dimuka	xxx	xxx

Di akhir tahun atau akhir periode akan diterbitkan bukti memorial untuk mengakui pendapatan LO, PPK SKPD menjurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx xxx	Pendapatan Diterima Dimuka Pendapatan (<i>sesuai jenisnya</i>)-LO	xxx	xxx

- d. Pengakuan pendapatan yang didahului penghitungan sendiri oleh WP dan pembayarannya diterima dimuka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode kedepan.

Sebelum dilakukan penetapan, kesesuaian nilai pajak diperiksa dan selanjutnya ketika bendahara penerimaan SKPD menerima pembayaran pajak, PPK-SKPD akan menjurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx xxx	Kas di Bendahara Penerimaan Pendapatan Diterima Dimuka	xxx	xxx

Pada akhir periode SKPD melakukan pemeriksaan. Apabila ada pajak kurang bayar, SKPD akan mengeluarkan surat ketetapan kurang bayar. Dan selanjutnya dicatat dengan jurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
Pengakuan Pendapatan –LO pada saat pemeriksaan					
xxx	xxx	xxx xxx	Pendapatan Diterima Dimuka Pendapatan.... (<i>sesuai jenisnya</i>)-LO	xxx	xxx
Pengakuan Piutang atas Pajak Kurang Bayar					
xxx	xxx	xxx xxx	Piutang Pendapatan... (<i>sesuai jenisnya</i>) Pendapatan.... (<i>sesuai jenisnya</i>)-LO	xxx	xxx

Apabila ditemukan adanya pajak lebih bayar, SKPD akan mengeluarkan surat ketetapan lebih bayar atas pajak, dan pengakuan dicatat dengan jurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
Pengakuan Pendapatan –LO pada saat pemeriksaan					
xxx	xxx	xxx xxx	Pendapatan Diterima Dimuka Pendapatan Pajak....LO	xxx	xxx
Pengakuan Piutang atas Pajak Lebih Bayar					
xxx	xxx	xxx xxx	Pendapatan Pajak....LO Utang Kelebihan Pembayaran Pajak	xxx	xxx

e. Koreksi Pendapatan

Koreksi kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya terdiri dari:

- 1) Koreksi yang bersifat berulang dan sistemik pada periode yang sama atau berbeda dengan saat pengakuannya, dibukukan sebagai berikut:
 - a) berdasarkan SP2D, Ppk-SKPD menjurnal koreksi Pendapatan yang menyebabkan pengeluaran kas:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx xxx	Pendapatan.... <i>(sesuai jenisnya)</i> –LO RK-PPKD*	xxx	xxx
xxx	xxx	xxx xxx	Pendapatan.... <i>(sesuai jenisnya)</i> –LRA Saldo Anggaran Lebih	xxx	xxx

*hanya dapat dibayarkan melalui mekanisme LS

- b) berdasarkan STS/dokumen yang dipersamakan, PPK-SKPD menjurnal koreksi pendapatan yang menyebabkan penerimaan kas:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx xxx	RK-PPKD* Pendapatan.... <i>(sesuai jenisnya)</i> –LO	xxx	xxx
xxx	xxx	xxx xxx	Saldo Anggaran Lebih Pendapatan.... <i>(sesuai jenisnya)</i> –LRA	xxx	xxx

*karena disetor langsung ke RKUD

- 2) Koreksi atas kesalahan yang tidak berulang adalah sebagai berikut:
 - a) Bila koreksi bersifat menambah Pendapatan terjadi pada periode yang sama dengan saat pengakuannya, atau menambah Pendapatan tahun sebelumnya sedangkan laporan keuangan belum diterbitkan, maka berdasarkan bukti memorial/STS/dokumen yang dipersamakan, PPK-SKPD menjurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	Kas di Bendahara Penerimaan*	xxx	
		xxx	Pendapatan.... (sesuai jenisnya)–LO		xxx
xxx	xxx	xxx	Saldo Anggaran Lebih	xxx	
		xxx	Pendapatan.... (sesuai jenisnya)–LRA		xxx

*bila disetorkan langsung ke RKUD, Debet pada RK-PPKD.

- b) Bila koreksi Pendapatan tahun-tahun sebelumnya bersifat menambah kas, dan laporan keuangan sudah diterbitkan, maka berdasarkan bukti memorial/STS/dokumen yang dipersamakan, PPK-SKPD menjurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	Kas di RKUD*	xxx	
		xxx	Ekuitas–LO**		xxx
xxx	xxx	xxx	Saldo Anggaran Lebih	xxx	
		xxx	Pendapatan.... (sesuai jenisnya)–LRA		xxx

• karena disetorkan langsung ke RKUD

**kredit pada Piutang bila telah dicatat sebagai Piutang

- c) bila koreksi bersifat mengurangi Pendapatan terjadi pada periode yang sama dengan saat pengakuannya, atau mengurangi Pendapatan tahun sebelumnya sedangkan laporan keuangan belum diterbitkan, maka berdasarkan bukti memorial/SP2D/ dokumen yang dipersamakan, PPK-SKPD menjurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	Pendapatan.... (sesuai jenisnya)–LO	xxx	
		xxx	RK-PPKD*		xxx
xxx	xxx	xxx	Pendapatan.... (sesuai jenisnya)–LRA	xxx	
		xxx	Saldo Anggaran Lebih		xxx

*hanya menggunakan mekanisme LS

- d) bila koreksi Pendapatan tahun-tahun sebelumnya bersifat mengurangi kas dan laporan keuangan telah diterbitkan, maka PPK-SKPD tidak perlu membuat jurnal, karena pengembalian Pendapatan yang demikian hanya dapat dianggarkan pada PPKD.

3. Transaksi Beban/Belanja

- a. Pengakuan Beban yang didasarkan atas Berita Acara Serah Terima Barang/surat tagihan/dokumen yang dipersamakan, PPK-SKPD membuat jurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	Beban... (sesuai jenisnya)	xxx	
		xxx	Utang belanja.... (sesuai jenisnya)*		xxx

*Bila menggunakan mekanisme LS, kredit pada RK-PPKD.

- b. Pengeluaran kas atas Beban yang sudah diakui, berdasarkan SP2D-GU/SP2D-GU Nihil, PPK-SKPD membuat jurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	Utang Belanja... (sesuai jenisnya)-LO	xxx	
		xxx	Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx
xxx	xxx	xxx	Belanja.... (sesuai jenisnya)	xxx	
		xxx	Saldo Anggaran Lebih		xxx

- c. Apabila melakukan pengisian kas di Bendahara Pengeluaran, berdasarkan SP2D-GU, PPK SKPD juga membuat jurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	
		xxx	RK-PPKD		xxx

- d. Bila pengeluaran kas untuk membayar beban yang sudah diakui menggunakan mekanisme LS, PPK-SKPD membuat jurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	Utang belanja.... (sesuai jenisnya)	xxx	
		xxx	RK-PPKD		xxx
xxx	xxx	xxx	Belanja.... (sesuai jenisnya)	xxx	
		xxx	Saldo Anggaran Lebih		xxx

- e. Koreksi Beban/Belanja

Koreksi kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya terdiri dari:

- 1) Koreksi atas kesalahan yang bersifat berulang dan sistemik pada periode yang sama atau berbeda dengan saat pengakuannya, dilakukan hanya pada saat kas dikeluarkan/diterima.

- a) berdasarkan SP2D, PPK-SKPD menjurnal koreksi yang menyebabkan pengeluaran kas:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	Beban.... (sesuai jenisnya)	xxx	
		xxx	Kas di Bendahara Pengeluaran*		xxx
xxx	xxx	xxx	Belanja.... (sesuai jenisnya)	xxx	
		xxx	Saldo Anggaran Lebih		xxx

*bila menggunakan SP2D-LS, maka kredit pada RK-PPKD

- b) berdasarkan STS/dokumen yang dipersamakan, PPK-SKPD menjurnal koreksi beban/belanja yang menyebabkan penerimaan kas:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	RK-PPKD	xxx	
		xxx	Beban.... (sesuai jenisnya)		xxx
xxx	xxx	xxx	Saldo Anggaran Lebih	xxx	
		xxx	Belanja.... (sesuai jenisnya)		xxx

2) Koreksi atas kesalahan yang *tidak berulang* terdiri dari:

- a) Koreksi bersifat menambah beban/belanja pada periode yang sama dengan saat pengakuan, atau menambah beban/belanja tahun sebelumnya dan laporan keuangan belum diterbitkan, maka berdasarkan bukti memorial/SP2D/ dokumen yang dipersamakan, PPK-SKPD menjurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	Beban.... (sesuai jenisnya)	xxx	
		xxx	Kas di Bendahara Pengeluaran*		xxx
xxx	xxx	xxx	Belanja.... (sesuai jenisnya)	xxx	
		xxx	Saldo Anggaran Lebih		xxx

*bila menggunakan SP2D-LS, maka kredit pada RK-PPKD

- b) Bila koreksi bersifat menambah beban/belanja tahun-tahun sebelumnya sedangkan laporan keuangan sudah diterbitkan, maka berdasarkan SP2D/dokumen yang dipersamakan, PPK-SKPD menjurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	Ekuitas-LO*	xxx	
		xxx	Kas di Bendahara Pengeluaran**		xxx
xxx	xxx	xxx	Belanja.... (sesuai jenisnya)	xxx	
		xxx	Saldo Anggaran Lebih		xxx

*Debet pada Utang (sesuai jenisnya) bila sudah tercatat sebagai utang

**Bila menggunakan SP2D-LS, maka kredit pada RK-PPKD

- c) Bila koreksi mengurangi beban/belanja tahun-tahun sebelumnya sedangkan laporan keuangan sudah diterbitkan, maka berdasarkan bukti memorial/STS/ dokumen yang dipersamakan, PPK-SKPD menjurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	RK-PPKD	xxx	
		xxx	Lain-Lain PAD Yang Sah-LO		Xxx
xxx	xxx	xxx	Saldo Anggaran Lebih	xxx	
		xxx	Lain-Lain PAD Yang Sah-LRA		Xxx

4. Transaksi Aset

Aset Lancar

a. Kas di Bendahara Pengeluaran

- 1) Pencatatan atas pencairan atau pengisian kembali UP/TU Kas di Bendahara Pengeluaran berdasarkan SP2D UP/TU/GU, PPK-SKPD menjurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	
		xxx	RK-PPKD		xxx

- 2) Pengembalian sisa UP/TU ke RKUD berdasarkan STS, PPK-SKPD akan menjurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	RK-PPKD	xxx	
		xxx	Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx

b. Piutang

Pencatatan saat timbulnya piutang

- 1) Piutang yang timbul akibat Pendapatan yang belum diterima kasnya, oleh PPK-SKPD dijurnal berdasarkan SKRD/surat tagihan lainnya:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	Piutang Pendapatan.... <i>(sesuai jenisnya)</i>	xxx	
		xxx	Pendapatan... <i>(sesuai jenisnya)</i> -LO		xxx

- 2) Tagihan selain yang berasal dari piutang pendapatan (*misalnya uang muka*), dibukukan oleh PPK-SKPD berdasarkan surat tagihan/dokumen yang dipersamakan dengan jurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	Piutang Lainnya.... <i>(sesuai jenisnya)</i>	xxx	
		xxx	Kas Di Bendahara Pengeluaran*		xxx

*komponen neraca yang terpengaruh akibat timbulnya Piutang Lainnya (bila pengeluaran kas menggunakan *SP2D-LS*, kredit pada *RK-PPKD*).

- a. Pengakuan Piutang berupa Beban Dibayar Dimuka dilakukan melalui jurnal penyesuaian, PPK-SKPD memutakhirkan saldo akun Beban Dibayar Dimuka dengan menjurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	Beban Dibayar Di Muka	xxx	
		xxx	Beban.... <i>(sesuai jenisnya)</i>		xxx

- b. Pencatatan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Berdasarkan hasil analisis umur piutang, PPK-SKPD membukukan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih (*melalui jurnal penyesuaian*) sebagai berikut:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih <i>(sesuai jenisnya)</i>	xxx	
		xxx	Penyisihan Piutang Tak Tertagih.... <i>(sesuai jenisnya)</i>		xxx

c. Pencatatan pelunasan Piutang

Berdasarkan STS/dokumen yang dipersamakan, PPK-SKPD menjurnal pelunasan piutang sebagai berikut:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	Kas di Bendahara Penerimaan*	xxx	
		xxx	Piutang (sesuai jenisnya)		xxx

*bila disetorkan langsung ke RKUD, Debet pada RK-PPKD

d. Pencatatan penghapusan Piutang

Piutang yang kadaluarsa atau tidak dapat ditagih kembali harus dihapuskan. Berdasarkan Keputusan Kepala Daerah/Pejabat berwenang tentang penghapusan piutang, PPK-SKPD menjurnal penghapusan piutang sebagai berikut:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	Penyisihan Piutang Tak Tertagih.... (sesuai jenisnya)	xxx	
		xxx	Piutang (sesuai jenisnya)		xxx

c. Persediaan

Metode pencatatan persediaan terbagi 2 (dua), yaitu metode perpetual dan metode periodik. Metode perpetual menuntut dilakukannya pemutakhiran setiap terjadi perubahan posisi akun persediaan. Sedangkan penggunaan metode periodik dalam pencatatan persediaan hanya meminta pemutakhiran posisi akun persediaan di akhir periode (saat dilakukannya penyesuaian).

a. Pembelian persediaan yang langsung digunakan pada kegiatan dan belum dilakukan pembayaran, namun Berita Acara Serah Terima Barang dari rekanan telah diterima, PPK-SKPD akan melakukan pencatatan dengan menjurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	Beban Persediaan.... (sesuai jenisnya)*	xxx	
		xxx	Utang belanja.... (sesuai jenisnya)		xxx

*bila persediaan tidak langsung digunakan (sifatnya untuk digunakan dalam satu periode atau sifatnya berjaga-jaga), debet pada Persediaan....

b. Pembayaran atas persediaan dilakukan melalui mekanisme SP2D-LS, PPK-SKPD membuat jurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	Utang Belanja.... (sesuai jenisnya)	xxx	
		xxx	RK PPKD*		xxx

*bila pembayaran menggunakan SP2D-UP/GU/TU, kredit pada Kas di Bendahara Pengeluaran

- c. Pada akhir periode dilakukan penghitungan fisik terhadap barang dan jasa yang dibeli dan belum digunakan, akan dibuat jurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	Persediaan (sesuai jenisnya)	xxx	
		xxx	Beban.... (sesuai jenisnya)		xxx

- d. Apabila metode periodik yang digunakan untuk pencatatan persediaan, maka nilai persediaan dimutakhirkan sesuai dengan hasil inventarisasi fisik. Berdasarkan berita acara inventarisasi fisik akhir tahun, PPK-SKPD membuat jurnal penyesuaian:

- (1) Menghapuskan saldo awal Persediaan

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	Beban Persediaan.... (sesuai jenisnya)*	xxx	
		xxx	Persediaan.... (sesuai jenisnya)		xxx

- (2) Memunculkan saldo Persediaan akhir tahun anggaran sesuai berita acara inventarisasi fisik.

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	Persediaan.... (sesuai jenisnya)*	xxx	
		xxx	Beban Persediaan.... (sesuai jenisnya)		xxx

Aset Tetap

- a. Perolehan Aset Tetap

- 1) Pengeluaran Belanja berdasarkan SP2D-UP/LS, PPK-SKPD menjurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	Aset Tetap.... (sesuai jenisnya)	xxx	
		xxx	Kas di Bendahara Pengeluaran*		xxx
xxx	xxx	xxx	Belanja Modal.... (sesuai jenisnya)	xxx	
		xxx	Saldo Anggaran Lebih		xxx

*bila menggunakan SP2D-LS, kredit pada RK-PPKD

2) Berdasarkan berita acara hibah, PPK-SKPD menjurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	Aset Tetap.... (sesuai jenisnya)*	xxx	
		xxx	Pendapatan Hibah.... (sesuai jenisnya)-LO		xxx

*sebesar nilai yang tercantum dalam berita acara hibah atau nilai wajar saat diterima

3) Melalui Pertukaran

- a. Pertukaran dengan aset yang sejenis
- b. Pertukaran dengan aset yang tidak serupa tanpa disertai penyerahan kas
- c. Pertukaran dengan aset yang tidak serupa disertai penyerahan kas.

b. Penyusutan Aset Tetap

Berdasarkan bukti memorial, PPK-SKPD membukukan beban penyusutan melalui jurnal penyesuaian sebagai berikut:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	Beban Penyusutan (sesuai jenisnya)	xxx	
		xxx	Akumulasi Penyusutan.... (sesuai jenisnya)-LO		xxx

c. Penghapusan Aset Tetap

Aset Tetap SKPD dapat dihapuskan karena dijual, dihibahkan, dimusnahkan atau dialihkan. Pencatatan akuntansi untuk penghapusan tersebut adalah:

1) Penghapusan untuk dimusnahkan.

Untuk mencatat penghentian pemanfaatan Aset Tetap yang akan dimusnahkan, PPK-SKPD menjurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	Akumulasi Penyusutan.... (sesuai jenisnya)	Xxx	
		xxx	Aset Lainnya-Aset Lain-lain	xxx	
		xxx	Aset Tetap (sesuai jenisnya)		xxx

Sedangkan untuk mencatat penghapusan Aset Tetap, berdasarkan surat keputusan penghapusan/berita acara pemusnahan, PPK-SKPD menjurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	Surplus/(Defisit) Nonoperasional-LO	xxx	
		xxx	Aset Lainnya-Aset Lain-Lain		xxx

2) Penghapusan karena hilang dan timbul Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Untuk mencatat penghentian pemanfaatan Aset Tetap yang akan dimusnahkan, PPK-SKPD menjurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	Akumulasi Penyusutan.... <i>(sesuai jenisnya)</i>	Xxx	
		xxx	Aset Lainnya-Aset Lain-lain	xxx	
		xxx	Aset Tetap <i>(sesuai jenisnya)</i>		xxx

Pencatatan Tuntutan Ganti Kerugian hanya dilakukan oleh PPKD, oleh karena itu, PPK-SKPD membuat jurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	RK-PPKD	xxx	
		xxx	Aset Lainnya-Aset Lain-Lain		xxx

3) Penghapusan untuk Dijual.

Untuk penghentian pemanfaatan Aset Tetap yang akan dijual, PPK-SKPD menjurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	Akumulasi Penyusutan.... <i>(sesuai jenisnya)</i>	xxx	
		xxx	Aset Lainnya-Aset Lain-lain	xxx	
		xxx	Aset Tetap <i>(sesuai jenisnya)</i>		xxx

Selanjutnya untuk mencatat penjualan Aset Tetap, berdasarkan STS/ dokumen yang dipersamakan, PPK-SKPD menjurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	
		xxx	Surplus/(Defisit) dari Penjualan/ Pelepasan Aset NonLancar	xxx	
		xxx	Aset Lainnya-Aset Lain-Lain		xxx
xxx	xxx	xxx	Lain-Lain PAD Yang Sah-LRA	xxx	
		xxx	Saldo Anggaran Lebih		xxx

Apabila penjualan Aset Tetap hanya dapat dilakukan oleh PPKD, pengalihan kewenangan atas aset kepada PPKD, PPK-SKPD membuat jurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx xxx	RK-PPKD Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	xxx	xxx

4) Penghapusan karena dialihkan kepada SKPD lain

Berdasarkan bukti memorial yang mengacu pada surat penetapan status dari pengelola barang (Sekretaris Daerah) yang memindahkan penggunaan Aset Tetap dari SKPD A ke SKPD B, maka:

(a) PK-SKPD A membuat jurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx xxx xxx	Akumulasi Penyusutan.... <i>(sesuai jenisnya)</i> RK-PPKD* Aset Tetap <i>(sesuai jenisnya)</i>	xxx xxx	xxx

(b) PPK-SKPD B membuat jurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx xxx xxx	Aset Tetap <i>(sesuai jenisnya)</i> Akumulasi Penyusutan.... <i>(sesuai jenisnya)</i> RK-PPKD*	xxx xxx	xxx

*RK-PPKD sebesar nilai buku Aset Tetap yang dialihkan pada SKPD A dan SKPD akan saling mengeliminasi pada saat konsolidasi

Aset Lainnya

a. Perolehan Aset Lainnya

1) Pengeluaran Belanja berdasarkan SP2D, PPK-SKPD menjurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx xxx	Aset Lainnya.... <i>(sesuai jenisnya)</i> Kas di Bendahara Pengeluaran*	xxx	xxx
xxx	xxx	xxx xxx	Belanja Modal Aset Lainnya.... <i>(sesuai jenisnya)</i> Saldo Anggaran Lebih	xxx	xxx

*bila menggunakan SP2D-LS, kredit pada “RK-PPKD”.

2) Berdasarkan Berita Acara Hibah, Ppk-SKPD menjurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx xxx	Aset Lainnya.... (sesuai jenisnya)* Pendapatan Hibah.... (sesuai jenisnya)-LO	xxx	xxx

*sebesar nilai yang tercantum dalam berita acara hibah atau nilai wajar saat diterima

b. Amortisasi Aset Lainnya

Berdasarkan bukti memorial, Ppk-SKPD membukukan beban amortisasi melalui jurnal penyesuaian sebagai berikut:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx xxx	Beban Amortisasi.... (sesuai jenisnya) Akumulasi Amortisasi.... (sesuai jenisnya)	xxx	xxx

c. Penghapusan Aset Lainnya

Aset Lainnya pada SKPD dapat dihapuskan karena dijual, dihibahkan, dimusnahkan atau dialihkan. Pencatatan akuntansi untuk penghapusan tersebut adalah:

1) Penghapusan karena telah selesai masa manfaatnya

Untuk mencatat penghentian pemanfaatan Aset Lainnya yang akan dihapuskan, Ppk-SKPD menjurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx xxx xxx	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Aset Lainnya-Aset Lain-lain Aset Lainnya (sesuai jenisnya)	Xxx xxx	xxx

Untuk mencatat penghapusannya, berdasarkan surat keputusan penghapusan, Ppk-SKPD membuat jurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx xxx	Defisit Penjualan/Pelepasan Aset Lainnya Aset Lainnya - Aset Lain-Lain	xxx	xxx

Bila kewenangan untuk menghapuskan Aset secara permanen hanya dilakukan oleh PPKD, untuk mengalihkan Aset Lain-Lain ke PPKD, PPK-SKPD membuat jurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx xxx	RK-PPKD Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	xxx	xxx

2) Penghapusan Untuk Dijual.

Untuk mencatat penghentian pemanfaatan Aset Lainnya yang akan dijual, PPK-SKPD menjurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx xxx xxx	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Aset Lainnya-Aset Lain-lain Aset Lainnya (<i>sesuai jenisnya</i>)	xxx xxx	xxx

Bila penjualan Aset Lainnya hanya dapat dilakukan oleh PPKD, maka PPK-SKPD menjurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx xxx	RK-PPKD Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	xxx	xxx

3) Penghapusan karena dialihkan kepada SKPD lain

Berdasarkan surat penetapan status dari pengelola barang (Sekretaris Daerah) yang memindahkan penggunaan Aset Lainnya dari SKPD A ke SKPD B, maka:

(a) PPK-SKPD A membuat jurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx xxx xxx	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud RK-PPKD* Aset Lainnya (<i>sesuai jenisnya</i>)	xxx xxx	xxx

(b) PPK-SKPD B membuat jurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx xxx xxx	Aset Lainnya (<i>sesuai jenisnya</i>) Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud RK-PPKD*	xxx xxx	xxx

*RK-PPKD sebesar nilai buku Aset Lainnya yang dialihkan pada SKPD A dan SKPD B akan saling mengeliminasi pada saat konsolidasi

5. Transaksi Kewajiban

1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Berdasarkan potongan perhitungan untuk pihak ketiga yang tercantum pada SP2D, PPK-SKPD menjurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx xxx	Kas di Bendahara Pengeluaran Utang Perhitungan Pihak Ketiga	xxx	xxx

Saat potongan tersebut disetorkan kepada pihak ketiga, berdasarkan STS/dokumen yang dipersamakan, PPK-SKPD menjurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx xxx	Utang Perhitungan Pihak Ketiga Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx

2) Pendapatan Diterima Dimuka

Untuk memutakhirkan saldo Pendapatan Diterima Dimuka, PPK-SKPD membuat jurnal penyesuaian:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx xxx	Pendapatan-LO Pendapatan Diterima Di Muka	xxx	xxx

Saat Pendapatan Diterima Dimuka tersebut sudah diakui sebagai pendapatan pada periode berikutnya, berdasarkan bukti memorial, PPK-SKPD menjurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx xxx	Pendapatan Diterima Di Muka Pendapatan-LO	xxx	xxx

3) Utang Belanja

Untuk mencatat beban yang belum dibayar, berdasarkan berita acara serah terima barang/tagihan/bukti memorial, PPK-SKPD menjurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx xxx	Beban (sesuai jenisnya) Utang Belanja	xxx	xxx

Saat beban tersebut dilunasi berdasarkan SP2D, PPK-SKPD menjurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	Utang Belanja	xxx	
		xxx	Kas di Bendahara Pengeluaran*		xxx
xxx	xxx	xxx	Belanja.... (sesuai jenisnya)	xxx	
		xxx	Saldo Anggaran Lebih		xxx

*bila menggunakan SP2D-LS, kredit pada “RK-PPKD”

6. Transaksi Ekuitas

Transaksi yang mempengaruhi Ekuitas, terdiri dari:

- a. Ekuitas-LO diantaranya adalah koreksi atas Pendapatan-LO, atau Beban serta jurnal penutup untuk Surplus/Defisit-LO.
- b. RK-PPKD yaitu transaksi yang bersifat timbal balik antara SKPD dengan PPKD.

B. POSTING (PEMINDAHBUKUAN)

Secara periodik, jurnal-jurnal tersebut diposting ke buku besar (*ledger*) masing-masing, selanjutnya diikhtisarkan dalam Neraca Saldo Sesudah Penyesuaian sebagai dasar penyusunan Laporan Keuangan.

C. LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi SKPD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

D. JURNAL PENUTUP

Setelah penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional, dibuat jurnal penutup atas akun-akun yang bersifat sementara (*temporary account*), sebagai berikut:

- 1. Jurnal Penutup atas Jurnal Anggaran

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	Apropriasi Belanja	xxx	
		xxx	Estimasi Perubahan SAL		xxx
		xxx	Estimasi Pendapatan		xxx

2. Jurnal Penutup terkait Laporan Realisasi Anggaran

a. Jurnal Penutup Pendapatan-LRA dan Belanja ke SiLPA/SiKPA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx xxx xxx	Pendapatan.... (sesuai jenisnya)-LRA SiLPA/SiKPA* Belanja.... (sesuai jenisnya)	xxx xxx	xxx

*Posisi Debet/kredit SiLPA/SiKPA tergantung selisih Pendapatan-LRA dan Belanja yang akan diclose.

b. Jurnal penutup SiLPA/SiKPA dan Saldo Anggaran Lebih

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx xxx	Saldo Anggaran Lebih SiLPA/SiKPA*	xxx	xxx

*Posisi Debet atau kredit tergantung saldo SiLPA/SiKPA dan Saldo Anggaran Lebih yang akan diclose.

3. Jurnal Penutup terkait Laporan Operasional

a. Jurnal Penutup Pendapatan-LO dan Beban ke Surplus/Defisit-LO

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx xxx xxx xxx xxx	Pendapatan-LO Surplus Nonoperasional-LO Surplus/Defisit-LO* Beban Defisit Nonoperasional	xxx xxx xxx	xxx xxx

*Surplus/Defisit-LO pada sisi Debet atau kredit tergantung selisih Pendapatan-LO dan Beban.

b. Surplus/Defisit-LO selanjutnya diclose ke akun Ekuitas-LO, melalui jurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx xxx	Ekuitas-LO Surplus/Defisit-LO	xxx	xxx

Jumlah Surplus/Defisit-LO yang diclosing ke Ekuitas-LO ini akan menambah atau mengurangi Ekuitas awal. Dengan demikian saldo Ekuitas akhir yang kemudian disajikan di Neraca SKPD sebagai *permanent account* pada tanggal pelaporan terdiri dari:

- 1) Ekuitas-LO; dan
- 2) saldo RK-PPKD.

BAB III
SISTEM AKUNTANSI PPKD

A. PENJURNALAN TRANSAKSI PADA PPKD

1. Transaksi Anggaran

Berdasarkan DPA-PPKD, PPK-PPKD membuat jurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	Estimasi Pendapatan	xxx	
		xxx	Estimasi Penerimaan Pembiayaan	xxx	
		xxx	Estimasi Perubahan SAL	xxx	
		xxx	Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan		xxx
		xxx	Apropriasi Belanja		xxx

*Debet atau kredit tergantung pada selisih sisi Debet dengan sisi kredit.

2. Transaksi Pendapatan

- a. Pendapatan yang dipungut oleh PPKD berupa Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Untuk mencatat pengakuan Pendapatan, berdasarkan surat ketetapan pemerintah/surat tagihan lainnya/dokumen yang dipersamakan, PPK-PPKD menjurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	Piutang Pendapatan.... <i>(sesuai jenisnya)</i>	xxx	
		xxx	Pendapatan <i>(sesuai jenisnya)</i> -LO		xxx

- b. Penerimaan kas Pendapatan pada PPKD yang langsung disetor ke RKUD, berdasarkan nota kredit bank/STS kuitansi/bukti pembayaran, PPK-PPKD menjurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	Kas di RKUD	xxx	
		xxx	Pendapatan <i>(sesuai jenisnya)</i> -LO		xxx
xxx	xxx	xxx	Saldo Anggaran Lebih	xxx	
		xxx	Pendapatan.... <i>(sesuai jenisnya)</i> -LRA		xxx

*kredit pada Piutang Pendapatan (sesuai jenisnya) bila sebelumnya telah dicatat sebagai Piutang.

- c. Koreksi Pendapatan

Koreksi kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya terdiri dari:

1) Koreksi yang bersifat berulang dan sistemik pada periode yang sama atau berbeda dengan saat pengakuannya, dibukukan sebagai berikut:

a) berdasarkan SP2D, PPK-PPKD menjurnal koreksi Pendapatan yang menyebabkan pengeluaran kas:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx xxx	Pendapatan.... (sesuai jenisnya)–LO Kas di RKUD	xxx	xxx
xxx	xxx	xxx xxx	Pendapatan.... (sesuai jenisnya)–LRA Saldo Anggaran Lebih	xxx	xxx

b) berdasarkan STS/dokumen yang dipersamakan, dibuat jurnal koreksi Pendapatan yang menyebabkan penerimaan kas:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx xxx	Kas di RKUD Pendapatan.... (sesuai jenisnya)–LO	xxx	xxx
xxx	xxx	xxx xxx	Saldo Anggaran Lebih Pendapatan.... (sesuai jenisnya)–LRA	xxx	xxx

2) Koreksi atas kesalahan yang *tidak berulang* adalah sebagai berikut:

a) Bila koreksi bersifat menambah Pendapatan terjadi pada periode yang sama dengan saat pengakuannya, atau menambah Pendapatan tahun sebelumnya sedangkan laporan keuangan belum diterbitkan, maka berdasarkan bukti memorial/nota kredit bank/STS/dokumen yang dipersamakan:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx xxx	Kas di RKUD Pendapatan.... (sesuai jenisnya)–LO	xxx	xxx
xxx	xxx	xxx xxx	Saldo Anggaran Lebih Pendapatan.... (sesuai jenisnya)–LRA	xxx	xxx

b) Bila koreksi Pendapatan tahun-tahun sebelumnya bersifat menambah kas, dan laporan keuangan sudah diterbitkan, maka berdasarkan bukti memorial/ STS/ dokumen yang dipersamakan, PPK-PPKD menjurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx xxx	Kas di RKUD Ekuitas-LO*	xxx	xxx
xxx	xxx	xxx xxx	Saldo Anggaran Lebih Pendapatan.... (sesuai jenisnya)-LRA	xxx	xxx

*bila telah diakui sebagai Piutang, maka kredit pada Piutang

- c) Bila koreksi bersifat mengurangi pendapatan terjadi pada periode yang sama dengan saat pengakuannya, atau mengurangi pendapatan tahun sebelumnya sedangkan laporan keuangan belum diterbitkan, maka berdasarkan bukti memorial/SP2D/dokumen yang dipersamakan, di jurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx xxx	Pendapatan.... (sesuai jenisnya)-LO Kas di RKUD	xxx	xxx
xxx	xxx	xxx xxx	Pendapatan.... (sesuai jenisnya)-LRA Saldo Anggaran Lebih	xxx	xxx

- d) Bila koreksi Pendapatan tahun-tahun sebelumnya bersifat mengurangi kas dan laporan keuangan telah diterbitkan, maka berdasarkan bukti memorial/ SP2D/ dokumen yang dipersamakan, PPK-PPKD menjurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx xxx	Ekuitas-LO* Kas di RKUD	xxx	xxx
xxx	xxx	xxx xxx	Belanja Tak Terduga Saldo Anggaran Lebih	xxx	xxx

*bila telah diakui sebagai utang, maka Debet pada Utang

3. Transaksi Beban/Belanja

- a. Untuk mencatat pengakuan Beban, berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang/surat tagihan/dokumen yang dipersamakan, PPK-PPKD membuat jurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx xxx	Beban.... (sesuai jenisnya) Utang Belanja.... (sesuai jenisnya)	xxx	xxx

- b. Untuk mencatat pengeluaran kas atas Beban yang sudah diakui, berdasarkan SP2D-LS (Belanja pada PPKD dilakukan dengan mekanisme transfer/pembayaran langsung kepada pihak ketiga), PPK-PPKD membuat jurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx xxx	Utang Belanja.... (<i>sesuai jenisnya</i>) Kas di RKUD	xxx	xxx
xxx	xxx	xxx xxx	Belanja.... (<i>sesuai jenisnya</i>) Saldo Anggaran Lebih	xxx	xxx

- c. Koreksi Beban/Belanja

Koreksi kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya terdiri dari:

- 1) Koreksi atas kesalahan yang bersifat *berulang dan sistemik* pada periode yang sama atau berbeda dengan saat pengakuannya, dilakukan hanya pada saat kas dikeluarkan/diterima.
- a) berdasarkan SP2D-LS, PPK-PPKD membuat jurnal koreksi yang menyebabkan pengeluaran kas:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx xxx	Beban.... (<i>sesuai jenisnya</i>) Kas di RKUD	xxx	xxx
xxx	xxx	xxx xxx	Belanja.... (<i>sesuai jenisnya</i>) Saldo Anggaran Lebih	xxx	xxx

- b) berdasarkan STS/dokumen yang dipersamakan, PPK-SKPD menjurnal koreksi beban/belanja yang menyebabkan penerimaan kas:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx xxx	Kas di RKUD Beban.... (<i>sesuai jenisnya</i>)	xxx	xxx
xxx	xxx	xxx xxx	Saldo Anggaran Lebih Belanja.... (<i>sesuai jenisnya</i>)	xxx	xxx

- 2) Koreksi atas kesalahan yang *tidak berulang* terdiri dari:
- a) Koreksi bersifat menambah Beban/Belanja pada periode yang sama dengan saat pengakuan, atau menambah Beban/Belanja tahun sebelumnya dan laporan keuangan belum diterbitkan,

maka berdasarkan bukti memorial/nota Debet bank/SP2D/ dokumen yang dipersamakan, PPK-PPKD menjurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx xxx	Beban.... (sesuai jenisnya)-LO Kas di RKUD	xxx	xxx
xxx	xxx	xxx xxx	Belanja.... (sesuai jenisnya) Saldo Anggaran Lebih	xxx	xxx

- b) Bila koreksi bersifat menambah beban/belanja tahun-tahun sebelumnya sedangkan laporan keuangan sudah diterbitkan, maka berdasarkan Nota Debet bank/SP2D/dokumen yang dipersamakan, Ppk-PPKD menjurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx xxx	Ekuitas-LO* Kas di RKUD	xxx	xxx
xxx	xxx	xxx xxx	Belanja.... (sesuai jenisnya) Saldo Anggaran Lebih	xxx	xxx

*Apabila telah diakui sebagai utang, maka Debet pada Utang Belanja

- c) Bila koreksi bersifat mengurangi Beban/Belanja tahun-tahun sebelumnya sedangkan laporan keuangan sudah diterbitkan, maka berdasarkan nota kredit bank/ STS/dokumen yang dipersamakan, PPK-PPKD menjurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx xxx	Kas di RKUD Lain-Lain PAD Yang Sah-LO	xxx	xxx
xxx	xxx	xxx xxx	Saldo Anggaran Lebih Lain-Lain PAD Yang Sah-LRA	xxx	xxx

4. Transaksi Pembiayaan

Pembiayaan diklasifikasikan kedalam penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

- a. Berdasarkan nota debet bank/SP2D-LS, PPK-PPKD menjurnal pengeluaran pembiayaan sebagai berikut:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx xxx	Investasi.... <i>(sesuai jenisnya)</i> Kas di RKUD	xxx	xxx
xxx	xxx	xxx xxx	Pengeluaran Pembiayaan.... <i>(sesuai jenisnya)</i> Saldo Anggaran Lebih	xxx	xxx

b. Berdasarkan nota kredit bank/dokumen yang dipersamakan, PPK-PPKD menjurnal penerimaan pembiayaan:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx xxx xxx	Kas di RKUD Surplus/(Defisit) Nonoperasional-LO Investasi.... <i>(sesuai jenisnya)</i>	xxx	xxx xxx
xxx	xxx	xxx xxx	Saldo Anggaran Lebih Penerimaan Pembiayaan.... <i>(sesuai jenisnya)</i>	xxx	xxx

c. Koreksi Pembiayaan

1) Koreksi atas penerimaan atau pengeluaran pembiayaan pada tahun pengakuannya:

a) berdasarkan nota kredit bank/STS, PPK-PPKD membuat jurnal koreksi atas pengeluaran pembiayaan yang menyebabkan penerimaan kas:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx xxx	Kas di RKUD Investasi dalam Obligasi*	xxx	xxx
xxx	xxx	xxx xxx	Saldo Anggaran Lebih Pengeluaran Pembiayaan.... <i>(sesuai jenisnya)</i>	xxx	xxx

*sesuai dengan jenis pengeluaran pembiayaannya

b) berdasarkan Nota Debet bank/SP2D, PPK-PPKD membuat jurnal atas penerimaan pembiayaan yang menyebabkan pengeluaran kas:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx xxx	Utang Dalam Negeri-Obligasi* Kas di RKUD	xxx	xxx
xxx	xxx	xxx xxx	Penerimaan Pembiayaan.... <i>(sesuai jenisnya)</i> Saldo Anggaran Lebih	xxx	xxx

*sesuai dengan jenis penerimaan pembiayaannya

2) Koreksi atas penerimaan atau pengeluaran pembiayaan tahun-tahun sebelumnya yang tidak berulang, baik menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan:

- a) berdasarkan nota kredit bank/STS, PPK-PPKD membuat jurnal koreksi atas pengeluaran pembiayaan yang menyebabkan penerimaan kas:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	Kas di RKUD	xxx	
		xxx	Investasi dalam Obligasi		xxx
xxx	xxx	xxx	Saldo Anggaran Lebih	xxx	
		xxx	Pengeluaran Pembiayaan.... (sesuai jenisnya)		xxx

- b) berdasarkan nota Debet bank/SP2D, Ppk-PPKD membuat jurnal koreksi atas penerimaan pembiayaan yang menyebabkan pengeluaran kas:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	Utang Dalam Negeri-Obligasi	xxx	
		xxx	Kas di RKUD		xxx
xxx	xxx	xxx	Penerimaan Pembiayaan.... (sesuai jenisnya)	xxx	
		xxx	Saldo Anggaran Lebih		xxx

5. Transaksi Aset

Aset Lancar

- 1) Kas di Bendahara Umum Daerah

- a) Saat mengeluarkan UP/TU untuk SKPD, PPK-PPKD menjurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	RK-SKPD	xxx	
		xxx	Kas di RKUD		xxx

- b) Saat menerbitkan SP2D-GU, PPK-SKPD menjurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	RK-SKPD	xxx	
		xxx	Kas di RKUD		xxx

- c) Saat menerima pengembalian sisa UP/TU, berdasarkan STS, PPK-PPKD menjurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx xxx	Kas di RKUD RK-SKPD	xxx	xxx

- d) Saat perolehan Setara Kas (*misalnya deposito jangka pendek*), berdasarkan bukti transaksi, PPK-PPKD menjurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx xxx	Setara Kas Kas di RKUD	xxx	xxx

- e) Saat menerima penyeteroran kas pada RKUD atas transaksi yang terjadi pada SKPD, maka PPK-PPKD menjurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx xxx	Kas di RKUD RK-SKPD	xxx	xxx

- f) Untuk transaksi SKPD dengan mekanisme LS, berdasarkan SP2D-LS/nota Debet bank/dokumen yang dipersamakan, PPK-PPKD menjurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx xxx	RK-SKPD Kas di RKUD	xxx	xxx

2) Piutang

- a) Pencatatan saat timbulnya Piutang
- (1) Piutang yang timbul akibat Pendapatan yang belum diterima kasnya, oleh PPK-PPKD dijurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx xxx	Piutang Pendapatan.... (<i>sesuai jenisnya</i>) Pendapatan... (<i>sesuai jenisnya</i>)-LO	xxx	xxx

- (2) Tagihan selain yang berasal dari Piutang Pendapatan (*misalnya uang muka*), dibukukan oleh PPK-PPKD berdasarkan surat tagihan/dokumen yang dipersamakan dengan jurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	Piutang Lainnya.... <i>(sesuai jenisnya)</i>	xxx	
		xxx	Kas Di RKUD		xxx

(3) Pengakuan Piutang berupa Beban Dibayar DiMuka dilakukan melalui jurnal penyesuaian. PPK-PPKD memutakhirkan saldo akun Beban Dibayar DiMuka dengan menjurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	Beban Dibayar Di Muka	xxx	
		xxx	Beban.... <i>(sesuai jenisnya)</i>		xxx

b) Pencatatan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Berdasarkan hasil analisis umur piutang, melalui jurnal penyesuaian, PPK-PPKD membukukan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebagai berikut:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih.... <i>(sesuai jenisnya)</i>	xxx	
		xxx	Penyisihan Piutang Tak Tertagih.... <i>(sesuai jenisnya)</i>		xxx

c) Pencatatan pelunasan Piutang

Berdasarkan STS, PPK-PPKD menjurnal pelunasan piutang sebagai berikut:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	Kas di RKUD	xxx	
		xxx	Piutang.... <i>(sesuai jenisnya)</i>		xxx

d) Pencatatan penghapusan Piutang

Piutang yang kadaluarsa atau tidak dapat ditagih kembali harus dihapuskan. Berdasarkan Keputusan Kepala Daerah/Pejabat berwenang tentang penghapusan piutang, PPK-PPKD menjurnal penghapusan piutang sebagai berikut:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	Penyisihan Piutang Tak Tertagih.... <i>(sesuai jenisnya)</i>	xxx	
		xxx	Piutang <i>(sesuai jenisnya)</i>		xxx

3) Investasi Jangka Panjang

a) Pembentukan Investasi

(1) Metode Biaya

Berdasarkan SP2D, PPK-PPKD menjurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	Investasi Jangka Panjang.... (<i>sesuai jenisnya</i>)	xxx	
		xxx	Kas di RKUD		xxx

(2) Metode Ekuitas

Berdasarkan SP2D, PPK-PPKD menjurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	Investasi Jangka Panjang.... (<i>sesuai jenisnya</i>)	xxx	
		xxx	Kas di RKUD		xxx

b) Pengumuman laba/rugi dari *investee*:

(1) Metode Biaya

Tidak perlu dilakukan pencatatan

(2) Metode Ekuitas

Saat *Investee* mengumumkan laba, PPK-PPKD menjurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	Investasi Jangka Panjang.... (<i>sesuai jenisnya</i>)	xxx	
		xxx	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO		xxx

Saat *Investee* mengumumkan rugi, PPK-PPKD menjurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO	xxx	
		xxx	Investasi Jangka Panjang.... (<i>sesuai jenisnya</i>)		xxx

c) Pengumuman dan pembayaran dividen

(1) Metode Biaya

Saat pengumuman dividen, PPK-PPKD menjurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	
		xxx	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO		xxx

Saat menerima pembayaran dividen, PPK-PPKD menjurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	Kas di RKUD	xxx	
		xxx	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		xxx
xxx	xxx	xxx	Saldo Anggaran Lebih	xxx	
		xxx	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LRA		xxx

(2) Metode Ekuitas

Saat pengumuman dividen, PPK-PPKD menjurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Beban.... <i>(sesuai jenisnya)</i>	xxx	
		xxx	Investasi Jangka Panjang.... <i>(sesuai jenisnya)</i>		xxx

Saat menerima pembayaran dividen, PPK-PPKD menjurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	Kas di RKUD	xxx	
		xxx	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah		xxx
xxx	xxx	xxx	Saldo Anggaran Lebih	xxx	
		xxx	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LRA		xxx

d) Pelepasan Investasi

(1) Metode Biaya

Berdasarkan STS, PPK-PPKD menjurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx xxx xxx	Kas di RKUD Investasi Jangka Panjang.... <i>(sesuai jenisnya)</i> Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang-LO*	xxx	xxx xxx
xxx	xxx	xxx xxx	Saldo Anggaran Lebih Penerimaan Pembiayaan - Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	xxx	xxx

*Debet pada *Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang-LO* bila kas yang diterima lebih kecil dari nominal investasi

(2) Metode Ekuitas

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx xxx xxx	Kas di RKUD Investasi Jangka Panjang.... <i>(sesuai jenisnya)</i> Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang-LO*	xxx	xxx xxx
xxx	xxx	xxx xxx	Saldo Anggaran Lebih Penerimaan Pembiayaan - Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	xxx	xxx

*Debet pada *Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang-LO* bila kas yang diterima lebih kecil dari nominal investasi

Aset Tetap

Perolehan Aset Tetap

Perolehan Aset Tetap pada PPKD terlaksana melalui Hibah, yang berdasarkan berita acara hibah, PPK-PPKD menjurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx xxx	Aset Tetap.... <i>(sesuai jenisnya)</i> Pendapatan Hibah.... <i>(sesuai jenisnya)</i> -LO	xxx	xxx

Saat penetapan status Aset Tetap tersebut pada SKPD tertentu, maka PPK-PPKD membuat jurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx xxx	RK-SKPD Aset Tetap.... (sesuai jenisnya)	xxx	xxx

Aset Lainnya

Aset Lainnya yang dikelola oleh PPKD berupa Tagihan Jangka Panjang, Kemitraan Dengan Pihak Ketiga, dan Aset Lainnya. Aset Lainnya biasanya berupa Aset Lain-Lain, terkait dengan kewenangan PPKD untuk melaksanakan penghapusan atau penjualan Aset Tetap serta pembebanan Tuntutan Ganti Kerugian. PPKD melaksanakan fungsi tersebut dengan menerima pengalihan pencatatan Aset Tetap yang akan dijual atau hilang dari SKPD dengan menjurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx xxx	Aset Lainnya - Aset Lain-Lain RK-SKPD	xxx	xxx

- a) Saat aset terjual, berdasarkan STS, PPK-PPKD menjurnal penjualan aset sebagai berikut:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx xxx xxx	Kas di RKUD Surplus Penjualan Aset Nonlancar-LO* Aset Lainnya - Aset Lain-Lain	xxx	xxx xxx
xxx	xxx	xxx xxx	Saldo Anggaran Lebih Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan-LRA (sesuai jenisnya)	xxx	xxx

*Debet pada *Defisit Penjualan Aset Nonlancar-LO* bila kas yang diterima lebih kecil dari nilai aset yang dijual

- b) Sedangkan bila pengalihan karena aset yang hilang dan dikenakan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, dengan mengacu pada surat keputusan TGR, PPK-PPKD menjurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx xxx xxx	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Defisit Nonoperasional-LO* Aset Lainnya - Aset Lain-Lain	xxx xxx	xxx

*bila nilai TGR lebih kecil dari nilai Aset Lainnya-Aset Lain-Lain

6. Transaksi Kewajiban

1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Berdasarkan potongan perhitungan untuk pihak ketiga pada SP2D/dokumen yang dipersamakan, Ppk-PPKD menjurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx xxx	Kas di RKUD Utang Perhitungan Pihak Ketiga	xxx	xxx

Saat potongan tersebut disetorkan kepada pihak ketiga, berdasarkan STS/dokumen yang dipersamakan, Ppk-PPKD menjurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx xxx	Utang Perhitungan Pihak Ketiga Kas di RKUD	xxx	xxx

2) Pendapatan Diterima Dimuka

Melalui jurnal penyesuaian, Ppk-PPKD akan membuat jurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx xxx	Pendapatan-LO Pendapatan Diterima Di Muka	xxx	xxx

Saat Pendapatan Diterima Dimuka tersebut sudah boleh diakui sebagai pendapatan (*earned* dan *realized*) pada periode berikutnya, PPK-PPKD menjurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx xxx	Pendapatan Diterima Di Muka Pendapatan-LO	xxx	xxx

3) Utang Belanja

Atas Beban yang belum dibayar PPK-PPKD membuat jurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx xxx	Beban.... (sesuai jenisnya) Utang Belanja	xxx	xxx

Saat beban tersebut dilunasi, berdasarkan SP2D, dibuat jurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx xxx	Utang Belanja.... (sesuai jenisnya) Kas di RKUD	xxx	xxx
xxx	xxx	xxx xxx	Belanja.... (sesuai jenisnya)-LRA Saldo Anggaran Lebih	xxx	xxx

4) *Utang Jangka Pendek Lainnya*

Berdasarkan bukti memorial, Ppk-PPKD menjurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx xxx	Kas di RKUD* Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx	xxx

*tergantung komponen Aset/Kewajiban yang menimbulkan utang jangka pendek lainnya

5) *Berbentuk obligasi:*

a) Saat diterbitkan:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx xxx	Kas di RKUD Obligasi*	xxx	xxx

*Bila diterbitkan dengan nilai nominal/pari (*par value*)

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx xxx xxx	Kas di RKUD Obligasi Premium Obligasi**	xxx	xxx xxx

**Bila diterbitkan dengan nilai lebih besar dari nilai nominal

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx xxx xxx	Kas di RKUD Diskonto Obligasi*** Obligasi	xxx xxx	xxx

***Bila diterbitkan dengan nilai lebih rendah dari nilai nominal/pari (*par value*).

b) Pada akhir tahun, melalui jurnal penyesuaian, perlu dilakukan pencatatan amortisasi atas premi atau diskonto untuk memperoleh nilai tercatat (*carrying amount*) kewajiban pada tanggal pelaporan sekaligus pencatatan bunga yang seharusnya terutang:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx xxx	Premium Obligasi* Beban Bunga	xxx xxx	
		xxx	Utang Bunga		xxx

*bila amortisasi diskonto maka kredit pada Diskonto Obligasi.

c) Saat pembayaran bunga, berdasarkan SP2D, PPK-PPKD menjurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx xxx	Utang Bunga Kas di RKUD	xxx	xxx
xxx	xxx	xxx xxx	Saldo Anggaran Lebih Belanja Bunga	xxx	xxx

6) *Kewajiban Jangka Panjang (selain obligasi)*

a) Untuk mencatat saat terjadinya kewajiban jangka panjang, PPK-PPKD menjurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx xxx	Kas di RKUD Kewajiban Jangka Panjang.... (sesuai jenisnya)	xxx	xxx

b) Untuk mencatat pembayaran kewajiban saat jatuh tempo, berdasarkan SP2D, PPK-PPKD menjurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx xxx	Kewajiban Jangka Panjang.... (sesuai jenisnya) Kas di RKUD	xxx	xxx

7. **Ekuitas**

Transaksi yang mempengaruhi Ekuitas yaitu Ekuitas-LO

- a) Koreksi kesalahan yang langsung mempengaruhi Ekuitas-LO;
- b) Jurnal penutup akun Surplus/Defisit-LO.

B. **POSTING (PEMINDAHBUKUAN)**

Secara periodik, jurnal-jurnal tersebut *diposting* ke buku besar (*ledger*) masing-masing, selanjutnya diikhtisarkan dalam Neraca Saldo Sesudah Penyesuaian sebagai dasar penyusunan Laporan Keuangan.

C. LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi PPKD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

D. JURNAL PENUTUP

Setelah penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional, dibuat jurnal penutup, sebagai berikut:

1. Jurnal Penutup atas Jurnal Anggaran

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx xxx xxx xxx xxx	Apropriasi Belanja Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan Estimasi Perubahan SAL Estimasi Pendapatan Estimasi Penerimaan Pembiayaan	xxx xxx	 xxx xxx xxx

2. Jurnal Penutup terkait Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL.

a. Jurnal Penutup Pendapatan-LRA dan Belanja ke SiLPA/SiKPA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx xxx xxx	Pendapatan.... (sesuai jenisnya)-LRA SiLPA/SiKPA* Belanja.... (sesuai jenisnya)	xxx xxx	 xxx

*Posisi Debet/kredit SiLPA/SiKPA tergantung selisih PendapatanLRA dan Belanja yang akan diclose.

b. Jurnal Penutup atas Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan ke SiLPA/SiKPA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx xxx xxx	Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan SiLPA/SiKPA*	xxx	 xxx xxx

*Posisi Debet atau kredit SiLPA/SiKPA tergantung selisih Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan yang akan diclose.

c. Jurnal penutup SiLPA/SiKPA dan Saldo Anggaran Lebih

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx xxx	Saldo Anggaran Lebih SiLPA/SiKPA*	xxx	 xxx

*Posisi Debet atau kredit tergantung saldo SiLPA/SiKPA dan Saldo Anggaran Lebih yang akan diclose.

3. Jurnal Penutup terkait Laporan Operasional

a. Jurnal Penutup Pendapatan-LO dan Beban ke Surplus/Defisit-LO

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx xxx Xxx	Pendapatan-LO Surplus Nonoperasional-LO Surplus/Defisit-LO*	xxx xxx xxx	
		xxx xxx	Beban Defisit Nonoperasional-LO		xxx xxx

*Surplus/Defisit-LO pada sisi Debet atau kredit tergantung selisih Pendapatan-LO dan Beban.

b. Surplus/Defisit-LO selanjutnya diclose ke akun Ekuitas-LO, melalui jurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	Ekuitas-LO	xxx	
		xxx	Surplus/Defisit-LO		xxx

*Ekuitas-LO pada sisi Debet atau kredit tergantung saldo Surplus/Defisit-LO yang diclose

Jumlah Surplus/Defisit-LO yang diclosing ke Ekuitas-LO ini akan menambah atau mengurangi Ekuitas awal. Dengan demikian saldo Ekuitas akhir yang kemudian disajikan di Neraca PPKD sebagai *permanent account* pada tanggal pelaporan berupa Ekuitas-LO yang ditambah/dikurangi dengan Surplus/Defisit-LO dan koreksi yang langsung mempengaruhi Ekuitas-LO serta dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar.

BAB IV

SISTEM AKUNTANSI SKPKD

A. PENJURNALAN TRANSAKSI PADA SKPKD

Jurnal pada SKPKD digunakan untuk mengkonsolidasikan laporan keuangan SKPD dengan PPKD untuk dijadikan sebagai laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian Pemerintah Daerah merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi termasuk Badan Layanan Umum Daerah, sehingga tersaji sebagai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai satu entitas tunggal. Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.

B. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Komponen LRA SKPD yang terdiri dari Pendapatan-LRA, Belanja, Surplus/Defisit-LRA, SiLPA/SiKPA dikonsolidasikan dengan LRA PPKD yang terdiri dari Pendapatan-LRA, Belanja, Surplus/Defisit-LRA, Pembiayaan Neto, SiLPA/SiKPA menjadi LRA Pemerintah Daerah.

C. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL)

Laporan Perubahan SAL hanya disusun melalui sistem akuntansi SKPKD dengan mengkonsolidasikan akun Saldo Anggaran Lebih (SiLPA/SiKPA) dari seluruh entitas akuntansi.

D. LAPORAN OPERASIONAL

Komponen Laporan Operasional SKPD yang terdiri dari Pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit-LO, dikonsolidasikan dengan Laporan Operasional PPKD yang terdiri dari Pendapatan-LO, Beban, Surplus/ Defisit-LO, menjadi Laporan Operasional Pemerintah Daerah.

E. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Komponen Laporan Perubahan Ekuitas SKPD, yang terdiri dari Ekuitas (awal), Surplus/Defisit-LO, koreksi pada Ekuitas, RK-PPKD, dan Ekuitas

(akhir), dikonsolidasikan dengan Laporan Perubahan Ekuitas PPKD yang terdiri dari Ekuitas (awal), Surplus/Defisit-LO, koreksi pada Ekuitas, dan Ekuitas (akhir), menjadi Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Daerah.

F. NERACA

Neraca SKPD dan Neraca PPKD dikonsolidasikan dengan menjumlahkan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas masing-masing serta dengan mengeliminasi akun timbal balik (*reciprocal account*) seperti RK-SKPD dengan RK-PPKD.

G. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas dihasilkan dari sistem akuntansi PPKD terkait dengan transaksi menyangkut Kas di BUD. Laporan Arus Kas ini menjadi salah satu komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

H. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan memuat deskripsi dan penjelasan atas unsur-unsur yang tersaji pada lembar muka Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Lampiran II : Peraturan Bupati Banggai
 Nomor : 112 Tahun 2022
 Tanggal : 30 Desember 2022

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1						ASET
1	1					ASET LANCAR
1	1	01				Kas dan Setara Kas
1	1	01	01			Kas di Kas Daerah
1	1	01	01	01		Kas di Kas Daerah
1	1	01	01	01	0001	Kas di Kas Daerah
1	1	01	02			Kas di Bendahara Penerimaan
1	1	01	02	01		Kas di Bendahara Penerimaan
1	1	01	02	01	0001	Kas di Bendahara Penerimaan
1	1	01	03			Kas di Bendahara Pengeluaran
1	1	01	03	01		Kas di Bendahara Pengeluaran
1	1	01	03	01	0001	Kas di Bendahara Pengeluaran
1	1	01	04			Kas di BLUD
1	1	01	04	01		Kas di BLUD
1	1	01	04	01	0001	Kas di BLUD
1	1	01	05			Kas Dana BOS
1	1	01	05	01		Kas Dana BOS
1	1	01	05	01	0001	Kas Dana BOS
1	1	01	06			Kas Dana Kapitasi pada FKTP
1	1	01	06	01		Kas Dana Kapitasi pada FKTP
1	1	01	06	01	0001	Kas Dana Kapitasi pada FKTP
1	1	01	07			Kas Lainnya
1	1	01	07	01		Kas Lainnya
1	1	01	07	01	0001	Kas Lainnya
1	1	01	08			Setara Kas
1	1	01	08	01		Setara Kas
1	1	01	08	01	0001	Setara Kas
1	1	01	09			Kas Dana Desa
1	1	01	09	01		Kas Dana Desa
1	1	01	09	01	0001	Kas Dana Desa
1	1	02				Investasi Jangka Pendek
1	1	02	01			Investasi dalam Saham
1	1	02	01	01		Investasi dalam Saham
1	1	02	01	01	0001	Investasi dalam Saham
1	1	02	02			Investasi dalam Deposito
1	1	02	02	01		Deposito Jangka Pendek
1	1	02	02	01	0001	Deposito Jangka Pendek
1	1	02	06			Investasi Jangka Pendek BLUD
1	1	02	06	01		Investasi Jangka Pendek BLUD
1	1	02	06	01	0001	Investasi Jangka Pendek BLUD
1	1	03				Piutang Pajak Daerah
1	1	03	01			Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1	1	03	01	01		Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan
1	1	03	01	01	0001	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi
1	1	03	01	01	0002	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum
1	1	03	01	01	0003	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Pusat
1	1	03	01	01	0004	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah
1	1	03	01	02		Piutang PKB-Mobil Penumpang-Jeep
1	1	03	01	02	0001	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi
1	1	03	01	02	0002	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Umum
1	1	03	01	02	0003	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Pusat
1	1	03	01	02	0004	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Daerah
1	1	03	01	03		Piutang PKB-Mobil Penumpang-Minibus
1	1	03	01	03	0001	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	03	01	03	0002	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum
1	1	03	01	03	0003	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Pusat
1	1	03	01	03	0004	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah
1	1	03	01	04		Piutang PKB-Mobil Bus-Microbus
1	1	03	01	04	0001	Piutang PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi
1	1	03	01	04	0002	Piutang PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum
1	1	03	01	04	0003	Piutang PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Pusat
1	1	03	01	04	0004	Piutang PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Daerah
1	1	03	01	05		Piutang PKB-Mobil Bus-Bus
1	1	03	01	05	0001	Piutang PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi
1	1	03	01	05	0002	Piutang PKB-Mobil Bus-Bus-Umum
1	1	03	01	05	0003	Piutang PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Pusat
1	1	03	01	05	0004	Piutang PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah
1	1	03	01	06		Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up
1	1	03	01	06	0001	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi
1	1	03	01	06	0002	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum
1	1	03	01	06	0003	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Pusat
1	1	03	01	06	0004	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Daerah
1	1	03	01	07		Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck
1	1	03	01	07	0001	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pribadi
1	1	03	01	07	0002	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Umum
1	1	03	01	07	0003	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Pusat
1	1	03	01	07	0004	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Daerah
1	1	03	01	08		Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Truck
1	1	03	01	08	0001	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi
1	1	03	01	08	0002	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum
1	1	03	01	08	0003	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Pusat
1	1	03	01	08	0004	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Daerah
1	1	03	01	09		Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van
1	1	03	01	09	0001	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pribadi
1	1	03	01	09	0002	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Umum
1	1	03	01	09	0003	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pemerintah Pusat
1	1	03	01	09	0004	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pemerintah Daerah
1	1	03	01	10		Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
1	1	03	01	10	0001	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi
1	1	03	01	10	0002	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Umum
1	1	03	01	10	0003	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Pusat
1	1	03	01	10	0004	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah
1	1	03	01	11		Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
1	1	03	01	11	0001	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi
1	1	03	01	11	0002	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Umum
1	1	03	01	11	0003	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Pusat
1	1	03	01	11	0004	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Daerah
1	1	03	01	12		Piutang PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
1	1	03	01	12	0001	Piutang PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pribadi
1	1	03	01	12	0002	Piutang PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Umum
1	1	03	01	12	0003	Piutang PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pemerintah Pusat
1	1	03	01	12	0004	Piutang PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pemerintah Daerah
1	1	03	01	13		Piutang PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar
1	1	03	01	13	0001	Piutang PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pribadi
1	1	03	01	13	0002	Piutang PKB--Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Umum
1	1	03	01	13	0003	Piutang PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pemerintah Pusat
1	1	03	01	13	0004	Piutang PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pemerintah Daerah
1	1	03	01	14		Piutang PKB-Mobil Roda Tiga
1	1	03	01	14	0001	Piutang PKB-Mobil Roda Tiga-Pribadi
1	1	03	01	14	0002	Piutang PKB-Mobil Roda Tiga-Umum

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	03	01	14	0003	Piutang PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Pusat
1	1	03	01	14	0004	Piutang PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Daerah
1	1	03	02			Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
1	1	03	02	01		Piutang BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan
1	1	03	02	01	0001	Piutang BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan
1	1	03	02	02		Piutang BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep
1	1	03	02	02	0001	Piutang BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep
1	1	03	02	03		Piutang BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus
1	1	03	02	03	0001	Piutang BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus
1	1	03	02	04		Piutang BBNKB-Mobil Bus-Microbus
1	1	03	02	04	0001	Piutang BBNKB-Mobil Bus-Microbus
1	1	03	02	05		Piutang BBNKB-Mobil Bus-Bus
1	1	03	02	05	0001	Piutang BBNKB-Mobil Bus-Bus
1	1	03	02	06		Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up
1	1	03	02	06	0001	Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up
1	1	03	02	07		Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck
1	1	03	02	07	0001	Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck
1	1	03	02	08		Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck
1	1	03	02	08	0001	Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck
1	1	03	02	09		Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van
1	1	03	02	09	0001	Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van
1	1	03	02	10		Piutang BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
1	1	03	02	10	0001	Piutang BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
1	1	03	02	11		Piutang BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
1	1	03	02	11	0001	Piutang BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
1	1	03	02	12		Piutang BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
1	1	03	02	12	0001	Piutang BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
1	1	03	02	13		Piutang BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat
1	1	03	02	13	0001	Piutang BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat
1	1	03	02	14		Piutang BBNKB-Mobil Roda Tiga
1	1	03	02	14	0001	Piutang BBNKB-Mobil Roda Tiga
1	1	03	03			Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
1	1	03	03	01		Piutang PBBKB Bahan Bakar Bensin
1	1	03	03	01	0001	Piutang PBBKB Bahan Bakar Bensin
1	1	03	03	02		Piutang PBBKB Bahan Bakar Solar
1	1	03	03	02	0001	Piutang PBBKB Bahan Bakar Solar
1	1	03	03	03		Piutang PBBKB Bahan Bakar Gas
1	1	03	03	03	0001	Piutang PBBKB Bahan Bakar Gas
1	1	03	03	04		Piutang PBBKB Bahan Bakar Lainnya
1	1	03	03	04	0001	Piutang PBBKB Bahan Bakar Lainnya
1	1	03	04			Piutang Pajak Air Permukaan
1	1	03	04	01		Piutang Pajak Air Permukaan
1	1	03	04	01	0001	Piutang Pajak Air Permukaan
1	1	03	05			Piutang Pajak Rokok
1	1	03	05	01		Piutang Pajak Rokok
1	1	03	05	01	0001	Piutang Pajak Rokok
1	1	03	06			Piutang Pajak Hotel
1	1	03	06	01		Piutang Pajak Hotel
1	1	03	06	01	0001	Piutang Pajak Hotel
1	1	03	06	02		Piutang Pajak Motel
1	1	03	06	02	0001	Piutang Pajak Motel
1	1	03	06	03		Piutang Pajak Losmen
1	1	03	06	03	0001	Piutang Pajak Losmen
1	1	03	06	07		Piutang Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya
1	1	03	06	07	0001	Piutang Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya
1	1	03	06	08		Piutang Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)
1	1	03	06	08	0001	Piutang Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	03	07			Piutang Pajak Restoran
1	1	03	07	01		Piutang Pajak Restoran dan sejenisnya
1	1	03	07	01	0001	Piutang Pajak Restoran dan Sejenisnya
1	1	03	07	02		Piutang Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya
1	1	03	07	02	0001	Piutang Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya
1	1	03	07	03		Piutang Pajak Kafetaria dan Sejenisnya
1	1	03	07	03	0001	Piutang Pajak Kafetaria dan Sejenisnya
1	1	03	07	04		Piutang Pajak Kantin dan Sejenisnya
1	1	03	07	04	0001	Piutang Pajak Kantin dan Sejenisnya
1	1	03	07	05		Piutang Pajak Warung dan Sejenisnya
1	1	03	07	05	0001	Piutang Pajak Warung dan Sejenisnya
1	1	03	07	06		Piutang Pajak Bar dan Sejenisnya
1	1	03	07	06	0001	Piutang Pajak Bar dan Sejenisnya
1	1	03	07	07		Piutang Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya
1	1	03	07	07	0001	Piutang Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya
1	1	03	08			Piutang Pajak Hiburan
1	1	03	08	01		Piutang Pajak Tontonan Film
1	1	03	08	01	0001	Piutang Pajak Tontonan Film
1	1	03	08	02		Piutang Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana
1	1	03	08	02	0001	Piutang Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/ Tari/Busana
1	1	03	08	03		Piutang Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya
1	1	03	08	03	0001	Piutang Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya
1	1	03	08	04		Piutang Pajak Pameran
1	1	03	08	04	0001	Piutang Pajak Pameran
1	1	03	08	05		Piutang Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya
1	1	03	08	05	0001	Piutang Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya
1	1	03	08	06		Piutang Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap
1	1	03	08	06	0001	Piutang Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap
1	1	03	08	07		Piutang Pajak Permainan Biliar dan Bowling
1	1	03	08	07	0001	Piutang Pajak Permainan Biliar dan Bowling
1	1	03	08	08		Piutang Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan
1	1	03	08	08	0001	Piutang Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan
1	1	03	08	09		Piutang Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)
1	1	03	08	09	0001	Piutang Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)
1	1	03	08	10		Piutang Pajak Pertandingan Olahraga
1	1	03	08	10	0001	Piutang Pajak Pertandingan Olahraga
1	1	03	09			Piutang Pajak Reklame
1	1	03	09	01		Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron
1	1	03	09	01	0001	Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron
1	1	03	09	02		Piutang Pajak Reklame Kain
1	1	03	09	02	0001	Piutang Pajak Reklame Kain
1	1	03	09	03		Piutang Pajak Reklame Melekat/Stiker
1	1	03	09	03	0001	Piutang Pajak Reklame Melekat/Stiker
1	1	03	09	04		Piutang Pajak Reklame Selebaran
1	1	03	09	04	0001	Piutang Pajak Reklame Selebaran
1	1	03	09	05		Piutang Pajak Reklame Berjalan
1	1	03	09	05	0001	Piutang Pajak Reklame Berjalan
1	1	03	09	06		Piutang Pajak Reklame Udara
1	1	03	09	06	0001	Piutang Pajak Reklame Udara
1	1	03	09	07		Piutang Pajak Reklame Apung
1	1	03	09	07	0001	Piutang Pajak Reklame Apung
1	1	03	09	08		Piutang Pajak Reklame Suara
1	1	03	09	08	0001	Piutang Pajak Reklame Suara

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	03	09	09		Piutang Pajak Reklame Film/Slide
1	1	03	09	09	0001	Piutang Pajak Reklame Film/Slide
1	1	03	09	10		Piutang Pajak Reklame Peragaan
1	1	03	09	10	0001	Piutang Pajak Reklame Peragaan
1	1	03	10			Piutang Pajak Penerangan Jalan
1	1	03	10	01		Piutang Pajak Penerangan Dihasilkan Sendiri
1	1	03	10	01	0001	Piutang Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri
1	1	03	10	02		Piutang Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain
1	1	03	10	02	0001	Piutang Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain
1	1	03	11			Piutang Pajak Parkir
1	1	03	11	01		Piutang Pajak Parkir
1	1	03	11	01	0001	Piutang Pajak Parkir
1	1	03	12			Piutang Pajak Air Tanah
1	1	03	12	01		Piutang Pajak Air Tanah
1	1	03	12	01	0001	Piutang Pajak Air Tanah
1	1	03	13			Piutang Pajak Sarang Burung Walet
1	1	03	13	01		Piutang Pajak Sarang Burung Walet
1	1	03	13	01	0001	Piutang Pajak Sarang Burung Walet
1	1	03	14			Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
1	1	03	14	04		Piutang Pajak Batu Kapur
1	1	03	14	04	0001	Piutang Pajak Batu Kapur
1	1	03	14	05		Piutang Pajak Batu Apung
1	1	03	14	05	0001	Piutang Pajak Batu Apung
1	1	03	14	37		Piutang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya
1	1	03	14	37	0001	Piutang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya
1	1	03	15			Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)
1	1	03	15	01		Piutang PBBP2
1	1	03	15	01	0001	Piutang PBBP2
1	1	03	16			Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1	1	03	16	01		Piutang BPHTB-Pemindahan Hak
1	1	03	16	01	0001	Piutang BPHTB-Pemindahan Hak
1	1	03	16	02		Piutang BPHTB-Pemberian Hak Baru
1	1	03	16	02	0001	Piutang BPHTB-Pemberian Hak Baru
1	1	04				Piutang Retribusi Daerah
1	1	04	01			Piutang Retribusi Jasa Umum
1	1	04	01	01		Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan
1	1	04	01	01	0001	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
1	1	04	01	01	0002	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling
1	1	04	01	01	0003	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu
1	1	04	01	01	0004	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan
1	1	04	01	01	0005	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah
1	1	04	01	01	0006	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan lainnya yang Sejenis
1	1	04	01	02		Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
1	1	04	01	02	0001	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
1	1	04	01	03		Piutang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
1	1	04	01	03	0001	Piutang Retribusi Pelayanan Penguburan/ Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat
1	1	04	01	03	0002	Piutang Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat
1	1	04	01	04		Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
1	1	04	01	04	0001	Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
1	1	04	01	05		Piutang Retribusi Pelayanan Pasar
1	1	04	01	05	0001	Piutang Retribusi Pelataran
1	1	04	01	05	0002	Piutang Retribusi Los
1	1	04	01	05	0003	Piutang Retribusi Kios
1	1	04	01	06		Piutang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	04	01	06	0001	Piutang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
1	1	04	01	07		Piutang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
1	1	04	01	07	0001	Piutang Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran
1	1	04	01	07	0002	Piutang Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Alat Penanggulangan Kebakaran
1	1	04	01	08		Piutang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
1	1	04	01	08	0001	Piutang Retribusi Penyediaan Peta Dasar (Garis)
1	1	04	01	08	0002	Piutang Retribusi Penyediaan Peta Foto
1	1	04	01	08	0003	Piutang Retribusi Penyediaan Peta Digital
1	1	04	01	08	0004	Piutang Retribusi Penyediaan Peta Tematik
1	1	04	01	08	0005	Piutang Retribusi Penyediaan Peta Teknis (Struktur)
1	1	04	01	09		Piutang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
1	1	04	01	09	0001	Piutang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
1	1	04	01	10		Piutang Retribusi Pengolahan Limbah Cair
1	1	04	01	10	0001	Piutang Retribusi Rumah Tangga
1	1	04	01	10	0002	Piutang Retribusi Perkantoran
1	1	04	01	10	0003	Piutang Retribusi Industri
1	1	04	01	11		Piutang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
1	1	04	01	11	0001	Piutang Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya
1	1	04	01	11	0002	Piutang Retribusi Pengujian Barang dalam Keadaan Terbungkus
1	1	04	01	12		Piutang Retribusi Pelayanan Pendidikan
1	1	04	01	12	0001	Piutang Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Teknis
1	1	04	01	12	0002	Piutang Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis
1	1	04	01	12	0003	Piutang Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis
1	1	04	01	13		Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
1	1	04	01	13	0001	Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
1	1	04	02			Piutang Retribusi Jasa Usaha
1	1	04	02	01		Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
1	1	04	02	01	0001	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan
1	1	04	02	01	0002	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah
1	1	04	02	01	0003	Piutang Retribusi Penyewaan Bangunan
1	1	04	02	01	0004	Piutang Retribusi Pemakaian Laboratorium
1	1	04	02	01	0005	Piutang Retribusi Pemakaian Ruangan
1	1	04	02	01	0006	Piutang Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor
1	1	04	02	01	0007	Piutang Retribusi Pemakaian Alat
1	1	04	02	02		Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
1	1	04	02	02	0001	Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan
1	1	04	02	03		Piutang Retribusi Tempat Pelelangan
1	1	04	02	03	0001	Piutang Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan
1	1	04	02	03	0002	Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan
1	1	04	02	04		Piutang Retribusi Terminal
1	1	04	02	04	0001	Piutang Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum
1	1	04	02	04	0002	Piutang Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha
1	1	04	02	04	0003	Piutang Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal
1	1	04	02	05		Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir
1	1	04	02	05	0001	Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir
1	1	04	02	06		Piutang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila
1	1	04	02	06	0001	Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila
1	1	04	02	07		Piutang Retribusi Rumah Potong Hewan
1	1	04	02	07	0001	Piutang Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan
1	1	04	02	08		Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	04	02	08	0001	Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
1	1	04	02	09		Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
1	1	04	02	09	0001	Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga
1	1	04	02	10		Piutang Retribusi Penyeberangan di Air
1	1	04	02	10	0001	Piutang Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang
1	1	04	02	10	0002	Piutang Retribusi Pelayanan Penyeberangan Barang
1	1	04	02	11		Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
1	1	04	02	11	0001	Piutang Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman
1	1	04	02	11	0002	Piutang Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit Ternak
1	1	04	02	11	0003	Piutang Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan
1	1	04	02	11	0004	Piutang Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan
1	1	04	03			Piutang Retribusi Perizinan Tertentu
1	1	04	03	01		Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
1	1	04	03	01	0001	Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
1	1	04	03	02		Piutang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
1	1	04	03	02	0001	Piutang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
1	1	04	03	03		Piutang Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
1	1	04	03	03	0001	Piutang Retribusi Izin Trayek Untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
1	1	04	03	04		Piutang Retribusi Izin Usaha Perikanan
1	1	04	03	04	0001	Piutang Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan
1	1	04	03	04	0002	Piutang Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan
1	1	04	03	05		Piutang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
1	1	04	03	05	0001	Piutang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Ruas Jalan Tertentu
1	1	04	03	05	0002	Piutang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Koridor Tertentu
1	1	04	03	05	0003	Piutang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Kawasan Tertentu
1	1	04	03	06		Piutang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
1	1	04	03	06	0001	Piutang Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing
1	1	04	03	07		Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
1	1	04	03	07	0001	Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
1	1	04	03	08		Piutang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)
1	1	04	03	08	0001	Piutang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)
1	1	04	03	09		Piutang Retribusi Pertambangan Rakyat
1	1	04	03	09	0001	Piutang Retribusi Pengelolaan Pertambangan Rakyat
1	1	05				Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1	1	05	01			Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN
1	1	06				Piutang Lain-lain PAD yang Sah
1	1	06	01			Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
1	1	06	01	01		Piutang Hasil Penjualan Tanah
1	1	06	03			Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan
1	1	06	03	01		Piutang Hasil Sewa BMD
1	1	06	03	01	0001	Piutang Hasil Sewa BMD
1	1	06	03	02		Piutang Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD
1	1	06	03	02	0001	Piutang Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD
1	1	06	03	03		Piutang Hasil dari Bangun Guna Serah
1	1	06	03	03	0001	Piutang Hasil dari Bangun Guna Serah
1	1	06	04			Piutang Hasil Kerja Sama Daerah
1	1	06	04	01		Piutang Hasil Kerja Sama Daerah
1	1	06	04	01	0001	Piutang Hasil Kerja Sama Daerah
1	1	06	05			Piutang Jasa Giro
1	1	06	05	01		Piutang Jasa Giro pada Kas Daerah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	05	01	0001	Piutang Jasa Giro pada Kas Daerah
1	1	06	05	02		Piutang Jasa Giro pada Kas di Bendahara
1	1	06	05	02	0001	Piutang Jasa Giro pada Kas di Bendahara
1	1	06	05	03		Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan
1	1	06	05	03	0001	Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan
1	1	06	05	04		Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana BOS
1	1	06	05	04	0001	Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana BOS
1	1	06	05	05		Piutang Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP
1	1	06	05	05	0001	Piutang Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP
1	1	06	05	06		Piutang Remunerasi Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)
1	1	06	05	06	0001	Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)
1	1	06	06			Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
1	1	06	06	01		Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
1	1	06	06	01	0001	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
1	1	06	07			Piutang Pendapatan Bunga
1	1	06	07	01		Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah
1	1	06	07	01	0001	Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah
1	1	06	08			Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah
1	1	06	08	01		Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara
1	1	06	08	01	0001	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara
1	1	06	08	02		Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
1	1	06	08	02	0001	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
1	1	06	09			Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain
1	1	06	09	01		Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain
1	1	06	09	01	0001	Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain
1	1	06	10			Piutang Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah Terhadap Mata Uang Asing
1	1	06	10	01		Piutang Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing
1	1	06	10	01	0001	Piutang Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing
1	1	06	11			Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
1	1	06	11	01		Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
1	1	06	11	01	0001	Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
1	1	06	13	01	0001	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan-Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
1	1	06	13	01	0002	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan-Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling
1	1	06	13	01	0003	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan-Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu
1	1	06	13	01	0005	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan-Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah
1	1	06	13	01	0010	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
1	1	06	13	01	0011	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar-Pelataran
1	1	06	13	01	0012	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar-Los
1	1	06	13	01	0013	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar-Kios
1	1	06	13	01	0014	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-Pengujian Kendaraan Bermotor
1	1	06	13	01	0015	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran
1	1	06	13	02		Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha
1	1	06	13	02	0001	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	13	02	0002	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah
1	1	06	13	02	0003	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Bangunan
1	1	06	13	02	0004	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Laboratorium
1	1	06	13	02	0005	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Ruang
1	1	06	13	02	0006	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Kendaraan Bermotor
1	1	06	13	03		Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu
1	1	06	13	03	0001	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-Pemberian Izin Mendirikan Bangunan
1	1	06	13	03	0002	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol-Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
1	1	06	13	03	0003	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
1	1	06	14			Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan
1	1	06	14	01		Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa
1	1	06	14	01	0001	Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa
1	1	06	15			Piutang Pendapatan dari Pengembalian
1	1	06	15	01		Piutang Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21
1	1	06	15	01	0001	Piutang Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21
1	1	06	15	02		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN
1	1	06	15	02	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS
1	1	06	15	02	0002	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK
1	1	06	15	03		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan
1	1	06	15	03	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan
1	1	06	15	04		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas
1	1	06	15	04	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa
1	1	06	15	04	0002	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Tetap
1	1	06	15	04	0003	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Dalam Kota
1	1	06	15	04	0004	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
1	1	06	15	04	0005	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
1	1	06	15	04	0006	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Negeri-Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri
1	1	06	15	05		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
1	1	06	15	05	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKK
1	1	06	15	06		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kematian (JKM)
1	1	06	15	06	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKM

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	07		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
1	1	06	15	07	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKN
1	1	06	15	08		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN
1	1	06	15	08	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS
1	1	06	15	08	0002	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PPPK
1	1	06	15	08	0003	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS
1	1	06	15	08	0004	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PPPK
1	1	06	15	08	0005	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Jabatan ASN-Tunjangan Jabatan PNS
1	1	06	15	08	0006	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Jabatan ASN-Tunjangan Jabatan PPPK
1	1	06	15	08	0007	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Fungsional ASN-Tunjangan Fungsional PNS
1	1	06	15	08	0008	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Fungsional ASN-Tunjangan Fungsional PPPK
1	1	06	15	08	0009	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN-Tunjangan Fungsional Umum PNS
1	1	06	15	08	0010	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN-Tunjangan Fungsional Umum PPPK
1	1	06	15	08	0011	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PNS
1	1	06	15	08	0012	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PPPK
1	1	06	15	08	0013	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS
1	1	06	15	08	0014	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK
1	1	06	15	08	0015	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PNS
1	1	06	15	08	0016	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PPPK
1	1	06	15	08	0017	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS
1	1	06	15	08	0018	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PPPK
1	1	06	15	08	0019	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS
1	1	06	15	08	0020	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK
1	1	06	15	08	0021	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN-Iuran Jaminan Kematian PNS
1	1	06	15	08	0022	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN-Iuran Jaminan Kematian PPPK
1	1	06	15	08	0023	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN-Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS
1	1	06	15	08	0024	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN-Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	08	0025	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jaminan Hari Tua ASN-Jaminan Hari Tua PNS
1	1	06	15	08	0026	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Khusus*)-Tunjangan Khusus*)
1	1	06	15	08	0027	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Zakat ASN-Zakat PNS
1	1	06	15	08	0028	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Zakat ASN-Zakat PPPK
1	1	06	15	09		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN
1	1	06	15	09	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS
1	1	06	15	09	0002	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK
1	1	06	15	09	0003	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS
1	1	06	15	09	0004	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK
1	1	06	15	09	0005	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS
1	1	06	15	09	0006	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK
1	1	06	15	09	0007	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS
1	1	06	15	09	0008	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK
1	1	06	15	09	0009	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS
1	1	06	15	09	0010	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK
1	1	06	15	10		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
1	1	06	15	10	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
1	1	06	15	10	0002	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
1	1	06	15	10	0003	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
1	1	06	15	10	0004	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	10	0005	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Rokok
1	1	06	15	10	0006	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel
1	1	06	15	10	0007	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran
1	1	06	15	10	0008	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan
1	1	06	15	10	0009	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame
1	1	06	15	10	0010	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
1	1	06	15	10	0011	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir
1	1	06	15	10	0012	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah
1	1	06	15	10	0013	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet
1	1	06	15	10	0014	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
1	1	06	15	10	0015	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan
1	1	06	15	10	0016	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
1	1	06	15	10	0017	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan
1	1	06	15	10	0018	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan
1	1	06	15	10	0019	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat bagi ASN
1	1	06	15	10	0020	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
1	1	06	15	10	0021	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar
1	1	06	15	10	0022	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor
1	1	06	15	10	0023	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	10	0024	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta
1	1	06	15	10	0025	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah
1	1	06	15	10	0026	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair
1	1	06	15	10	0027	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang
1	1	06	15	10	0028	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan
1	1	06	15	10	0029	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
1	1	06	15	10	0030	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah
1	1	06	15	10	0031	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
1	1	06	15	10	0032	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan
1	1	06	15	10	0033	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal
1	1	06	15	10	0034	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir
1	1	06	15	10	0035	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila
1	1	06	15	10	0036	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan
1	1	06	15	10	0037	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan
1	1	06	15	10	0038	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga
1	1	06	15	10	0039	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan Air
1	1	06	15	10	0040	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah
1	1	06	15	10	0041	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	10	0042	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
1	1	06	15	10	0043	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
1	1	06	15	10	0044	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan
1	1	06	15	10	0045	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas
1	1	06	15	10	0046	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
1	1	06	15	10	0047	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung
1	1	06	15	10	0048	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)
1	1	06	15	10	0049	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pertambahan Rakyat
1	1	06	15	10	0050	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD-TPG PNSD
1	1	06	15	10	0051	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD-TKG PNSD
1	1	06	15	10	0052	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD-Tamsil Guru PNSD
1	1	06	15	10	0053	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN-Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN
1	1	06	15	10	0054	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Honorarium-Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan
1	1	06	15	10	0055	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Honorarium-Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
1	1	06	15	10	0056	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Honorarium-Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)
1	1	06	15	10	0057	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Pengelola BMD-Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan
1	1	06	15	10	0058	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Pengelola BMD-Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan
1	1	06	15	11		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD
1	1	06	15	11	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang Representasi DPRD-Uang Representasi DPRD
1	1	06	15	11	0002	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga DPRD-Tunjangan Keluarga DPRD
1	1	06	15	11	0003	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras DPRD-Tunjangan Beras DPRD
1	1	06	15	11	0004	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang Paket DPRD-Uang Paket DPRD

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	11	0005	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Jabatan DPRD-Tunjangan Jabatan DPRD
1	1	06	15	11	0006	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD-Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD
1	1	06	15	11	0007	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD-Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD
1	1	06	15	11	0008	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD-Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
1	1	06	15	11	0009	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Reses DPRD-Tunjangan Reses DPRD
1	1	06	15	11	0010	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD-Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
1	1	06	15	11	0011	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pembulatan Gaji DPRD-Pembulatan Gaji DPRD
1	1	06	15	11	0012	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD-luran Jaminan Kesehatan bagi DPRD
1	1	06	15	11	0013	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD-Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD
1	1	06	15	11	0014	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD-Jaminan Kematian DPRD
1	1	06	15	11	0015	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD-Tunjangan Perumahan DPRD
1	1	06	15	11	0016	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Transportasi DPRD-Tunjangan Transportasi DPRD
1	1	06	15	11	0017	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD-Uang Jasa Pengabdian DPRD
1	1	06	15	12		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH
1	1	06	15	12	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH-Gaji Pokok KDH/WKDH
1	1	06	15	12	0002	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH-Tunjangan Keluarga KDH/WKDH
1	1	06	15	12	0003	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH-Tunjangan Jabatan KDH/WKDH
1	1	06	15	12	0004	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH-Tunjangan Beras KDH/WKDH
1	1	06	15	12	0005	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH-Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH
1	1	06	15	12	0006	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH-Pembulatan Gaji KDH/WKDH
1	1	06	15	12	0007	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH-luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH
1	1	06	15	12	0008	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH-luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi KDH/WKDH
1	1	06	15	12	0009	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH-luran Jaminan Kematian KDH/WKDH

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	12	0010	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
1	1	06	15	12	0011	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
1	1	06	15	12	0012	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
1	1	06	15	12	0013	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Permukaan
1	1	06	15	12	0014	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Rokok
1	1	06	15	12	0015	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel
1	1	06	15	12	0016	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran
1	1	06	15	12	0017	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan
1	1	06	15	12	0018	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame
1	1	06	15	12	0019	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
1	1	06	15	12	0020	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir
1	1	06	15	12	0021	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah
1	1	06	15	12	0022	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet
1	1	06	15	12	0023	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
1	1	06	15	12	0024	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
1	1	06	15	12	0025	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
1	1	06	15	12	0026	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan
1	1	06	15	12	0027	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	12	0028	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
1	1	06	15	12	0029	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
1	1	06	15	12	0030	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar
1	1	06	15	12	0031	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor
1	1	06	15	12	0032	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
1	1	06	15	12	0033	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta
1	1	06	15	12	0034	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
1	1	06	15	12	0035	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair
1	1	06	15	12	0036	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang
1	1	06	15	12	0037	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan
1	1	06	15	12	0038	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
1	1	06	15	12	0039	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah
1	1	06	15	12	0040	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
1	1	06	15	12	0041	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	12	0042	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal
1	1	06	15	12	0043	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir
1	1	06	15	12	0044	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila
1	1	06	15	12	0045	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan
1	1	06	15	12	0046	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan
1	1	06	15	12	0047	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga
1	1	06	15	12	0048	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan Air
1	1	06	15	12	0049	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah
1	1	06	15	12	0050	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan
1	1	06	15	12	0051	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
1	1	06	15	12	0052	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
1	1	06	15	12	0053	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan
1	1	06	15	12	0054	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas
1	1	06	15	12	0055	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	12	0056	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung
1	1	06	15	12	0057	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)
1	1	06	15	12	0058	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH-Insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pertambahan Rakyat
1	1	06	15	12	0059	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Pengelolaan BMD bagi KDH-Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan bagi KDH
1	1	06	15	12	0060	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Pengelolaan BMD bagi KDH-Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan bagi KDH
1	1	06	15	13		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
1	1	06	15	13	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD-Dana Operasional DPRD
1	1	06	15	13	0002	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Dana Operasional KDH/WKDH-Dana Operasional KDH/WKDH
1	1	06	15	14		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan MRP
1	1	06	15	14	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang Representasi MRP
1	1	06	15	14	0002	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga MRP
1	1	06	15	14	0003	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras MRP
1	1	06	15	14	0004	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang Paket MRP
1	1	06	15	14	0005	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Jabatan MRP
1	1	06	15	14	0006	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Kelompok Kerja MRP
1	1	06	15	14	0007	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Uang Penghargaan MRP
1	1	06	15	14	0008	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif MRP
1	1	06	15	14	0009	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Transportasi MRP
1	1	06	15	14	0010	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota MRP
1	1	06	15	14	0011	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pembulatan Gaji MRP
1	1	06	15	14	0012	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota MRP-luran Jaminan Kesehatan bagi MRP
1	1	06	15	14	0013	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota MRP-Jaminan Kecelakaan Kerja MRP
1	1	06	15	14	0014	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota MRP-Jaminan Kematian MRP

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	14	0015	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota MRP-Tunjangan Perumahan MRP
1	1	06	15	15		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang
1	1	06	15	15	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi
1	1	06	15	15	0002	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Kimia
1	1	06	15	15	0004	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas
1	1	06	15	15	0005	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Baku
1	1	06	15	15	0006	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Kimia Nuklir
1	1	06	15	15	0007	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Barang Dalam Proses
1	1	06	15	15	0008	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan/Bibit Tanaman
1	1	06	15	15	0009	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran
1	1	06	15	15	0010	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Isi Tabung Gas
1	1	06	15	15	0011	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan
1	1	06	15	15	0012	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Lainnya
1	1	06	15	15	0013	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan
1	1	06	15	15	0014	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar
1	1	06	15	15	0015	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran
1	1	06	15	15	0016	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium
1	1	06	15	15	0017	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pemancar
1	1	06	16			Piutang Pendapatan BLUD
1	1	06	16	01		Piutang Pendapatan BLUD
1	1	06	16	01	0001	Piutang Pendapatan BLUD
1	1	06	21			Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah
1	1	06	21	01		Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah
1	1	06	21	01	0001	Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah
1	1	08				Piutang Transfer Antar Daerah
1	1	08	01			Piutang Bagi Hasil
1	1	08	01	01		Piutang Bagi Hasil Pajak
1	1	08	01	01	0001	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor
1	1	08	01	01	0002	Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
1	1	08	01	01	0003	Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
1	1	08	01	01	0004	Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan
1	1	09				Piutang Lainnya
1	1	09	01			Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang
1	1	09	01	01		Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Pusat
1	1	09	01	01	0001	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Pusat
1	1	09	03			Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	09	03	02		Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas
1	1	09	03	02	0001	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas
1	1	09	04			Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
1	1	09	04	02		Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
1	1	09	04	02	0001	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
1	1	09	05			Uang Muka
1	1	09	05	01		Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa
1	1	09	05	01	0001	Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa
1	1	10				Penyisihan Piutang
1	1	10	01			Penyisihan Piutang Pendapatan
1	1	10	01	01		Penyisihan Piutang Pajak Daerah
1	1	10	01	01	0077	Penyisihan Piutang Pajak Hotel-Hotel
1	1	10	01	01	0085	Penyisihan Piutang Pajak Restoran-Restoran dan Sejenisnya
1	1	10	01	01	0096	Penyisihan Piutang Pajak Hiburan-Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya
1	1	10	01	01	0102	Penyisihan Piutang Pajak Reklame-Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron
1	1	10	01	01	0112	Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan-Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri
1	1	10	01	01	0115	Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah
1	1	10	01	01	0153	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya
1	1	10	01	01	0154	Penyisihan Piutang PBBP2
1	1	10	01	02		Penyisihan Piutang Retribusi
1	1	10	01	02	0012	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Los
1	1	10	01	02	0058	Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan-Pemberian Izin Mendirikan Bangunan
1	1	10	01	04		Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah
1	1	10	01	04	3272	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
1	1	10	01	04	6593	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah
1	1	10	02			Penyisihan Piutang Lainnya
1	1	10	02	01		Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang
1	1	10	02	01	0001	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Pusat
1	1	10	02	03		Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
1	1	10	02	03	0002	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas
1	1	10	02	04		Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
1	1	10	02	04	0002	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
1	1	11	01			Beban Dibayar Dimuka-Sewa
1	1	11	01	01		Beban Dibayar Dimuka-Sewa Tanah
1	1	11	01	01	0001	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
1	1	12				Persediaan
1	1	12	01			Barang Pakai Habis
1	1	12	01	01		Bahan
1	1	12	01	01	0002	Bahan Kimia
1	1	12	01	01	0004	Bahan Bakar dan Pelumas
1	1	12	01	02		Suku Cadang
1	1	12	01	02	0001	Suku Cadang Alat Angkutan
1	1	12	01	03		Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	12	01	03	0001	Alat Tulis Kantor
1	1	12	01	03	0003	Bahan Cetak
1	1	12	01	03	0007	Perabot Kantor
1	1	12	01	03	0008	Alat Listrik
1	1	12	01	03	0009	Perlengkapan Dinas
1	1	12	01	03	0013	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya
1	1	12	01	04		Obat-obatan
1	1	12	01	04	0001	Obat
1	1	12	01	04	0002	Obat-obatan Lainnya
1	1	12	01	05		Persediaan untuk Dijual/Diserahkan
1	1	12	01	05	0001	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat
1	1	12	01	07		Natura dan Pakan
1	1	12	01	07	0002	Pakan
1	1	13				Aset Untuk Dikonsolidasikan
1	1	13	01			RK SKPD
1	1	13	01	01		RK SKPD
1	1	13	01	01	0001	RK SKPD
1	2					INVESTASI JANGKA PANJANG
1	2	01				Investasi Jangka Panjang Non Permanen
1	2	01	05			Dana Bergulir
1	2	01	05	02		Dana Bergulir kepada Masyarakat
1	2	01	05	02	0001	Dana Bergulir kepada Masyarakat
1	2	02				Investasi Jangka Panjang Permanen
1	2	02	01			Penyertaan Modal
1	2	02	01	01		Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
1	2	02	01	01	0001	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
1	3					ASET TETAP
1	3	01				Tanah
1	3	01	01			Tanah
1	3	01	01	01		Tanah Persil
1	3	01	01	01	0001	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
1	3	01	01	01	0002	Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
1	3	01	01	01	0003	Tanah untuk Bangunan Industri
1	3	01	01	01	0004	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja
1	3	01	01	01	0005	Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga
1	3	01	01	01	0006	Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah
1	3	01	01	02		Tanah Non Persil
1	3	01	01	02	0002	Tanah Kering
1	3	01	01	02	0003	Tanah Perkebunan
1	3	01	01	02	0004	Tanah Hutan
1	3	01	01	02	0006	Tanah Padang Alang-Alang/Rumput
1	3	01	01	03		Lapangan
1	3	01	01	03	0001	Tanah Lapangan Olahraga
1	3	01	01	03	0003	Tanah Lapangan Penimbunan Barang
1	3	01	01	03	0007	Tanah untuk Jalan
1	3	01	01	03	0009	Tanah untuk Bangunan Instalasi
1	3	01	01	03	0010	Tanah untuk Bangunan Jaringan
1	3	01	01	03	0011	Tanah untuk Bangunan Bersejarah
1	3	01	01	03	0012	Tanah untuk Makam
1	3	02				Peralatan dan Mesin
1	3	02	01			Alat Besar
1	3	02	01	01		Alat Besar Darat
1	3	02	01	01	0002	Grader
1	3	02	01	01	0003	Excavator
1	3	02	01	01	0005	Hauler
1	3	02	01	01	0007	Compacting Equipment
1	3	02	01	01	0008	Aggregate and Concrete Equipment

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	3	02	01	01	0009	Loader
1	3	02	01	02		Alat Besar Apung
1	3	02	01	02	0005	Mesin Proses Apung
1	3	02	01	03		Alat Bantu
1	3	02	01	03	0003	Compressor
1	3	02	01	03	0004	Electric Generating Set
1	3	02	01	03	0005	Pompa
1	3	02	01	03	0006	Mesin Bor
1	3	02	01	03	0007	Unit Pemeliharaan Lapangan
1	3	02	01	03	0008	Alat Pengolahan Air Kotor
1	3	02	01	03	0012	Perlengkapan Kebakaran Hutan
1	3	02	02			Alat Angkutan
1	3	02	02	01		Alat Angkutan Darat Bermotor
1	3	02	02	01	0001	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
1	3	02	02	01	0002	Kendaraan Bermotor Penumpang
1	3	02	02	01	0003	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
1	3	02	02	01	0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua
1	3	02	02	01	0005	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
1	3	02	02	01	0006	Kendaraan Bermotor Khusus
1	3	02	02	01	0009	Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya
1	3	02	02	02		Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
1	3	02	02	02	0001	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang
1	3	02	02	02	0002	Kendaraan Tak Bermotor Penumpang
1	3	02	02	03		Alat Angkutan Apung Bermotor
1	3	02	02	03	0001	Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang
1	3	02	02	03	0002	Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang
1	3	02	02	03	0005	Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya
1	3	02	02	04		Alat Angkutan Apung Tak Bermotor
1	3	02	02	04	0001	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang
1	3	02	02	04	0002	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang
1	3	02	02	04	0003	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus
1	3	02	03			Alat Bengkel dan Alat Ukur
1	3	02	03	01		Alat Bengkel Bermesin
1	3	02	03	01	0001	Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi
1	3	02	03	01	0002	Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)
1	3	02	03	01	0003	Perkakas Bengkel Listrik
1	3	02	03	01	0004	Perkakas Bengkel Service
1	3	02	03	01	0005	Perkakas Pengangkat Bermesin
1	3	02	03	01	0006	Perkakas Bengkel Kayu
1	3	02	03	01	0008	Peralatan Las
1	3	02	03	01	0009	Perkakas Pabrik Es
1	3	02	03	01	0010	Alat Bengkel Bermesin Lainnya
1	3	02	03	02		Alat Bengkel Tak Bermesin
1	3	02	03	02	0002	Perkakas Bengkel Listrik
1	3	02	03	02	0003	Perkakas Bengkel Service
1	3	02	03	02	0004	Perkakas Pengangkat
1	3	02	03	02	0005	Perkakas Standard (Standard Tools)
1	3	02	03	02	0007	Perkakas Bengkel Kerja
1	3	02	03	02	0008	Peralatan Tukang Besi
1	3	02	03	02	0013	Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya
1	3	02	03	03		Alat Ukur
1	3	02	03	03	0001	Alat Ukur Universal
1	3	02	03	03	0007	Universal Tester
1	3	02	03	03	0008	Alat Ukur/Pembanding
1	3	02	03	03	0009	Alat Ukur Lain-Lain
1	3	02	03	03	0010	Alat Timbangan/Biara
1	3	02	03	03	0021	Alat Ukur Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	3	02	04			Alat Pertanian
1	3	02	04	01		Alat Pengolahan
1	3	02	04	01	0001	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
1	3	02	04	01	0002	Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak
1	3	02	04	01	0003	Alat Panen
1	3	02	04	01	0004	Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian
1	3	02	04	01	0005	Alat Laboratorium Pertanian
1	3	02	04	01	0006	Alat Processing
1	3	02	04	01	0007	Alat Pasca Panen
1	3	02	04	01	0008	Alat Produksi Perikanan
1	3	02	04	01	0009	Alat-Alat Peternakan
1	3	02	04	01	0010	Alat Pengolahan Lainnya
1	3	02	05			Alat Kantor dan Rumah Tangga
1	3	02	05	01		Alat Kantor
1	3	02	05	01	0001	Mesin Ketik
1	3	02	05	01	0002	Mesin Hitung/Mesin Jumlah
1	3	02	05	01	0003	Alat Reproduksi (Penggandaan)
1	3	02	05	01	0004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
1	3	02	05	01	0005	Alat Kantor Lainnya
1	3	02	05	02		Alat Rumah Tangga
1	3	02	05	02	0001	Mebel
1	3	02	05	02	0002	Alat Pengukur Waktu
1	3	02	05	02	0003	Alat Pembersih
1	3	02	05	02	0004	Alat Pendingin
1	3	02	05	02	0005	Alat Dapur
1	3	02	05	02	0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
1	3	02	05	02	0007	Alat Pemadam Kebakaran
1	3	02	05	03		Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
1	3	02	05	03	0001	Meja Kerja Pejabat
1	3	02	05	03	0002	Meja Rapat Pejabat
1	3	02	05	03	0003	Kursi Kerja Pejabat
1	3	02	05	03	0004	Kursi Rapat Pejabat
1	3	02	05	03	0005	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
1	3	02	05	03	0006	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
1	3	02	05	03	0007	Lemari dan Arsip Pejabat
1	3	02	06			Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar
1	3	02	06	01		Alat Studio
1	3	02	06	01	0001	Peralatan Studio Audio
1	3	02	06	01	0002	Peralatan Studio Video dan Film
1	3	02	06	01	0003	Peralatan Studio Gambar
1	3	02	06	01	0004	Peralatan Cetak
1	3	02	06	01	0005	Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah
1	3	02	06	01	0006	Alat Studio Lainnya
1	3	02	06	02		Alat Komunikasi
1	3	02	06	02	0001	Alat Komunikasi Telephone
1	3	02	06	02	0002	Alat Komunikasi Radio SSB
1	3	02	06	02	0003	Alat Komunikasi Radio HF/FM
1	3	02	06	02	0004	Alat Komunikasi Radio VHF
1	3	02	06	02	0005	Alat Komunikasi Radio UHF
1	3	02	06	02	0006	Alat Komunikasi Sosial
1	3	02	06	02	0011	Alat Komunikasi Lainnya
1	3	02	06	03		Peralatan Pemancar
1	3	02	06	03	0001	Peralatan Pemancar MF/MW
1	3	02	06	03	0003	Peralatan Pemancar VHF/FM
1	3	02	06	03	0008	Peralatan Antena VHF/FM
1	3	02	06	03	0010	Peralatan Antena SHF/Parabola
1	3	02	06	03	0014	Peralatan Translator UHF/VHF

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	3	02	06	03	0016	Peralatan Microwave Terrestrial
1	3	02	06	03	0020	Switcher/Menara Antena
1	3	02	06	03	0023	Program Input Equipment
1	3	02	07			Alat Kedokteran dan Kesehatan
1	3	02	07	01		Alat Kedokteran
1	3	02	07	01	0001	Alat Kedokteran Umum
1	3	02	07	01	0002	Alat Kedokteran Gigi
1	3	02	07	01	0003	Alat Kedokteran Keluarga Berencana
1	3	02	07	01	0004	Alat Kedokteran Bedah
1	3	02	07	01	0005	Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
1	3	02	07	01	0006	Alat Kedokteran THT
1	3	02	07	01	0007	Alat Kedokteran Mata
1	3	02	07	01	0008	Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam
1	3	02	07	01	0009	Alat Kedokteran Kamar Jenazah/Mortuary
1	3	02	07	01	0010	Alat Kedokteran Anak
1	3	02	07	01	0011	Alat Kedokteran Poliklinik
1	3	02	07	01	0012	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
1	3	02	07	01	0013	Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)
1	3	02	07	01	0014	Alat Kedokteran Jantung
1	3	02	07	01	0015	Alat Kedokteran Radiodiagnostic
1	3	02	07	01	0017	Alat Kedokteran Transfusi Darah
1	3	02	07	01	0019	Alat Kedokteran Nuklir
1	3	02	07	01	0020	Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
1	3	02	07	01	0021	Alat Kedokteran Gawat Darurat
1	3	02	07	01	0025	Alat Kedokteran ICCU
1	3	02	07	01	0028	Alat Kedokteran Anestesi
1	3	02	07	01	0029	Alat Kedokteran Lainnya
1	3	02	07	02		Alat Kesehatan Umum
1	3	02	07	02	0003	Alat Kesehatan Kepolisian
1	3	02	07	02	0004	Alat Kesehatan Olahraga
1	3	02	07	02	0005	Alat Kesehatan Umum Lainnya
1	3	02	08			Alat Laboratorium
1	3	02	08	01		Unit Alat Laboratorium
1	3	02	08	01	0001	Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan
1	3	02	08	01	0002	Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan
1	3	02	08	01	0003	Alat Laboratorium Hidrokimia
1	3	02	08	01	0005	Alat Laboratorium Batuan/Geologi
1	3	02	08	01	0006	Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
1	3	02	08	01	0007	Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia
1	3	02	08	01	0008	Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan
1	3	02	08	01	0010	Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik
1	3	02	08	01	0011	Alat Laboratorium Umum
1	3	02	08	01	0012	Alat Laboratorium Mikrobiologi
1	3	02	08	01	0013	Alat Laboratorium Kimia
1	3	02	08	01	0014	Alat Laboratorium Patologi
1	3	02	08	01	0015	Alat Laboratorium Immunologi
1	3	02	08	01	0017	Alat Laboratorium Film
1	3	02	08	01	0019	Alat Laboratorium Farmasi
1	3	02	08	01	0020	Alat Laboratorium Fisika
1	3	02	08	01	0024	Alat Laboratorium Pasir
1	3	02	08	01	0026	Alat Laboratorium Pembuatan Pola
1	3	02	08	01	0030	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
1	3	02	08	01	0031	Alat Laboratorium Metrologi
1	3	02	08	01	0036	Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
1	3	02	08	01	0039	Alat Laboratorium Uji Keramik
1	3	02	08	01	0041	Alat Laboratorium Pertanian
1	3	02	08	01	0042	Alat Laboratorium Elektronika dan Daya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	3	02	08	01	0045	Alat Laboratorium Oseanografi
1	3	02	08	01	0048	Alat Laboratorium Biologi
1	3	02	08	01	0054	Laboratorium Kearsipan
1	3	02	08	01	0055	Laboratorium Hematologi dan Urinalisis
1	3	02	08	01	0056	Alat Laboratorium Lain
1	3	02	08	01	0064	Unit Alat Laboratorium Lainnya
1	3	02	08	02		Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir
1	3	02	08	02	0003	General Laboratory Tool
1	3	02	08	02	0005	Laboratory Safety Equipment
1	3	02	08	03		Alat Peraga Praktik Sekolah
1	3	02	08	03	0001	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Bahasa Indonesia
1	3	02	08	03	0002	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Matematika
1	3	02	08	03	0003	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Dasar
1	3	02	08	03	0004	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Lanjutan
1	3	02	08	03	0005	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Menengah
1	3	02	08	03	0006	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Atas
1	3	02	08	03	0007	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPS
1	3	02	08	03	0008	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Agama
1	3	02	08	03	0009	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Keterampilan
1	3	02	08	03	0010	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Kesenian
1	3	02	08	03	0011	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Olahraga
1	3	02	08	03	0012	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: PKN
1	3	02	08	03	0014	Alat Peraga Kejuruan
1	3	02	08	03	0016	Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya
1	3	02	08	05		Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan
1	3	02	08	05	0004	Meteorological Equipment
1	3	02	08	06		Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya
1	3	02	08	06	0003	Peralatan Hidrologi
1	3	02	08	07		Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
1	3	02	08	07	0001	Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah
1	3	02	08	07	0004	Laboratorium Lingkungan
1	3	02	08	07	0005	Alat Laboratorium Penunjang
1	3	02	08	08		Peralatan Laboratorium Hydrodinamica
1	3	02	08	08	0003	Data Acquisition and Analyzing System
1	3	02	08	08	0006	Peralatan Umum
1	3	02	08	09		Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi
1	3	02	08	09	0006	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain
1	3	02	10			Komputer
1	3	02	10	01		Komputer Unit
1	3	02	10	01	0001	Komputer Jaringan
1	3	02	10	01	0002	Personal Computer
1	3	02	10	01	0003	Komputer Unit Lainnya
1	3	02	10	02		Peralatan Komputer
1	3	02	10	02	0001	Peralatan Mainframe
1	3	02	10	02	0002	Peralatan Mini Computer
1	3	02	10	02	0003	Peralatan Personal Computer
1	3	02	10	02	0004	Peralatan Jaringan
1	3	02	10	02	0005	Peralatan Komputer Lainnya
1	3	02	13			Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian
1	3	02	13	01		Sumur
1	3	02	13	01	0003	Sumur Lainnya
1	3	02	15			Alat Keselamatan Kerja
1	3	02	15	02		Alat Pelindung
1	3	02	15	02	0003	Topi Kerja
1	3	02	15	02	0005	Sepatu Lapangan
1	3	02	15	03		Alat SAR
1	3	02	15	03	0002	Alat Pendukung Pencarian

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	3	02	15	03	0003	Alat Kerja Bawah Air
1	3	02	15	03	0004	Alat SAR Lainnya
1	3	02	16			Alat Peraga
1	3	02	16	01		Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan
1	3	02	16	01	0001	Alat Peraga Pelatihan
1	3	02	18			Rambu-rambu
1	3	02	18	01		Rambu-rambu Lalu Lintas Darat
1	3	02	18	01	0001	Rambu Bersuar
1	3	02	18	01	0002	Rambu Tidak Bersuar
1	3	02	19			Peralatan Olahraga
1	3	02	19	01		Peralatan Olahraga
1	3	02	19	01	0001	Peralatan Olahraga Atletik
1	3	02	19	01	0002	Peralatan Permainan
1	3	02	19	01	0003	Peralatan Senam
1	3	02	19	01	0004	Peralatan Olahraga Air
1	3	02	19	01	0006	Peralatan Olahraga Lainnya
1	3	03				Gedung dan Bangunan
1	3	03	01			Bangunan Gedung
1	3	03	01	01		Bangunan Gedung Tempat Kerja
1	3	03	01	01	0001	Bangunan Gedung Kantor
1	3	03	01	01	0002	Bangunan Gudang
1	3	03	01	01	0003	Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar
1	3	03	01	01	0004	Bangunan Gedung Instalasi
1	3	03	01	01	0005	Bangunan Gedung Laboratorium
1	3	03	01	01	0006	Bangunan Kesehatan
1	3	03	01	01	0007	Bangunan Oseanarium/Observatorium
1	3	03	01	01	0008	Bangunan Gedung Tempat Ibadah
1	3	03	01	01	0009	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
1	3	03	01	01	0010	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
1	3	03	01	01	0011	Bangunan Gedung Tempat Olahraga
1	3	03	01	01	0012	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
1	3	03	01	01	0013	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga
1	3	03	01	01	0014	Bangunan Gedung Garasi/Pool
1	3	03	01	01	0015	Bangunan Gedung Pemotong Hewan
1	3	03	01	01	0016	Bangunan Gedung Perpustakaan
1	3	03	01	01	0017	Bangunan Gedung Museum
1	3	03	01	01	0018	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara
1	3	03	01	01	0019	Bangunan Pengujian Kelaikan
1	3	03	01	01	0025	Bangunan Terbuka
1	3	03	01	01	0028	Bangunan Industri
1	3	03	01	01	0029	Bangunan Peternakan/Perikanan
1	3	03	01	01	0030	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
1	3	03	01	01	0032	Bangunan Fasilitas Umum
1	3	03	01	01	0033	Bangunan Parkir
1	3	03	01	01	0034	Bangunan Gedung Pabrik
1	3	03	01	01	0035	Bangunan Stasiun Bus
1	3	03	01	01	0036	Taman
1	3	03	01	01	0037	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
1	3	03	01	02		Bangunan Gedung Tempat Tinggal
1	3	03	01	02	0001	Rumah Negara Golongan I
1	3	03	01	02	0002	Rumah Negara Golongan II
1	3	03	01	02	0003	Rumah Negara Golongan III
1	3	03	01	02	0004	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
1	3	03	01	02	0005	Asrama
1	3	03	01	02	0013	Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
1	3	03	02			Monumen
1	3	03	02	01		Candi/Tugu Peringatan/Prasasti

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	3	03	02	01	0002	Tugu
1	3	03	02	01	0003	Bangunan Peninggalan
1	3	03	04			Tugu Titik Kontrol/Pasti
1	3	03	04	01		Tugu/Tanda Batas
1	3	03	04	01	0001	Tugu/Tanda Batas Administrasi
1	3	03	04	01	0004	Pagar
1	3	03	04	01	0005	Tugu/Tanda Batas Lainnya
1	3	04				Jalan, Jaringan, dan Irigasi
1	3	04	01			Jalan dan Jembatan
1	3	04	01	01		Jalan
1	3	04	01	01	0001	Jalan Nasional
1	3	04	01	01	0003	Jalan Kabupaten
1	3	04	01	01	0005	Jalan Desa
1	3	04	01	01	0009	Jalan Khusus
1	3	04	01	01	0010	Jalan Lainnya
1	3	04	01	02		Jembatan
1	3	04	01	02	0003	Jembatan pada Jalan Kabupaten
1	3	04	01	02	0005	Jembatan pada Jalan Desa
1	3	04	01	02	0009	Jembatan pada Jalan Khusus
1	3	04	01	02	0010	Jembatan Penyeberangan
1	3	04	01	02	0013	Jembatan Lainnya
1	3	04	02			Bangunan Air
1	3	04	02	01		Bangunan Air Irigasi
1	3	04	02	01	0001	Bangunan Waduk Irigasi
1	3	04	02	01	0002	Bangunan Pengambilan Irigasi
1	3	04	02	01	0003	Bangunan Pembawa Irigasi
1	3	04	02	01	0004	Bangunan Pembuang Irigasi
1	3	04	02	01	0005	Bangunan Pengaman Irigasi
1	3	04	02	01	0006	Bangunan Pelengkap Irigasi
1	3	04	02	01	0008	Bangunan Air Irigasi Lainnya
1	3	04	02	02		Bangunan Pengairan Pasang Surut
1	3	04	02	02	0001	Bangunan Waduk Pasang Surut
1	3	04	02	02	0004	Saluran Pembuang Pasang Surut
1	3	04	02	03		Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder
1	3	04	02	03	0004	Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa
1	3	04	02	03	0006	Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa
1	3	04	02	03	0007	Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
1	3	04	02	04		Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
1	3	04	02	04	0001	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
1	3	04	02	04	0003	Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai
1	3	04	02	04	0004	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
1	3	04	02	04	0005	Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai
1	3	04	02	04	0006	Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai
1	3	04	02	05		Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah
1	3	04	02	05	0004	Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
1	3	04	02	06		Bangunan Air Bersih/Air Baku
1	3	04	02	06	0001	Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku
1	3	04	02	06	0002	Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku
1	3	04	02	06	0003	Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku
1	3	04	02	06	0005	Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
1	3	04	02	06	0006	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya
1	3	04	02	07		Bangunan Air Kotor
1	3	04	02	07	0001	Bangunan Pembawa Air Kotor
1	3	04	02	07	0003	Bangunan Pembuang Air Kotor
1	3	04	02	07	0004	Bangunan Pengaman Air Kotor
1	3	04	02	07	0005	Bangunan Pelengkap Air Kotor
1	3	04	02	07	0006	Bangunan Air Kotor Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	3	04	03			Instalasi
1	3	04	03	01		Instalasi Air Bersih/Air Baku
1	3	04	03	01	0001	Instalasi Air Permukaan
1	3	04	03	01	0002	Instalasi Air Sumber/Mata Air
1	3	04	03	01	0005	Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya
1	3	04	03	02		Instalasi Air Kotor
1	3	04	03	02	0001	Instalasi Air Buangan Domestik
1	3	04	03	02	0004	Instalasi Air Kotor Lainnya
1	3	04	03	03		Instalasi Pengolahan Sampah
1	3	04	03	03	0001	Instalasi Pengolahan Sampah Organik
1	3	04	03	03	0002	Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
1	3	04	03	05		Instalasi Pembangkit Listrik
1	3	04	03	05	0001	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
1	3	04	03	05	0009	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
1	3	04	03	06		Instalasi Gardu Listrik
1	3	04	03	06	0001	Instalasi Gardu Listrik Induk
1	3	04	03	06	0002	Instalasi Gardu Listrik Distribusi
1	3	04	03	06	0003	Instalasi Pusat Pengatur Listrik
1	3	04	03	06	0004	Instalasi Gardu Listrik Lainnya
1	3	04	03	09		Instalasi Pengaman
1	3	04	03	09	0001	Instalasi Pengaman Penangkal Petir
1	3	04	04			Jaringan
1	3	04	04	01		Jaringan Air Minum
1	3	04	04	01	0001	Jaringan Pembawa
1	3	04	04	01	0002	Jaringan Induk Distribusi
1	3	04	04	01	0003	Jaringan Cabang Distribusi
1	3	04	04	01	0004	Jaringan Sambungan ke Rumah
1	3	04	04	01	0005	Jaringan Air Minum Lainnya
1	3	04	04	02		Jaringan Listrik
1	3	04	04	02	0001	Jaringan Transmisi
1	3	04	04	02	0002	Jaringan Distribusi
1	3	04	04	02	0003	Jaringan Listrik Lainnya
1	3	04	04	03		Jaringan Telepon
1	3	04	04	03	0001	Jaringan Telepon di atas Tanah
1	3	04	04	03	0002	Jaringan Telepon di bawah Tanah
1	3	04	04	04		Jaringan Gas
1	3	04	04	04	0002	Jaringan Pipa Distribusi
1	3	05				Aset Tetap Lainnya
1	3	05	01			Bahan Perpustakaan
1	3	05	01	01		Bahan Perpustakaan Tercetak
1	3	05	01	01	0001	Buku Umum
1	3	05	01	01	0002	Buku Filsafat
1	3	05	01	01	0003	Buku Agama
1	3	05	01	01	0004	Buku Ilmu Sosial
1	3	05	01	01	0005	Buku Ilmu Bahasa
1	3	05	01	01	0006	Buku Matematika dan Pengetahuan Alam
1	3	05	01	01	0007	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis
1	3	05	01	01	0008	Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga
1	3	05	01	01	0009	Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah
1	3	05	01	01	0011	Buku Laporan
1	3	05	01	02		Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro
1	3	05	01	02	0001	Audio Visual
1	3	05	01	03		Kartografi, Naskah dan Lukisan
1	3	05	01	03	0001	Bahan Kartografi
1	3	05	01	04		Musik
1	3	05	01	04	0001	Karya Musik
1	3	05	01	06		Three Dimensional Artifacts and Realita

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	3	05	01	06	0001	Three Dimensional Artifacts and Realita
1	3	05	02			Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga
1	3	05	02	01		Barang Bercorak Kesenian
1	3	05	02	01	0001	Alat Musik
1	3	05	02	01	0002	Lukisan
1	3	05	02	02		Alat Bercorak Kebudayaan
1	3	05	02	02	0001	Pahatan
1	3	05	02	02	0002	Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah
1	3	05	02	02	0003	Barang Kerajinan
1	3	05	02	03		Tanda Penghargaan
1	3	05	02	03	0001	Tanda Penghargaan Bidang Olahraga
1	3	05	03			Hewan
1	3	05	03	02		Ternak
1	3	05	03	02	0001	Ternak Potong
1	3	05	05			Tanaman
1	3	05	05	01		Tanaman
1	3	05	05	01	0001	Tanaman
1	3	06				Konstruksi Dalam Pengerjaan
1	3	06	01			Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah
1	3	06	01	01		Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah
1	3	06	01	01	0001	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
1	3	06	03			Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan
1	3	06	03	01		Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung
1	3	06	03	01	0001	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
1	3	06	03	01	0006	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan
1	3	06	03	01	0010	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
1	3	07				Akumulasi Penyusutan
1	3	07	01			Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin
1	3	07	01	01		Akumulasi Penyusutan Alat Besar
1	3	07	01	01	0002	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Grader
1	3	07	01	01	0003	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Excavator
1	3	07	01	01	0005	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Hauler
1	3	07	01	01	0007	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Compacting Equipment
1	3	07	01	01	0008	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Aggregate and Concrete Equipment
1	3	07	01	01	0009	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Loader
1	3	07	01	01	0017	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung-Mesin Proses Apung
1	3	07	01	01	0021	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Compressor
1	3	07	01	01	0022	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Electric Generating Set
1	3	07	01	01	0023	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Pompa
1	3	07	01	01	0024	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Mesin Bor
1	3	07	01	01	0025	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan
1	3	07	01	01	0026	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor
1	3	07	01	01	0030	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan
1	3	07	01	02		Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan
1	3	07	01	02	0001	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
1	3	07	01	02	0002	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang
1	3	07	01	02	0003	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
1	3	07	01	02	0004	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	3	07	01	02	0006	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus
1	3	07	01	02	0009	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya
1	3	07	01	02	0010	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang
1	3	07	01	02	0011	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang
1	3	07	01	02	0014	Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang
1	3	07	01	02	0015	Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang
1	3	07	01	02	0018	Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya
1	3	07	01	02	0019	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang
1	3	07	01	02	0020	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang
1	3	07	01	02	0021	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus
1	3	07	01	03		Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur
1	3	07	01	03	0001	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi
1	3	07	01	03	0002	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)
1	3	07	01	03	0003	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik
1	3	07	01	03	0004	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Service
1	3	07	01	03	0005	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pengangkat Bermesin
1	3	07	01	03	0006	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu
1	3	07	01	03	0008	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Peralatan Las
1	3	07	01	03	0009	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es
1	3	07	01	03	0010	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya
1	3	07	01	03	0012	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik
1	3	07	01	03	0014	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Pengangkat
1	3	07	01	03	0015	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standard (Standard Tools)
1	3	07	01	03	0017	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja
1	3	07	01	03	0018	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Besi
1	3	07	01	03	0023	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya
1	3	07	01	03	0024	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Universal
1	3	07	01	03	0030	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Universal Tester
1	3	07	01	03	0031	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding
1	3	07	01	03	0032	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain
1	3	07	01	03	0033	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara
1	3	07	01	03	0044	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya
1	3	07	01	04		Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian
1	3	07	01	04	0001	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
1	3	07	01	04	0002	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak
1	3	07	01	04	0003	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Panen
1	3	07	01	04	0004	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian
1	3	07	01	04	0005	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	3	07	01	04	0006	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Processing
1	3	07	01	04	0007	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen
1	3	07	01	04	0008	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan
1	3	07	01	04	0009	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan
1	3	07	01	04	0010	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya
1	3	07	01	05		Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga
1	3	07	01	05	0001	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik
1	3	07	01	05	0002	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah
1	3	07	01	05	0003	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)
1	3	07	01	05	0004	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
1	3	07	01	05	0005	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya
1	3	07	01	05	0006	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel
1	3	07	01	05	0007	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu
1	3	07	01	05	0008	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih
1	3	07	01	05	0009	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin
1	3	07	01	05	0010	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur
1	3	07	01	05	0011	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
1	3	07	01	05	0012	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran
1	3	07	01	05	0013	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat
1	3	07	01	05	0014	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat
1	3	07	01	05	0015	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat
1	3	07	01	05	0016	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat
1	3	07	01	05	0017	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
1	3	07	01	05	0018	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangannya Pejabat
1	3	07	01	05	0019	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat
1	3	07	01	06		Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar
1	3	07	01	06	0001	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio
1	3	07	01	06	0002	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film
1	3	07	01	06	0004	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Cetak
1	3	07	01	06	0005	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah
1	3	07	01	06	0006	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Alat Studio Lainnya
1	3	07	01	06	0007	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone
1	3	07	01	06	0008	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB
1	3	07	01	06	0009	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM
1	3	07	01	06	0010	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF
1	3	07	01	06	0011	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF
1	3	07	01	06	0012	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial
1	3	07	01	06	0020	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar VHF/FM
1	3	07	01	06	0023	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena MF/MW
1	3	07	01	06	0025	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena VHF/FM
1	3	07	01	06	0027	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola
1	3	07	01	06	0031	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Translator UHF/VHF
1	3	07	01	06	0033	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Microwave Terrestrial
1	3	07	01	06	0037	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Switcher/Menara Antena
1	3	07	01	06	0040	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Program Input Equipment
1	3	07	01	07		Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan
1	3	07	01	07	0001	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum
1	3	07	01	07	0002	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	3	07	01	07	0003	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana
1	3	07	01	07	0004	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah
1	3	07	01	07	0005	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
1	3	07	01	07	0006	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran THT
1	3	07	01	07	0007	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata
1	3	07	01	07	0008	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam
1	3	07	01	07	0009	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kamar Jenazah/Mortuary
1	3	07	01	07	0010	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak
1	3	07	01	07	0011	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik
1	3	07	01	07	0012	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
1	3	07	01	07	0013	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)
1	3	07	01	07	0014	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung
1	3	07	01	07	0015	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radiodiagnostic
1	3	07	01	07	0017	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Transfusi Darah
1	3	07	01	07	0019	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Nuklir
1	3	07	01	07	0020	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
1	3	07	01	07	0021	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat
1	3	07	01	07	0025	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICCU
1	3	07	01	07	0028	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anestesi
1	3	07	01	07	0029	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya
1	3	07	01	07	0032	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Kepolisian
1	3	07	01	07	0033	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Olahraga
1	3	07	01	07	0034	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya
1	3	07	01	08		Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium
1	3	07	01	08	0001	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan
1	3	07	01	08	0002	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan
1	3	07	01	08	0003	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrokimia
1	3	07	01	08	0005	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Batuan/Geologi
1	3	07	01	08	0006	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
1	3	07	01	08	0007	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia
1	3	07	01	08	0008	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan
1	3	07	01	08	0010	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik
1	3	07	01	08	0011	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum
1	3	07	01	08	0012	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi
1	3	07	01	08	0013	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia
1	3	07	01	08	0014	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi
1	3	07	01	08	0015	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Immunologi
1	3	07	01	08	0017	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film
1	3	07	01	08	0019	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi
1	3	07	01	08	0020	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika
1	3	07	01	08	0024	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pasir
1	3	07	01	08	0026	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pembuatan Pola
1	3	07	01	08	0030	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	3	07	01	08	0036	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
1	3	07	01	08	0039	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Keramik
1	3	07	01	08	0041	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian
1	3	07	01	08	0042	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
1	3	07	01	08	0045	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Oseanografi
1	3	07	01	08	0048	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi
1	3	07	01	08	0054	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Kearsipan
1	3	07	01	08	0055	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Hematologi dan Urinalisis
1	3	07	01	08	0056	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain
1	3	07	01	08	0064	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya
1	3	07	01	08	0067	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-General Laboratory Tool
1	3	07	01	08	0069	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Laboratory Safety Equipment
1	3	07	01	08	0071	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia
1	3	07	01	08	0072	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika
1	3	07	01	08	0073	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar
1	3	07	01	08	0074	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan
1	3	07	01	08	0075	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah
1	3	07	01	08	0076	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas
1	3	07	01	08	0077	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS
1	3	07	01	08	0078	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama
1	3	07	01	08	0079	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan
1	3	07	01	08	0080	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian
1	3	07	01	08	0081	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga
1	3	07	01	08	0082	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN
1	3	07	01	08	0084	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Kejuruan
1	3	07	01	08	0100	Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Meteorological Equipment
1	3	07	01	08	0105	Akumulasi Penyusutan Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory-Peralatan Hidrologi
1	3	07	01	08	0107	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah
1	3	07	01	08	0110	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan
1	3	07	01	08	0111	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang
1	3	07	01	08	0115	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Data Acquisition and Analyzing System

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	3	07	01	08	0118	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Peralatan Umum
1	3	07	01	08	0134	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain
1	3	07	01	10		Akumulasi Penyusutan Komputer
1	3	07	01	10	0001	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan
1	3	07	01	10	0002	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer
1	3	07	01	10	0004	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe
1	3	07	01	10	0005	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer
1	3	07	01	10	0006	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer
1	3	07	01	10	0007	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan
1	3	07	01	10	0008	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya
1	3	07	01	15		Akumulasi Penyusutan Alat Keselamatan Kerja
1	3	07	01	15	0004	Akumulasi Penyusutan Alat Pelindung-Baju Pengaman
1	3	07	01	15	0006	Akumulasi Penyusutan Alat Pelindung-Topi Kerja
1	3	07	01	15	0011	Akumulasi Penyusutan Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian
1	3	07	01	15	0012	Akumulasi Penyusutan Alat SAR-Alat Kerja Bawah Air
1	3	07	01	15	0013	Akumulasi Penyusutan Alat SAR-Alat SAR Lainnya
1	3	07	01	18		Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu
1	3	07	01	18	0001	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar
1	3	07	01	18	0002	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar
1	3	07	01	19		Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga
1	3	07	01	19	0001	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik
1	3	07	01	19	0002	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan
1	3	07	01	19	0003	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Senam
1	3	07	01	19	0004	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Air
1	3	07	01	19	0006	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya
1	3	07	02			Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan
1	3	07	02	01		Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung
1	3	07	02	01	0001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
1	3	07	02	01	0002	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang
1	3	07	02	01	0003	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Untuk Bengkel/Hanggar
1	3	07	02	01	0004	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi
1	3	07	02	01	0005	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium
1	3	07	02	01	0006	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan
1	3	07	02	01	0007	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Oseanarium/Observatorium
1	3	07	02	01	0008	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah
1	3	07	02	01	0009	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
1	3	07	02	01	0010	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
1	3	07	02	01	0011	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga
1	3	07	02	01	0012	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
1	3	07	02	01	0013	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga
1	3	07	02	01	0014	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool
1	3	07	02	01	0015	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pemotong Hewan
1	3	07	02	01	0016	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	3	07	02	01	0017	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum
1	3	07	02	01	0018	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara
1	3	07	02	01	0019	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelaikan
1	3	07	02	01	0028	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri
1	3	07	02	01	0029	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan
1	3	07	02	01	0030	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
1	3	07	02	01	0032	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum
1	3	07	02	01	0034	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pabrik
1	3	07	02	01	0035	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Stasiun Bus
1	3	07	02	01	0036	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Taman
1	3	07	02	01	0037	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
1	3	07	02	01	0038	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I
1	3	07	02	01	0039	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II
1	3	07	02	01	0040	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III
1	3	07	02	01	0041	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/ Tempat Peristirahatan
1	3	07	02	01	0042	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama
1	3	07	02	01	0050	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
1	3	07	02	02		Akumulasi Penyusutan Monumen
1	3	07	02	02	0002	Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu
1	3	07	02	02	0003	Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan
1	3	07	02	04		Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas
1	3	07	02	04	0001	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi
1	3	07	02	04	0004	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Pagar
1	3	07	02	04	0005	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya
1	3	07	03			Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi
1	3	07	03	01		Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan
1	3	07	03	01	0001	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Nasional
1	3	07	03	01	0003	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Kabupaten
1	3	07	03	01	0005	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Desa
1	3	07	03	01	0009	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Khusus
1	3	07	03	01	0010	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Lainnya
1	3	07	03	01	0013	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten
1	3	07	03	01	0015	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa
1	3	07	03	01	0019	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus
1	3	07	03	01	0020	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan penyeberangan
1	3	07	03	01	0023	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan Lainnya
1	3	07	03	02		Akumulasi Penyusutan Bangunan Air
1	3	07	03	02	0001	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi
1	3	07	03	02	0002	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi
1	3	07	03	02	0003	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi
1	3	07	03	02	0004	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi
1	3	07	03	02	0005	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi
1	3	07	03	02	0006	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi
1	3	07	03	02	0008	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya
1	3	07	03	02	0009	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Waduk Pasang Surut
1	3	07	03	02	0020	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	3	07	03	02	0022	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa
1	3	07	03	02	0023	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
1	3	07	03	02	0027	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai
1	3	07	03	02	0028	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
1	3	07	03	02	0029	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai
1	3	07	03	02	0030	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai
1	3	07	03	02	0035	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
1	3	07	03	02	0040	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku
1	3	07	03	02	0041	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku
1	3	07	03	02	0042	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku
1	3	07	03	02	0044	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
1	3	07	03	02	0045	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya
1	3	07	03	02	0046	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor
1	3	07	03	02	0048	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor
1	3	07	03	02	0049	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pengaman Air Kotor
1	3	07	03	02	0050	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor
1	3	07	03	03		Akumulasi Penyusutan Instalasi
1	3	07	03	03	0001	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan
1	3	07	03	03	0002	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air
1	3	07	03	03	0005	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya
1	3	07	03	03	0006	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik
1	3	07	03	03	0009	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya
1	3	07	03	03	0010	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik
1	3	07	03	03	0018	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
1	3	07	03	03	0026	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
1	3	07	03	03	0030	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk
1	3	07	03	03	0031	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi
1	3	07	03	03	0032	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik
1	3	07	03	03	0033	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya
1	3	07	03	03	0040	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Penangkal Petir
1	3	07	03	04		Akumulasi Penyusutan Jaringan
1	3	07	03	04	0001	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa
1	3	07	03	04	0002	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Induk Distribusi
1	3	07	03	04	0003	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi
1	3	07	03	04	0004	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah
1	3	07	03	04	0006	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi
1	3	07	03	04	0007	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	3	07	03	04	0008	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya
1	3	07	03	04	0009	Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah
1	3	07	03	04	0010	Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di bawah Tanah
1	3	07	03	04	0015	Akumulasi Penyusutan Jaringan Gas-Jaringan Pipa Distribusi
1	5					ASET LAINNYA
1	5	01				Tagihan Jangka Panjang
1	5	01	01			Tagihan Penjualan Angsuran
1	5	01	01	02		Tagihan Angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas
1	5	01	01	02	0001	Tagihan Angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas.
1	5	01	02			Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
1	5	01	02	02		Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
1	5	01	02	02	0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
1	5	02				Kemitraan dengan Pihak Ketiga
1	5	02	01			Kemitraan dengan Pihak Ketiga
1	5	02	01	01		Kemitraan dengan Pihak Ketiga
1	5	02	01	01	0002	Kerja Sama Pemanfaatan
1	5	03				Aset Tidak Berwujud
1	5	03	01			Aset Tidak Berwujud
1	5	03	01	01		Aset Tidak Berwujud
1	5	03	01	01	0005	Software
1	5	04				Aset Lain-lain
1	5	04	01			Aset Lain-lain
1	5	04	01	01		Aset Lain-lain
1	5	04	01	01	0001	Aset Rusak Berat/Usang
1	5	04	01	01	0002	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah
1	5	05				Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
1	5	05	01			Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
1	5	05	01	01		Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
1	5	05	01	01	0004	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software
1	5	06				Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
1	5	06	01			Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
1	5	06	01	02		Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain
1	5	06	01	02	0001	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang
1	5	07				Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)
1	5	07	01			Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)
1	5	07	01	01		Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)
1	5	07	01	01	0001	Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)
2						KEWAJIBAN
2	1					KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
2	1	01				Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
2	1	01	07			Utang Taperum
2	1	01	07	01		Utang Taperum
2	1	01	07	01	0001	Utang Taperum
2	1	05				Pendapatan Diterima Dimuka
2	1	06				Utang Belanja
2	1	06	01			Utang Belanja Pegawai
2	1	06	01	02	0001	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS
2	1	06	02			Utang Belanja Barang dan Jasa
2	1	06	02	01		Utang Belanja Barang
2	1	06	02	01	0001	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi
2	1	06	02	99		Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD
2	1	06	02	99	9999	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD
2	1	06	07			Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2	1	06	07	07		Utang Belanja Alat Kedokteran dan Kesehatan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	07	07	0034	Utang Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya
2	1	06	07	10		Utang Belanja Modal Komputer
2	1	06	07	10	0006	Utang Belanja Modal Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer
2	1	06	08			Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan
2	1	06	08	01		Utang Belanja Modal Bangunan Gedung
2	1	06	08	01	0010	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
2	1	06	09			Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
2	1	06	09	01		Utang Belanja Modal Jalan, dan Jembatan
2	1	06	09	01	0003	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten
2	1	06	09	01	0004	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kota
2	1	06	09	01	0005	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Desa
2	1	06	09	01	0013	Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten
2	1	06	09	01	0023	Utang Belanja Modal Jembatan Lainnya
2	1	06	09	02		Utang Belanja Modal Bangunan Air
2	1	06	09	02	0001	Utang Belanja Modal Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi
2	1	06	09	02	0005	Utang Belanja Modal Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi
2	1	06	09	02	0008	Utang Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya
2	1	07				Utang Jangka Pendek Lainnya
2	1	07	01			Utang Kelebihan Pembayaran PAD
2	1	07	01	01		Utang Kelebihan Pembayaran Pajak
2	1	07	01	01	0015	Utang Kelebihan Pembayaran PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Pusat
3						EKUITAS
3	1					EKUITAS
3	1	01				Ekuitas
3	1	01	01			Ekuitas
3	1	01	01	01		Ekuitas
3	1	01	01	01	0001	Ekuitas
3	1	01	02			Surplus/Defisit-LO
3	1	01	02	01		Surplus/Defisit-LO
3	1	02				Ekuitas SAL
3	1	02	05			Estimasi Perubahan SAL
3	1	02	05	01		Estimasi Perubahan SAL
3	1	02	05	01	0001	Estimasi Perubahan SAL
3	1	03				Ekuitas untuk Dikonsolidasikan
3	1	03	01			RK PPKD
3	1	03	01	01		RK PPKD
3	1	03	01	01	0001	RK PPKD
4	1					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	1	1				Pajak Daerah
4	1	1	6			Pajak Hotel
4	1	1	6	1		Pajak Hotel
4	1	1	6	1	1	Pajak Hotel
4	1	1	6	3		Pajak Losmen
4	1	1	6	3	1	Pajak Losmen
4	1	1	6	7		Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya
4	1	1	6	7	1	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya
4	1	1	6	8		Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)
4	1	1	6	8	1	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)
4	1	1	7			Pajak Restoran
4	1	1	7	1		Pajak Restoran dan Sejenisnya
4	1	1	7	1	1	Pajak Restoran dan Sejenisnya
4	1	1	7	2		Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya
4	1	1	7	2	1	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya
4	1	1	7	3		Pajak Kafetaria dan Sejenisnya
4	1	1	7	3	1	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya
4	1	1	7	5		Pajak Warung dan Sejenisnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	1	7	5	1	Pajak Warung dan Sejenisnya
4	1	1	7	7		Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya
4	1	1	7	7	1	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya
4	1	1	8			Pajak Hiburan
4	1	1	8	2		Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana
4	1	1	8	2	1	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana
4	1	1	8	5		Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya
4	1	1	8	5	1	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya
4	1	1	8	8		Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan
4	1	1	8	8	1	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan
4	1	1	8	9		Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)
4	1	1	8	9	1	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)
4	1	1	8	10		Pajak Pertandingan Olahraga
4	1	1	8	10	1	Pajak Pertandingan Olahraga
4	1	1	9			Pajak Reklame
4	1	1	9	1		Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron
4	1	1	9	1	1	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron
4	1	1	10			Pajak Penerangan Jalan
4	1	1	10	1		Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri
4	1	1	10	1	1	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri
4	1	1	10	2		Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain
4	1	1	10	2	1	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain
4	1	1	11			Pajak Parkir
4	1	1	11	1		Pajak Parkir
4	1	1	11	1	1	Pajak Parkir
4	1	1	12			Pajak Air Tanah
4	1	1	12	1		Pajak Air Tanah
4	1	1	12	1	1	Pajak Air Tanah
4	1	1	14			Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
4	1	1	14	37		Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya
4	1	1	14	37	1	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya
4	1	1	15			Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
4	1	1	15	1		PBBP2
4	1	1	15	1	1	PBBP2
4	1	1	16			Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
4	1	1	16	1		BPHTB-Pemindahan Hak
4	1	1	16	1	1	BPHTB-Pemindahan Hak
4	1	1	16	2		BPHTB-Pemberian Hak Baru
4	1	1	16	2	1	BPHTB-Pemberian Hak Baru
4	1	2				Retribusi Daerah
4	1	2	1			Retribusi Jasa Umum
4	1	2	1	1		Retribusi Pelayanan Kesehatan
4	1	2	1	1	1	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
4	1	2	1	2		Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
4	1	2	1	2	1	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
4	1	2	1	3		Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
4	1	2	1	3	1	Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalan dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat
4	1	2	1	4		Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
4	1	2	1	4	1	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
4	1	2	1	6		Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
4	1	2	1	6	1	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
4	1	2	1	7		Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
4	1	2	1	7	1	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	2	1	9		Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
4	1	2	1	9	1	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
4	1	2	1	11		Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
4	1	2	1	11	1	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya
4	1	2	1	13		Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
4	1	2	1	13	1	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
4	1	2	2			Retribusi Jasa Usaha
4	1	2	2	1		Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
4	1	2	2	1	1	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan
4	1	2	2	1	4	Retribusi Pemakaian Laboratorium
4	1	2	2	1	7	Retribusi Pemakaian Alat
4	1	2	2	2		Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
4	1	2	2	2	1	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan
4	1	2	2	2	2	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan
4	1	2	2	3		Retribusi Tempat Pelelangan
4	1	2	2	3	1	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan
4	1	2	2	4		Retribusi Terminal
4	1	2	2	4	3	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal
4	1	2	2	5		Retribusi Tempat Khusus Parkir
4	1	2	2	5	1	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir
4	1	2	2	6		Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila
4	1	2	2	6	1	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila
4	1	2	2	7		Retribusi Rumah Potong Hewan
4	1	2	2	7	1	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan
4	1	2	2	8		Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
4	1	2	2	8	1	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
4	1	2	2	9		Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
4	1	2	2	9	1	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga
4	1	2	3			Retribusi Perizinan Tertentu
4	1	2	3	1		Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
4	1	2	3	1	1	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan
4	1	2	3	2		Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
4	1	2	3	2	1	Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
4	1	2	3	3		Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
4	1	2	3	3	1	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
4	1	2	3	6		Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
4	1	2	3	6	1	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing
4	1	3				Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4	1	3	2			Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD
4	1	3	2	1		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)
4	1	3	2	1	1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)
4	1	4				Lain-lain PAD yang Sah
4	1	4	5			Jasa Giro
4	1	4	5	1		Jasa Giro pada Kas Daerah
4	1	4	5	1	1	Jasa Giro pada Kas Daerah
4	1	4	8			Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah
4	1	4	8	1		Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara
4	1	4	8	1	1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara
4	1	4	8	2		Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	4	8	2	1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
4	1	4	11			Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
4	1	4	11	1		Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
4	1	4	11	1	1	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
4	1	4	15			Pendapatan dari Pengembalian
4	1	4	15	3		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan
4	1	4	15	3	1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan
4	2					PENDAPATAN TRANSFER
4	2	1				Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
4	2	1	1			Dana Perimbangan
4	2	1	1	1		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)
4	2	1	1	1	1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan
4	2	1	1	1	2	DBH PPh Pasal 21
4	2	1	1	1	3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WOPDN
4	2	1	1	1	4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
4	2	1	1	1	5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi
4	2	1	1	1	6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi
4	2	1	1	1	8	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent
4	2	1	1	1	10	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
4	2	1	1	1	13	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan
4	2	1	1	2		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)
4	2	1	1	2	1	DAU
4	2	1	1	2	2	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan
4	2	1	1	3		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
4	2	1	1	3	1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD
4	2	1	1	3	2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD
4	2	1	1	3	3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP
4	2	1	1	3	6	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB
4	2	1	1	3	16	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB
4	2	1	1	4		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
4	2	1	1	4	4	DAK Non Fisik-TPG PNSD
4	2	1	1	4	5	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD
4	2	1	1	4	6	DAK Non Fisik-TKG PNSD
4	2	1	1	4	9	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum
4	2	1	1	4	11	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
4	2	1	1	4	15	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
4	2	1	1	4	20	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal
4	2	1	1	4	23	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian
4	2	1	2			Dana Insentif Daerah (DID)
4	2	1	2	1		DID
4	2	1	2	1	1	DID
4	2	2				Pendapatan Transfer Antar Daerah
4	2	2	1			Pendapatan Bagi Hasil
4	2	2	1	1		Pendapatan Bagi Hasil Pajak
4	2	2	1	1	1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor
4	2	2	1	1	2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
4	2	2	1	1	3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4	2	2	1	1	4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan
4	2	2	1	1	5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok
4	2	2	2			Bantuan Keuangan
4	2	2	2	2		Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi
4	2	2	2	2	1	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi
4	3					LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
4	3	1				Pendapatan Hibah
4	3	1	1			Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
4	3	1	1	1		Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	3	1	1	1	1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
5	1					BELANJA OPERASI
5	1	1				Belanja Pegawai
5	1	1	1			Belanja Gaji dan Tunjangan ASN
5	1	1	1	1		Belanja Gaji Pokok ASN
5	1	1	1	1	1	Belanja Gaji Pokok PNS
5	1	1	1	1	2	Belanja Gaji Pokok PPPK
5	1	1	1	2		Belanja Tunjangan Keluarga ASN
5	1	1	1	2	1	Belanja Tunjangan Keluarga PNS
5	1	1	1	2	2	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK
5	1	1	1	3		Belanja Tunjangan Jabatan ASN
5	1	1	1	3	1	Belanja Tunjangan Jabatan PNS
5	1	1	1	4		Belanja Tunjangan Fungsional ASN
5	1	1	1	4	1	Belanja Tunjangan Fungsional PNS
5	1	1	1	4	2	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK
5	1	1	1	5		Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN
5	1	1	1	5	1	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS
5	1	1	1	5	2	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK
5	1	1	1	6		Belanja Tunjangan Beras ASN
5	1	1	1	6	1	Belanja Tunjangan Beras PNS
5	1	1	1	6	2	Belanja Tunjangan Beras PPPK
5	1	1	1	7		Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN
5	1	1	1	7	1	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS
5	1	1	1	8		Belanja Pembulatan Gaji ASN
5	1	1	1	8	1	Belanja Pembulatan Gaji PNS
5	1	1	1	8	2	Belanja Pembulatan Gaji PPPK
5	1	1	1	9		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN
5	1	1	1	9	1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS
5	1	1	1	9	2	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK
5	1	1	1	10		Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN
5	1	1	1	10	1	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS
5	1	1	1	10	2	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK
5	1	1	1	11		Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN
5	1	1	1	11	1	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS
5	1	1	1	11	2	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK
5	1	1	1	12		Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN
5	1	1	1	12	1	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS
5	1	1	2			Belanja Tambahan Penghasilan ASN
5	1	1	2	1		Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN
5	1	1	2	1	1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS
5	1	1	2	1	2	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK
5	1	1	2	3		Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN
5	1	1	2	3	1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS
5	1	1	2	4		Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN
5	1	1	2	4	1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS
5	1	1	3			Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
5	1	1	3	1		Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah
5	1	1	3	1	6	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel
5	1	1	3	1	7	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran
5	1	1	3	1	8	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan
5	1	1	3	1	9	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame
5	1	1	3	1	10	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
5	1	1	3	1	11	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir
5	1	1	3	1	12	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah
5	1	1	3	1	13	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet
5	1	1	3	1	14	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	1	3	1	15	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan
5	1	1	3	1	16	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
5	1	1	3	2		Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
5	1	1	3	2	1	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan
5	1	1	3	2	4	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
5	1	1	3	2	7	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
5	1	1	3	2	13	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
5	1	1	3	2	14	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah
5	1	1	3	2	15	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
5	1	1	3	2	16	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan
5	1	1	3	2	17	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal
5	1	1	3	2	18	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir
5	1	1	3	2	20	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan
5	1	1	3	2	21	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan
5	1	1	3	2	22	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga
5	1	1	3	3		Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD
5	1	1	3	3	1	Belanja TPG PNSD
5	1	1	3	4		Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD
5	1	1	3	4	1	Belanja TKG PNSD
5	1	1	3	5		Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD
5	1	1	3	5	1	Belanja Tamsil Guru PNSD
5	1	1	3	6	1	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN
5	1	1	3	7		Belanja Honorarium
5	1	1	3	7	1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan
5	1	1	3	7	2	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
5	1	1	3	7	3	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)
5	1	1	4			Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD
5	1	1	4	1		Belanja Uang Representasi DPRD
5	1	1	4	1	1	Belanja Uang Representasi DPRD
5	1	1	4	2		Belanja Tunjangan Keluarga DPRD
5	1	1	4	2	1	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD
5	1	1	4	3		Belanja Tunjangan Beras DPRD
5	1	1	4	3	1	Belanja Tunjangan Beras DPRD
5	1	1	4	4		Belanja Uang Paket DPRD
5	1	1	4	4	1	Belanja Uang Paket DPRD
5	1	1	4	5		Belanja Tunjangan Jabatan DPRD
5	1	1	4	5	1	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD
5	1	1	4	6		Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD
5	1	1	4	6	1	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD
5	1	1	4	8		Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
5	1	1	4	8	1	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
5	1	1	4	9		Belanja Tunjangan Reses DPRD
5	1	1	4	9	1	Belanja Tunjangan Reses DPRD
5	1	1	4	10		Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	1	4	10	1	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
5	1	1	4	11		Belanja Pembulatan Gaji DPRD
5	1	1	4	11	1	Belanja Pembulatan Gaji DPRD
5	1	1	4	12		Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD
5	1	1	4	12	1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD
5	1	1	4	12	2	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD
5	1	1	4	12	3	Belanja Jaminan Kematian DPRD
5	1	1	4	12	4	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD
5	1	1	4	13		Belanja Tunjangan Transportasi DPRD
5	1	1	4	13	1	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD
5	1	1	4	14		Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD
5	1	1	4	14	1	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD
5	1	1	5			Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH
5	1	1	5	1		Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH
5	1	1	5	1	1	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH
5	1	1	5	2		Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH
5	1	1	5	2	1	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH
5	1	1	5	3		Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH
5	1	1	5	3	1	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH
5	1	1	5	4		Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH
5	1	1	5	4	1	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH
5	1	1	5	5		Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH
5	1	1	5	5	1	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH
5	1	1	5	6		Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH
5	1	1	5	6	1	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH
5	1	1	5	7		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH
5	1	1	5	7	1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH
5	1	1	5	8		Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH
5	1	1	5	8	1	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH
5	1	1	5	9		Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH
5	1	1	5	9	1	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH
5	1	1	6			Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
5	1	1	6	1		Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD
5	1	1	6	1	1	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD
5	1	1	6	2		Belanja Dana Operasional KDH/WKDH
5	1	1	6	2	1	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH
5	1	1	99	99	9999	Belanja Pegawai BLUD
5	1	2				Belanja Barang dan Jasa
5	1	2	1			Belanja Barang
5	1	2	1	1		Belanja Barang Pakai Habis
5	1	2	1	1	1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi
5	1	2	1	1	2	Belanja Bahan-Bahan Kimia
5	1	2	1	1	4	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas
5	1	2	1	1	5	Belanja Bahan-Bahan Baku
5	1	2	1	1	8	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman
5	1	2	1	1	9	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran
5	1	2	1	1	10	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas
5	1	2	1	1	11	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan
5	1	2	1	1	12	Belanja Bahan-Bahan Lainnya
5	1	2	1	1	13	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan
5	1	2	1	1	15	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran
5	1	2	1	1	16	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium
5	1	2	1	1	22	Belanja Suku Cadang-Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial
5	1	2	1	1	23	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya
5	1	2	1	1	24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
5	1	2	1	1	25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover
5	1	2	1	1	26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	2	1	1	27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos
5	1	2	1	1	29	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer
5	1	2	1	1	30	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor
5	1	2	1	1	31	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik
5	1	2	1	1	32	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas
5	1	2	1	1	34	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga
5	1	2	1	1	35	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata
5	1	2	1	1	36	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya
5	1	2	1	1	37	Belanja Obat-Obatan-Obat
5	1	2	1	1	38	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya
5	1	2	1	1	39	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat
5	1	2	1	1	40	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya
5	1	2	1	1	43	Belanja Natura dan Pakan-Natura
5	1	2	1	1	44	Belanja Natura dan Pakan-Pakan
5	1	2	1	1	52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
5	1	2	1	1	53	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu
5	1	2	1	1	54	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh
5	1	2	1	1	55	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan
5	1	2	1	1	56	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan
5	1	2	1	1	57	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial
5	1	2	1	1	58	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan
5	1	2	1	1	59	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH
5	1	2	1	1	60	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD
5	1	2	1	1	63	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
5	1	2	1	1	64	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)
5	1	2	1	1	65	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)
5	1	2	1	1	66	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)
5	1	2	1	1	70	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja
5	1	2	1	1	73	Belanja Pakaian KORPRI
5	1	2	1	1	74	Belanja Pakaian Adat Daerah
5	1	2	1	1	75	Belanja Pakaian Batik Tradisional
5	1	2	1	1	76	Belanja Pakaian Olahraga
5	1	2	1	1	77	Belanja Pakaian Paskibraka
5	1	2	1	1	78	Belanja Pakaian Jas/Safari
5	1	2	1	2		Belanja Barang Tak Habis Pakai
5	1	2	1	2	3	Belanja Komponen-Komponen Peralatan
5	1	2	1	2	4	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu
5	1	2	1	2	6	Belanja Komponen-Komponen Lainnya
5	1	2	1	2	13	Belanja Pipa-Pipa Lainnya
5	1	2	2			Belanja Jasa
5	1	2	2	1		Belanja Jasa Kantor
5	1	2	2	1	1	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan
5	1	2	2	1	3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
5	1	2	2	1	4	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
5	1	2	2	1	5	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara
5	1	2	2	1	6	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan
5	1	2	2	1	7	Honorarium Rohaniwan
5	1	2	2	1	8	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website
5	1	2	2	1	10	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota
5	1	2	2	1	11	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
5	1	2	2	1	12	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	2	2	1	13	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan
5	1	2	2	1	14	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan
5	1	2	2	1	15	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium
5	1	2	2	1	16	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum
5	1	2	2	1	18	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
5	1	2	2	1	20	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial
5	1	2	2	1	23	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan
5	1	2	2	1	25	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan
5	1	2	2	1	26	Belanja Jasa Tenaga Administrasi
5	1	2	2	1	27	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer
5	1	2	2	1	28	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum
5	1	2	2	1	29	Belanja Jasa Tenaga Ahli
5	1	2	2	1	30	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan
5	1	2	2	1	31	Belanja Jasa Tenaga Keamanan
5	1	2	2	1	33	Belanja Jasa Tenaga Supir
5	1	2	2	1	35	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik
5	1	2	2	1	37	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan
5	1	2	2	1	38	Belanja Jasa Tata Rias
5	1	2	2	1	39	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi
5	1	2	2	1	41	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik
5	1	2	2	1	42	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan
5	1	2	2	1	43	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan
5	1	2	2	1	46	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi
5	1	2	2	1	47	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara
5	1	2	2	1	48	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi
5	1	2	2	1	50	Belanja Jasa Kalibrasi
5	1	2	2	1	51	Belanja Jasa Pengolahan Sampah
5	1	2	2	1	52	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi
5	1	2	2	1	53	Belanja Jasa Pengukuran Tanah
5	1	2	2	1	55	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan
5	1	2	2	1	59	Belanja Tagihan Telepon
5	1	2	2	1	60	Belanja Tagihan Air
5	1	2	2	1	61	Belanja Tagihan Listrik
5	1	2	2	1	62	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah
5	1	2	2	1	63	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan
5	1	2	2	1	64	Belanja Paket/Pengiriman
5	1	2	2	1	66	Belanja Registrasi/Keanggotaan
5	1	2	2	1	67	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan
5	1	2	2	1	71	Belanja Lembur
5	1	2	2	1	73	Belanja Medical Check Up
5	1	2	2	2		Belanja Iuran Jaminan/Asuransi
5	1	2	2	2	1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
5	1	2	2	2	2	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI
5	1	2	2	2	6	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN
5	1	2	2	2	7	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN
5	1	2	2	4		Belanja Sewa Peralatan dan Mesin
5	1	2	2	4	3	Belanja Sewa Excavator
5	1	2	2	4	12	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya
5	1	2	2	4	22	Belanja Sewa Electric Generating Set
5	1	2	2	4	35	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
5	1	2	2	4	36	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang
5	1	2	2	4	37	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
5	1	2	2	4	49	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang
5	1	2	2	4	86	Belanja Sewa Alat Kalibrasi
5	1	2	2	4	117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya
5	1	2	2	4	118	Belanja Sewa Mebel
5	1	2	2	4	121	Belanja Sewa Alat Pendingin

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	2	2	4	123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
5	1	2	2	4	126	Belanja Sewa Meja Rapat Pejabat
5	1	2	2	4	127	Belanja Sewa Kursi Kerja Pejabat
5	1	2	2	4	128	Belanja Sewa Kursi Rapat Pejabat
5	1	2	2	4	132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio
5	1	2	2	4	137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya
5	1	2	2	4	410	Belanja Sewa Peralatan Jaringan
5	1	2	2	5		Belanja Sewa Gedung dan Bangunan
5	1	2	2	5	1	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor
5	1	2	2	5	9	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
5	1	2	2	5	38	Belanja Sewa Rumah Negara Golongan I
5	1	2	2	5	43	Belanja Sewa Hotel
5	1	2	2	6		Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi
5	1	2	2	6	130	Belanja Sewa Jaringan dengan Media Udara
5	1	2	2	8		Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi
5	1	2	2	8	1	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural
5	1	2	2	8	2	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural
5	1	2	2	8	3	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung
5	1	2	2	8	4	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior
5	1	2	2	8	5	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya
5	1	2	2	8	6	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik
5	1	2	2	8	14	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan
5	1	2	2	8	15	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah
5	1	2	2	8	16	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape
5	1	2	2	8	18	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur
5	1	2	2	8	19	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung
5	1	2	2	8	20	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi
5	1	2	2	8	23	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang
5	1	2	2	8	33	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan
5	1	2	2	9		Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi
5	1	2	2	9	3	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika
5	1	2	2	9	12	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik
5	1	2	2	9	13	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen
5	1	2	2	9	14	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus
5	1	2	2	9	20	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisata
5	1	2	2	11		Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
5	1	2	2	11	1	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1
5	1	2	2	11	2	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2
5	1	2	2	11	3	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3
5	1	2	2	12		Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan
5	1	2	2	12	1	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan
5	1	2	2	12	3	Belanja Bimbingan Teknis
5	1	2	2	12	4	Belanja Diklat Kepemimpinan
5	1	2	2	14		Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	2	2	14	5	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar
5	1	2	3			Belanja Pemeliharaan
5	1	2	3	2		Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
5	1	2	3	2	12	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya
5	1	2	3	2	35	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
5	1	2	3	2	36	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang
5	1	2	3	2	37	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
5	1	2	3	2	43	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya
5	1	2	3	2	96	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor
5	1	2	3	2	117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya
5	1	2	3	2	121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin
5	1	2	3	2	124	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran
5	1	2	3	2	133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film
5	1	2	3	2	196	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya
5	1	2	3	2	405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer
5	1	2	3	2	409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer
5	1	2	3	2	421	Belanja Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Alat Pengeboran Mesin Lainnya
5	1	2	3	2	492	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar
5	1	2	3	3		Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
5	1	2	3	3	1	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
5	1	2	3	3	8	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah
5	1	2	3	3	11	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga
5	1	2	3	3	13	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga
5	1	2	3	3	30	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
5	1	2	3	3	32	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum
5	1	2	3	3	33	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir
5	1	2	3	3	36	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman
5	1	2	3	3	38	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I
5	1	2	3	3	63	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar
5	1	2	3	4		Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi
5	1	2	3	4	26	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	2	3	4	48	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
5	1	2	3	4	79	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya
5	1	2	3	4	118	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain
5	1	2	3	4	126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya
5	1	2	3	5		Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
5	1	2	3	5	57	Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman
5	1	2	4			Belana Perjalanan Dinas
5	1	2	4	1		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
5	1	2	4	1	1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa
5	1	2	4	1	2	Belanja Perjalanan Dinas Tetap
5	1	2	4	1	3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
5	1	2	4	1	4	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
5	1	2	4	1	5	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
5	1	2	4	2		Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri
5	1	2	4	2	1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa“Luar Negeri
5	1	2	5			Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
5	1	2	5	1		Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
5	1	2	5	1	1	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan
5	1	2	5	1	3	Belanja Beasiswa
5	1	2	5	1	5	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)
5	1	2	5	2		Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
5	1	2	5	2	1	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain
5	1	2	88	88	8888	Belanja Barang dan Jasa BOS
5	1	2	99	99	9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD
5	1	4				Belanja Subsidi
5	1	4	2			Belanja Subsidi kepada BUMD
5	1	4	2	2		Belanja Subsidi kepada BUMD
5	1	4	2	2	1	Belanja Subsidi kepada BUMD
5	1	5				Belanja Hibah
5	1	5	1			Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat
5	1	5	1	1		Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat
5	1	5	1	1	1	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat
5	1	5	5			Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
5	1	5	5	1		Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
5	1	5	5	1	1	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
5	1	5	5	2		Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
5	1	5	5	2	1	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
5	1	5	5	2	2	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
5	1	5	05	2	2	Dst ...
5	1	5	5	3		Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
5	1	5	5	3	1	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
5	1	5	5	3	2	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
5	1	5	6	2	1	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	5	7			Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
5	1	5	7	1		Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
5	1	5	7	1	1	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
5	1	6				Belanja Bantuan Sosial
5	1	6	1			Belanja Bantuan Sosial kepada Individu
5	1	6	1	1		Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu
5	1	6	1	1	1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu
5	1	6	3			Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat
5	1	6	3	1		Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat
5	1	6	3	1	1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat
5	1	6	3	2	1	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat
5	2					BELANJA MODAL
5	2	1				Belanja Modal Tanah
5	2	1	1			Belanja Modal Tanah
5	2	1	1	1		Belanja Modal Tanah Persil
5	2	1	1	1	1	Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal
5	2	1	1	1	4	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja
5	2	1	1	3		Belanja Modal Lapangan
5	2	1	1	3	7	Belanja Modal Tanah untuk Jalan
5	2	2				Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5	2	2	1			Belanja Modal Alat Besar
5	2	2	1	1	12	Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya
5	2	2	1	2	6	Belanja Modal Alat Besar Apung Lainnya
5	2	2	1	3		Belanja Modal Alat Bantu
5	2	2	1	3	4	Belanja Modal Electric Generating Set
5	2	2	1	3	5	Belanja Modal Pompa
5	2	2	1	3	6	Belanja Modal Mesin Bor
5	2	2	2			Belanja Modal Alat Angkutan
5	2	2	2	1		Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor
5	2	2	2	1	1	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
5	2	2	2	1	2	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang
5	2	2	2	1	3	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
5	2	2	2	1	4	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua
5	2	2	2	1	5	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
5	2	2	2	1	6	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus
5	2	2	2	3	3	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus
5	2	2	2	3	5	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya
5	2	2	3			Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur
5	2	2	3	1		Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin
5	2	2	3	1	6	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu
5	2	2	3	1	10	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya
5	2	2	3	3		Belanja Modal Alat Ukur
5	2	2	3	3	1	Belanja Modal Alat Ukur Universal
5	2	2	3	3	9	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain
5	2	2	3	3	21	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya
5	2	2	4			Belanja Modal Alat Pertanian
5	2	2	4	1		Belanja Modal Alat Pengolahan
5	2	2	4	1	1	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
5	2	2	4	1	2	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak
5	2	2	4	1	3	Belanja Modal Alat Panen
5	2	2	4	1	6	Belanja Modal Alat Processing
5	2	2	4	1	8	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan
5	2	2	4	1	9	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan
5	2	2	4	1	10	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	2	2	5			Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga
5	2	2	5	1		Belanja Modal Alat Kantor
5	2	2	5	1	1	Belanja Modal Mesin Ketik
5	2	2	5	1	4	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
5	2	2	5	1	5	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya
5	2	2	5	2		Belanja Modal Alat Rumah Tangga
5	2	2	5	2	1	Belanja Modal Mebel
5	2	2	5	2	3	Belanja Modal Alat Pembersih
5	2	2	5	2	4	Belanja Modal Alat Pendingin
5	2	2	5	2	5	Belanja Modal Alat Dapur
5	2	2	5	2	6	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
5	2	2	5	2	7	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran
5	2	2	5	3		Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
5	2	2	5	3	1	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat
5	2	2	5	3	2	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat
5	2	2	5	3	3	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat
5	2	2	5	3	4	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat
5	2	2	5	3	6	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
5	2	2	5	3	7	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat
5	2	2	6			Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar
5	2	2	6	1		Belanja Modal Alat Studio
5	2	2	6	1	1	Belanja Modal Peralatan Studio Audio
5	2	2	6	1	2	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film
5	2	2	6	1	5	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah
5	2	2	6	1	6	Belanja Modal Alat Studio Lainnya
5	2	2	6	2	1	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone
5	2	2	6	2	11	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya
5	2	2	6	3	3	Belanja Modal Peralatan Pemancar VHF/FM
5	2	2	6	3	48	Belanja Modal Peralatan Pemancar Lainnya
5	2	2	6	4	7	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya
5	2	2	7			Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan
5	2	2	7	2		Belanja Modal Alat Kesehatan Umum
5	2	2	7	2	5	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya
5	2	2	8			Belanja Modal Alat Laboratorium
5	2	2	8	1		Belanja Modal Unit Alat Laboratorium
5	2	2	8	1	6	Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
5	2	2	8	1	56	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain
5	2	2	8	3		Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah
5	2	2	8	3	10	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Kesenian
5	2	2	8	3	15	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK
5	2	2	8	3	16	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya
5	2	2	8	6	3	Belanja Modal Peralatan Hidrologi
5	2	2	10			Belanja Modal Komputer
5	2	2	10	1		Belanja Modal Komputer Unit
5	2	2	10	1	2	Belanja Modal Personal Computer
5	2	2	10	1	3	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya
5	2	2	10	2		Belanja Modal Peralatan Komputer
5	2	2	10	2	1	Belanja Modal Peralatan Mainframe
5	2	2	10	2	2	Belanja Modal Peralatan Mini Computer
5	2	2	10	2	3	Belanja Modal Peralatan Personal Computer
5	2	2	10	2	4	Belanja Modal Peralatan Jaringan
5	2	2	10	2	5	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya
5	2	2	13			Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian
5	2	2	13	1		Belanja Modal Sumur
5	2	2	13	1	3	Belanja Modal Sumur Lainnya
5	2	2	15			Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja
5	2	2	15	2		Belanja Modal Alat Pelindung

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	2	2	15	2	1	Belanja Modal Baju Pengaman
5	2	2	15	2	3	Belanja Modal Topi Kerja
5	2	2	15	2	5	Belanja Modal Sepatu Lapangan
5	2	2	15	2	6	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya
5	2	2	15	3		Belanja Modal Alat SAR
5	2	2	15	3	1	Belanja Modal Alat Penolong
5	2	2	15	3	2	Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian
5	2	2	15	3	3	Belanja Modal Alat Kerja Bawah Air
5	2	2	16			Belanja Modal Alat Peraga
5	2	2	16	1		Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan
5	2	2	16	1	1	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan
5	2	2	18			Belanja Modal Rambu-Rambu
5	2	2	18	1		Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat
5	2	2	18	1	1	Belanja Modal Rambu Bersuar
5	2	2	18	1	2	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar
5	2	2	18	1	3	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya
5	2	2	88	88	8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS
5	2	2	99	99	9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD
5	2	3				Belanja Modal Gedung dan Bangunan
5	2	3	1			Belanja Modal Bangunan Gedung
5	2	3	1	1		Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja
5	2	3	1	1	1	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor
5	2	3	1	1	2	Belanja Modal Bangunan Gudang
5	2	3	1	1	6	Belanja Modal Bangunan Kesehatan
5	2	3	1	1	10	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
5	2	3	1	1	11	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga
5	2	3	1	1	12	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
5	2	3	1	1	13	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga
5	2	3	1	1	27	Belanja Modal Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
5	2	3	1	1	29	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan
5	2	3	1	1	30	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
5	2	3	1	1	32	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum
5	2	3	1	1	33	Belanja Modal Bangunan Parkir
5	2	3	1	1	36	Belanja Modal Taman
5	2	3	1	2	13	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
5	2	3	4			Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti
5	2	3	4	1		Belanja Modal Tugu/Tanda Batas
5	2	3	4	1	1	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi
5	2	3	4	1	4	Belanja Modal Pagar
5	2	4				Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
5	2	4	1			Belanja Modal Jalan dan Jembatan
5	2	4	1	1		Belanja Modal Jalan
5	2	4	1	1	3	Belanja Modal Jalan Kabupaten
5	2	4	1	1	5	Belanja Modal Jalan Desa
5	2	4	1	1	9	Belanja Modal Jalan Khusus
5	2	4	1	1	10	Belanja Modal Jalan Lainnya
5	2	4	1	2		Belanja Modal Jembatan
5	2	4	1	2	13	Belanja Modal Jembatan Lainnya
5	2	4	2			Belanja Modal Bangunan Air
5	2	4	2	1		Belanja Modal Bangunan Air Irigasi
5	2	4	2	1	1	Belanja Modal Bangunan Waduk Irigasi
5	2	4	2	1	6	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Irigasi
5	2	4	2	1	8	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya
5	2	4	2	4		Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
5	2	4	2	4	1	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	2	4	2	4	4	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
5	2	4	2	4	5	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai
5	2	4	2	6		Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku
5	2	4	2	6	2	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku
5	2	4	2	6	6	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya
5	2	4	2	7		Belanja Modal Bangunan Air Kotor
5	2	4	2	7	3	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor
5	2	4	2	7	5	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Kotor
5	2	4	2	7	6	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya
5	2	4	3			Belanja Modal Instalasi
5	2	4	3	3		Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah
5	2	4	3	3	2	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
5	2	4	4			Belanja Modal Jaringan
5	2	4	4	1		Belanja Modal Jaringan Air Minum
5	2	4	4	1	5	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya
5	2	4	4	2		Belanja Modal Jaringan Listrik
5	2	4	4	2	2	Belanja Modal Jaringan Distribusi
5	2	4	4	2	3	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya
5	2	5				Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
5	2	5	1			Belanja Modal Bahan Perpustakaan
5	2	5	1	1		Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak
5	2	5	1	1	1	Belanja Modal Buku Umum
5	2	5	1	1	12	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya
5	2	5	2			Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga
5	2	5	2	1		Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian
5	2	5	2	1	1	Belanja Modal Alat Musik
5	2	5	8			Belanja Modal Aset Tidak Berwujud
5	2	5	8	1		Belanja Modal Aset Tidak Berwujud
5	2	5	8	1	5	Belanja Modal Software
5	2	6				Belanja Modal Aset Lainnya
5	2	6	99	99	9999	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD
5	3					BELANJA TIDAK TERDUGA
5	3	1				Belanja Tidak Terduga
5	3	1	1			Belanja Tidak Terduga
5	3	1	1	1		Belanja Tidak Terduga
5	3	1	1	1	1	Belanja Tidak Terduga
5	4					BELANJA TRANSFER
5	4	1				Belanja Bagi Hasil
5	4	1	1			Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa
5	4	1	1	3		Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa
5	4	1	1	3	1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa
5	4	1	2			Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa
5	4	1	2	1		Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa
5	4	1	2	1	1	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa
5	4	2				Belanja Bantuan Keuangan
5	4	2	5			Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
5	4	2	5	1		Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
5	4	2	5	1	1	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
5	4	2	5	2		Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	4	2	5	2	1	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
7	1					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO
7	1	01				Pajak Daerah-LO
7	1	01	06			Pajak Hotel-LO
7	1	01	06	01		Pajak Hotel-LO
7	1	01	06	01	0001	Pajak Hotel-LO
7	1	01	06	03		Pajak Losmen-LO
7	1	01	06	03	0001	Pajak Losmen-LO
7	1	01	06	07		Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya-LO
7	1	01	06	07	0001	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya-LO
7	1	01	06	08		Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)-LO
7	1	01	06	08	0001	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)-LO
7	1	01	07			Pajak Restoran-LO
7	1	01	07	01		Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO
7	1	01	07	01	0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO
7	1	01	07	02		Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya-LO
7	1	01	07	02	0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya-LO
7	1	01	07	03		Pajak Kafetaria dan Sejenisnya-LO
7	1	01	07	03	0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya-LO
7	1	01	07	05		Pajak Warung dan Sejenisnya-LO
7	1	01	07	05	0001	Pajak Warung dan Sejenisnya-LO
7	1	01	07	07		Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya-LO
7	1	01	07	07	0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya-LO
7	1	01	08			Pajak Hiburan-LO
7	1	01	08	02		Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana-LO
7	1	01	08	02	0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana-LO
7	1	01	08	05		Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya-LO
7	1	01	08	05	0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya-LO
7	1	01	08	08		Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan-LO
7	1	01	08	08	0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan-LO
7	1	01	08	09		Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)-LO
7	1	01	08	09	0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)-LO
7	1	01	08	10		Pajak Pertandingan Olahraga-LO
7	1	01	08	10	0001	Pajak Pertandingan Olahraga-LO
7	1	01	09			Pajak Reklame-LO
7	1	01	09	01		Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron-LO
7	1	01	09	01	0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron-LO
7	1	01	10			Pajak Penerangan Jalan-LO
7	1	01	10	01		Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri-LO
7	1	01	10	01	0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri-LO
7	1	01	10	02		Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain-LO
7	1	01	10	02	0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain-LO
7	1	01	11			Pajak Parkir-LO
7	1	01	11	01		Pajak Parkir-LO
7	1	01	11	01	0001	Pajak Parkir-LO
7	1	01	12			Pajak Air Tanah-LO
7	1	01	12	01		Pajak Air Tanah-LO
7	1	01	12	01	0001	Pajak Air Tanah-LO
7	1	01	14			Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO
7	1	01	14	37		Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO
7	1	01	14	37	0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO
7	1	01	15			Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO
7	1	01	15	01		PBBP2-LO
7	1	01	15	01	0001	PBBP2-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	01	16			Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO
7	1	01	16	01		BPHTB-Pemindahan Hak-LO
7	1	01	16	01	0001	BPHTB-Pemindahan Hak-LO
7	1	01	16	02		BPHTB-Pemberian Hak Baru-LO
7	1	01	16	02	0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru-LO
7	1	02				Retribusi Daerah-LO
7	1	02	01			Retribusi Jasa Umum-LO
7	1	02	01	01		Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO
7	1	02	01	01	0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas-LO
7	1	02	01	02		Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LO
7	1	02	01	02	0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan -LO
7	1	02	01	03		Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-LO
7	1	02	01	03	0001	Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat-LO
7	1	02	01	04		Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO
7	1	02	01	04	0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO
7	1	02	01	06		Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO
7	1	02	01	06	0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO
7	1	02	01	07		Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-LO
7	1	02	01	07	0001	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran-LO
7	1	02	01	09		Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO
7	1	02	01	09	0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO
7	1	02	01	11		Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-LO
7	1	02	01	11	0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya-LO
7	1	02	01	13		Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO
7	1	02	01	13	0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO
7	1	02	02			Retribusi Jasa Usaha-LO
7	1	02	02	01		Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO
7	1	02	02	01	0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO
7	1	02	02	01	0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium-LO
7	1	02	02	01	0007	Retribusi Pemakaian Alat-LO
7	1	02	02	02		Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LO
7	1	02	02	02	0001	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan-LO
7	1	02	02	02	0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan-LO
7	1	02	02	03		Retribusi Tempat Pelelangan-LO
7	1	02	02	03	0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan-LO
7	1	02	02	04		Retribusi Terminal-LO
7	1	02	02	04	0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal-LO
7	1	02	02	05		Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO
7	1	02	02	05	0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir-LO
7	1	02	02	06		Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-LO
7	1	02	02	06	0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-LO
7	1	02	02	07		Retribusi Rumah Potong Hewan-LO
7	1	02	02	07	0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan-LO
7	1	02	02	08		Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO
7	1	02	02	08	0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO
7	1	02	02	09		Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO
7	1	02	02	09	0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO
7	1	02	03			Retribusi Perizinan Tertentu-LO
7	1	02	03	01		Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO
7	1	02	03	01	0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan-LO
7	1	02	03	02		Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol-LO
7	1	02	03	02	0001	Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol-LO
7	1	02	03	03		Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	02	03	03	0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO
7	1	02	03	06		Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)-LO
7	1	02	03	06	0001	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing-LO
7	1	03				Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO
7	1	03	02			Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO
7	1	03	02	01		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO
7	1	03	02	01	0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO
7	1	04				Lain-lain PAD yang Sah-LO
7	1	04	05			Jasa Giro-LO
7	1	04	05	01		Jasa Giro pada Kas Daerah-LO
7	1	04	05	01	0001	Jasa Giro pada Kas Daerah-LO
7	1	04	08			Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO
7	1	04	08	01		Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara-LO
7	1	04	08	01	0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara-LO
7	1	04	08	02		Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO
7	1	04	08	02	0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO
7	1	04	11			Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO
7	1	04	11	01		Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO
7	1	04	11	01	0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO
7	1	04	15			Pendapatan dari Pengembalian-LO
7	1	04	15	03		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO
7	1	04	15	03	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO
7	2					PENDAPATAN TRANSFER-LO
7	2	01				Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO
7	2	01	01			Dana Perimbangan-LO
7	2	01	01	01		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO
7	2	01	01	01	0001	DBH PBB-LO
7	2	01	01	01	0002	DBH PPh Pasal 21-LO
7	2	01	01	01	0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO
7	2	01	01	01	0004	DBH CHT-LO
7	2	01	01	01	0005	DBH SDA Minyak Bumi-LO
7	2	01	01	01	0006	DBH SDA Gas Bumi-LO
7	2	01	01	01	0008	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO
7	2	01	01	01	0010	DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO
7	2	01	01	01	0013	DBH SDA Perikanan-LO
7	2	01	01	02		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO
7	2	01	01	02	0001	DAU-LO
7	2	01	01	02	0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan-LO
7	2	01	01	03		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO
7	2	01	01	03	0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD-LO
7	2	01	01	03	0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO
7	2	01	01	03	0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO
7	2	01	01	03	0006	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB-LO
7	2	01	01	03	0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB-LO
7	2	01	01	03	0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan-LO
7	2	01	01	04		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO
7	2	01	01	04	0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO
7	2	01	01	04	0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	2	01	01	04	0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD-LO
7	2	01	01	04	0009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum-LO
7	2	01	01	04	0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO
7	2	01	01	04	0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO
7	2	01	01	04	0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal-LO
7	2	01	01	04	0023	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian
7	2	01	02			Dana Insentif Daerah (DID)-LO
7	2	01	02	01		DID-LO
7	2	01	02	01	0001	DID-LO
7	2	02				Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO
7	2	02	01			Pendapatan Bagi Hasil-LO
7	2	02	01	01		Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO
7	2	02	01	01	0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO
7	2	02	01	01	0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO
7	2	02	01	01	0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO
7	2	02	01	01	0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan-LO
7	2	02	01	01	0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO
7	2	02	02			Bantuan Keuangan
7	2	02	02	02		Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi
7	2	02	02	02	0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi
7	3					LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO
7	3	01				Pendapatan Hibah-LO
7	3	01	01			Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO
7	3	01	01	01		Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO
7	3	01	01	01	0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO
8	1					BEBAN OPERASI
8	1	01				Beban Pegawai
8	1	01	01			Beban Gaji dan Tunjangan ASN
8	1	01	01	01		Beban Gaji Pokok ASN
8	1	01	01	01	0001	Beban Gaji Pokok PNS
8	1	01	01	01	0002	Beban Gaji Pokok PPPK
8	1	01	01	02		Beban Tunjangan Keluarga ASN
8	1	01	01	02	0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS
8	1	01	01	02	0002	Beban Tunjangan Keluarga PPPK
8	1	01	01	03		Beban Tunjangan Jabatan ASN
8	1	01	01	03	0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS
8	1	01	01	04		Beban Tunjangan Fungsional ASN
8	1	01	01	04	0001	Beban Tunjangan Fungsional PNS
8	1	01	01	04	0002	Beban Tunjangan Fungsional PPPK
8	1	01	01	05		Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN
8	1	01	01	05	0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS
8	1	01	01	05	0002	Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK
8	1	01	01	06		Beban Tunjangan Beras ASN
8	1	01	01	06	0001	Beban Tunjangan Beras PNS
8	1	01	01	06	0002	Beban Tunjangan Beras PPPK
8	1	01	01	07		Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN
8	1	01	01	07	0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS
8	1	01	01	08		Beban Pembulatan Gaji ASN
8	1	01	01	08	0001	Beban Pembulatan Gaji PNS
8	1	01	01	08	0002	Beban Pembulatan Gaji PPPK
8	1	01	01	09		Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN
8	1	01	01	09	0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS
8	1	01	01	09	0002	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK
8	1	01	01	10		Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN
8	1	01	01	10	0001	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS
8	1	01	01	10	0002	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK
8	1	01	01	11		Beban Iuran Jaminan Kematian ASN

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	01	01	11	0001	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS
8	1	01	01	11	0002	Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK
8	1	01	01	12		Beban Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN
8	1	01	01	12	0001	Beban Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS
8	1	01	02			Beban Tambahan Penghasilan ASN
8	1	01	02	01		Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN
8	1	01	02	01	0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS
8	1	01	02	01	0002	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK
8	1	01	02	03		Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN
8	1	01	02	03	0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS
8	1	01	02	04		Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN
8	1	01	02	04	0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS
8	1	01	03			Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
8	1	01	03	01		Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah
8	1	01	03	01	0006	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel
8	1	01	03	01	0007	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran
8	1	01	03	01	0008	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan
8	1	01	03	01	0009	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame
8	1	01	03	01	0010	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
8	1	01	03	01	0011	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir
8	1	01	03	01	0014	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
8	1	01	03	01	0016	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
8	1	01	03	02		Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah
8	1	01	03	02	0001	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan
8	1	01	03	02	0013	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
8	1	01	03	03		Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD
8	1	01	03	03	0001	Beban TPG PNSD
8	1	01	03	04		Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD
8	1	01	03	04	0001	Beban TKG PNSD
8	1	01	03	05		Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD
8	1	01	03	05	0001	Beban Tamsil Guru PNSD
8	1	01	03	07		Beban Honorarium
8	1	01	03	07	0001	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan
8	1	01	03	07	0002	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
8	1	01	03	07	0003	Beban Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)
8	1	01	04			Beban Gaji dan Tunjangan DPRD
8	1	01	04	01		Beban Uang Representasi DPRD
8	1	01	04	01	0001	Beban Uang Representasi DPRD
8	1	01	04	02		Beban Tunjangan Keluarga DPRD
8	1	01	04	02	0001	Beban Tunjangan Keluarga DPRD
8	1	01	04	03		Beban Tunjangan Beras DPRD
8	1	01	04	03	0001	Beban Tunjangan Beras DPRD
8	1	01	04	04		Beban Uang Paket DPRD
8	1	01	04	04	0001	Beban Uang Paket DPRD
8	1	01	04	05		Beban Tunjangan Jabatan DPRD
8	1	01	04	05	0001	Beban Tunjangan Jabatan DPRD
8	1	01	04	06		Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD
8	1	01	04	06	0001	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD
8	1	01	04	08		Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
8	1	01	04	08	0001	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
8	1	01	04	09		Beban Tunjangan Reses DPRD
8	1	01	04	09	0001	Beban Tunjangan Reses DPRD

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	01	04	10		Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
8	1	01	04	10	0001	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
8	1	01	04	11		Beban Pembulatan Gaji DPRD
8	1	01	04	11	0001	Beban Pembulatan Gaji DPRD
8	1	01	04	12		Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD
8	1	01	04	12	0001	Beban Jaminan Kesehatan DPRD
8	1	01	04	12	0002	Beban Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD
8	1	01	04	12	0003	Beban Jaminan Kematian DPRD
8	1	01	04	12	0004	Beban Tunjangan Perumahan DPRD
8	1	01	04	13		Beban Tunjangan Transportasi DPRD
8	1	01	04	13	0001	Beban Tunjangan Transportasi DPRD
8	1	01	04	14		Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD
8	1	01	04	14	0001	Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD
8	1	01	05			Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH
8	1	01	05	01		Beban Gaji Pokok KDH/WKDH
8	1	01	05	01	0001	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH
8	1	01	05	02		Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH
8	1	01	05	02	0001	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH
8	1	01	05	03		Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH
8	1	01	05	03	0001	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH
8	1	01	05	04		Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH
8	1	01	05	04	0001	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH
8	1	01	05	05		Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH
8	1	01	05	05	0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH
8	1	01	05	06		Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH
8	1	01	05	06	0001	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH
8	1	01	05	07		Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH
8	1	01	05	07	0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH
8	1	01	05	08		Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH
8	1	01	05	08	0001	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH
8	1	01	05	09		Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH
8	1	01	05	09	0001	Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH
8	1	01	06			Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
8	1	01	06	01		Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD
8	1	01	06	01	0001	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD
8	1	01	06	02		Beban Dana Operasional KDH/WKDH
8	1	01	06	02	0001	Beban Dana Operasional KDH/WKDH
8	1	02				Beban Barang dan Jasa
8	1	02	01			Beban Barang
8	1	02	01	01		Beban Barang Pakai Habis
8	1	02	01	01	0001	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi
8	1	02	01	01	0002	Beban Bahan-Bahan Kimia
8	1	02	01	01	0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas
8	1	02	01	01	0005	Beban Bahan-Bahan Baku
8	1	02	01	01	0008	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman
8	1	02	01	01	0011	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan
8	1	02	01	01	0012	Beban Bahan-Bahan Lainnya
8	1	02	01	01	0013	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan
8	1	02	01	01	0015	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran
8	1	02	01	01	0016	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium
8	1	02	01	01	0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
8	1	02	01	01	0025	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover
8	1	02	01	01	0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
8	1	02	01	01	0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos
8	1	02	01	01	0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer
8	1	02	01	01	0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor
8	1	02	01	01	0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	02	01	01	0032	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas
8	1	02	01	01	0034	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga
8	1	02	01	01	0035	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata
8	1	02	01	01	0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya
8	1	02	01	01	0037	Beban Obat-Obatan-Obat
8	1	02	01	01	0038	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya
8	1	02	01	01	0039	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat
8	1	02	01	01	0040	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain
8	1	02	01	01	0043	Beban Natura dan Pakan-Natura
8	1	02	01	01	0044	Beban Natura dan Pakan-Pakan
8	1	02	01	01	0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat
8	1	02	01	01	0053	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu
8	1	02	01	01	0054	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh
8	1	02	01	01	0055	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan
8	1	02	01	01	0056	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan
8	1	02	01	01	0057	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial
8	1	02	01	01	0058	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan
8	1	02	01	01	0059	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH
8	1	02	01	01	0060	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD
8	1	02	01	01	0063	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)
8	1	02	01	01	0064	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)
8	1	02	01	01	0070	Beban Pakaian Pelatihan Kerja
8	1	02	01	01	0073	Beban Pakaian KORPRI
8	1	02	01	01	0074	Beban Pakaian Adat Daerah
8	1	02	01	01	0075	Beban Pakaian Batik Tradisional
8	1	02	01	01	0076	Beban Pakaian Olahraga
8	1	02	01	01	0077	Beban Pakaian Paskibraka
8	1	02	01	02		Beban Barang Tak Habis Pakai
8	1	02	01	02	0004	Beban Komponen-Komponen Rambu-Rambu
8	1	02	02			Beban Jasa
8	1	02	02	01		Beban Jasa Kantor
8	1	02	02	01	0003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
8	1	02	02	01	0004	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
8	1	02	02	01	0006	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan
8	1	02	02	01	0007	Beban Honorarium Rohaniwan
8	1	02	02	01	0008	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website
8	1	02	02	01	0010	Beban Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota
8	1	02	02	01	0012	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah
8	1	02	02	01	0013	Beban Jasa Tenaga Pendidikan
8	1	02	02	01	0014	Beban Jasa Tenaga Kesehatan
8	1	02	02	01	0015	Beban Jasa Tenaga Laboratorium
8	1	02	02	01	0016	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum
8	1	02	02	01	0018	Beban Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
8	1	02	02	01	0023	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan
8	1	02	02	01	0025	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan
8	1	02	02	01	0026	Beban Jasa Tenaga Administrasi
8	1	02	02	01	0027	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer
8	1	02	02	01	0028	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum
8	1	02	02	01	0029	Beban Jasa Tenaga Ahli
8	1	02	02	01	0030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan
8	1	02	02	01	0031	Beban Jasa Tenaga Keamanan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	02	02	01	0033	Beban Jasa Tenaga Supir
8	1	02	02	01	0035	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik
8	1	02	02	01	0037	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan
8	1	02	02	01	0038	Beban Jasa Tata Rias
8	1	02	02	01	0039	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi
8	1	02	02	01	0041	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik
8	1	02	02	01	0042	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan
8	1	02	02	01	0043	Beban Jasa Penulisan dan Penerjemahan
8	1	02	02	01	0046	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi
8	1	02	02	01	0047	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara
8	1	02	02	01	0050	Beban Jasa Kalibrasi
8	1	02	02	01	0051	Beban Jasa Pengolahan Sampah
8	1	02	02	01	0052	Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi
8	1	02	02	01	0053	Beban Jasa Pengukuran Tanah
8	1	02	02	01	0055	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan
8	1	02	02	01	0059	Beban Tagihan Telepon
8	1	02	02	01	0060	Beban Tagihan Air
8	1	02	02	01	0061	Beban Tagihan Listrik
8	1	02	02	01	0062	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah
8	1	02	02	01	0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan
8	1	02	02	01	0064	Beban Paket/Pengiriman
8	1	02	02	01	0066	Beban Registrasi/Keanggotaan
8	1	02	02	01	0067	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan
8	1	02	02	01	0071	Beban Lembur
8	1	02	02	01	0073	Beban Medical Check Up
8	1	02	02	02		Beban Iuran Jaminan/Asuransi
8	1	02	02	02	0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
8	1	02	02	02	0002	Beban Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI
8	1	02	02	02	0006	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN
8	1	02	02	02	0007	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN
8	1	02	02	04		Beban Sewa Peralatan dan Mesin
8	1	02	02	04	0012	Beban Sewa Alat Besar Darat Lainnya
8	1	02	02	04	0022	Beban Sewa Electric Generating Set
8	1	02	02	04	0036	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang
8	1	02	02	04	0037	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
8	1	02	02	04	0049	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang
8	1	02	02	04	0117	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya
8	1	02	02	04	0118	Beban Sewa Mebel
8	1	02	02	04	0121	Beban Sewa Alat Pendingin
8	1	02	02	04	0123	Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
8	1	02	02	04	0126	Beban Sewa Meja Rapat Pejabat
8	1	02	02	04	0127	Beban Sewa Kursi Kerja Pejabat
8	1	02	02	04	0128	Beban Sewa Kursi Rapat Pejabat
8	1	02	02	04	0132	Beban Sewa Peralatan Studio Audio
8	1	02	02	04	0137	Beban Sewa Alat Studio Lainnya
8	1	02	02	04	0410	Beban Sewa Peralatan Jaringan
8	1	02	02	05		Beban Sewa Gedung dan Bangunan
8	1	02	02	05	0001	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor
8	1	02	02	05	0009	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
8	1	02	02	05	0038	Beban Sewa Rumah Negara Golongan I
8	1	02	02	05	0043	Beban Sewa Hotel
8	1	02	02	06		Beban Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi
8	1	02	02	06	0130	Beban Sewa Jaringan dengan Media Udara
8	1	02	02	09		Beban Jasa Konsultansi Konstruksi
8	1	02	02	09	0002	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural
8	1	02	02	09	0005	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	02	02	09	0015	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah
8	1	02	02	09	0018	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur
8	1	02	02	09	0033	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan
8	1	02	02	10		Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi
8	1	02	02	10	0003	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika
8	1	02	02	10	0012	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik
8	1	02	02	10	0014	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus
8	1	02	02	12		Beban Beasiswa Pendidikan PNS
8	1	02	02	12	0001	Beban Beasiswa Tugas Belajar S1
8	1	02	02	12	0002	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2
8	1	02	02	13		Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan
8	1	02	02	13	0001	Beban Kursus Singkat/Pelatihan
8	1	02	02	13	0003	Beban Bimbingan Teknis
8	1	02	02	13	0004	Beban Diklat Kepemimpinan
8	1	02	02	15		Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi
8	1	02	02	15	0005	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar
8	1	02	03			Beban Pemeliharaan
8	1	02	03	02		Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
8	1	02	03	02	0012	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya
8	1	02	03	02	0035	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
8	1	02	03	02	0036	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang
8	1	02	03	02	0037	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
8	1	02	03	02	0043	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya
8	1	02	03	02	0117	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya
8	1	02	03	02	0121	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin
8	1	02	03	02	0133	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film
8	1	02	03	02	0196	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya
8	1	02	03	02	0405	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer
8	1	02	03	02	0409	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer
8	1	02	03	02	0492	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar
8	1	02	03	03		Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
8	1	02	03	03	0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
8	1	02	03	03	0008	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah
8	1	02	03	03	0011	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga
8	1	02	03	03	0032	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum
8	1	02	03	03	0033	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir
8	1	02	03	04		Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	02	03	04	0026	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi
8	1	02	03	04	0048	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
8	1	02	03	04	0126	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya
8	1	02	03	05		Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
8	1	02	03	05	0057	Beban Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman
8	1	02	04			Beban Perjalanan Dinas
8	1	02	04	01		Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah
8	1	02	04	01	0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa
8	1	02	04	01	0004	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
8	1	02	04	01	0005	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
8	1	02	04	02		Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri
8	1	02	04	02	0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri
8	1	02	05			Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
8	1	02	05	01		Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
8	1	02	05	01	0001	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan
8	1	02	05	01	0003	Beban Beasiswa
8	1	02	05	01	0005	Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)
8	1	02	05	02		Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
8	1	02	05	02	0001	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain
8	1	04				Beban Subsidi
8	1	04	02			Beban Subsidi kepada BUMD
8	1	04	02	01		Beban Subsidi kepada BUMD
8	1	04	02	01	0001	Beban Subsidi kepada BUMD
8	1	05				Beban Hibah
8	1	05	01			Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat
8	1	05	01	01		Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat
8	1	05	01	01	0001	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat
8	1	05	05			Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
8	1	05	05	01		Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
8	1	05	05	01	0001	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
8	1	05	05	02		Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
8	1	05	05	02	0001	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
8	1	05	05	02	0002	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
8	1	05	05	03		Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
8	1	05	05	03	0001	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
8	1	05	05	03	0002	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
8	1	05	07			Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
8	1	05	07	01		Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
8	1	05	07	01	0001	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
8	1	06				Beban Bantuan Sosial
8	1	06	01			Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu
8	1	06	01	01		Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu
8	1	06	01	01	0001	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	06	03			Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat
8	1	06	03	01		Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat
8	1	06	03	01	0001	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat
8	2					BEBAN TIDAK TERDUGA
8	2	01				Beban Tidak Terduga
8	2	01	01			Beban Tidak Terduga
8	2	01	01	01		Beban Tidak Terduga
8	2	01	01	01	0001	Beban Tidak Terduga
8	3					BEBAN TRANSFER
8	3	01				Beban Bagi Hasil
8	3	01	01			Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa
8	3	01	01	03		Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa
8	3	01	01	03	0001	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa
8	3	01	02			Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa
8	3	01	02	01		Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa
8	3	01	02	01	0001	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa
8	3	02				Beban Bantuan Keuangan
8	3	02	05			Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa
8	3	02	05	01		Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa
8	3	02	05	01	0001	Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa
8	3	02	05	02		Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa
8	3	02	05	02	0001	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa